EXECUTIVE SUMMARY

EVALUASI IMPLEMENTASI RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026 PADA PERANGKAT DAERAH RUMPUN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

HASIL KERJASAMA ANTARA :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN GRESIK

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Executive Summary Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik untuk Rumpun Ekonomi ini dapat diselesaikan dengan baik. Executive Summary ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistema□s, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumpun Ekonomi dan SDA menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan Kabupaten Gresik mengingat peran strategisnya sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Melalui Executive Summary ini, dilakukan Analisa terhadap capaian, tantangan, serta peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik, sehingga dapat dirumuskan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Executive Summary ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat yang telah memberikan masukan berharga dalam proses konsultasi dan pengumpulan data. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpar□sipasi.

Harapan kami, Executive Summary ini dapat menjadi pijakan awal yang kuat dalam penyusunan Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada rumpun Ekonomi dan SDA, sehingga mampu menghadirkan arah pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Semoga Executive Summary ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pemangku kepen□ngan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Gresik, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud : 5
1.3. Tujuan : 6
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 7
1.5. Dasar Hukum 7
BAB II TINJAUAN LITERATUR 9
2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah 9
2.2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah 11
2. 3. Aspek-Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah 15
2. 4. Perencanaan Pembangunan yang Baik 16
2.5. Efektivitas 17
2.5.1. Pengertian Efektivitas 17
2.5.2. Ukuran Efektivitas Perencanaan Pembangunan 19
2.5.3. Indikator Efektivitas 20
2.5.4. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas Perencanaan Pembangunan 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30
3.1. Jenis Penelitian 30
3.2. Sumber Data 30
3. 3. Tahapan Analisis 30
3.4. Jadwal 32
BAB IV Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026
Rumpun Perekonomian dan SDA 33
4.1. Gambaran Umum dan Tujuan Evaluasi 33
4.2. Konsistensi Dokumen RPJMD: Visi–Misi–Tujuan–Sasaran–Indikator 33
4.2.1 Konsistensi Visi dan Misi 33
4.2.2 Konsistensi Misi dengan Tujuan Strategis 33
4.2.3 Konsistensi Tujuan dengan Sasaran 34
4.2.4 Konsistensi Sasaran dengan Indikator 34
4.3. Kualitas Indikator RPJMD: Hasil SMART Review 34
4.3.1 Kekuatan Indikator 34
4.3.2 Indikator Kategori Good 35
4.3.3 Temuan Kelemahan Indikator 35
4.4. Temuan GAP Utama dalam Implementasi RPJMD 35
4.4.1 GAP Misi I – Tata Kelola 35
4.4.2 GAP Misi II – Infrastruktur & Lingkungan 35
4.4.3 GAP Misi III – Ekonomi & Kemandirian 36

4.4.4 GAP Misi IV – SDM Unggul 36
4.4.5 GAP Misi V – Kesejahteraan Sosial & Ketenagakerjaan 36
4.5. Evaluasi Efektivitas Program RPJMD 36
4.5.1 Efektivitas Tinggi 36
4.5.2 Efektivitas Sedang 36
4.5.3 Efektivitas Rendah 37
4.6. Temuan Strategis Lintas Sektor 37
4.7. Rekomendasi Kebijakan Utama 37
4.7.1 Penguatan Sistem Perencanaan & Data 37
4.7.2 Reformulasi dan Penajaman Indikator 37
4.7.3 Percepatan Infrastruktur Dasar 37
4.7.4 Penguatan UMKM–Industri 38
4.7.5 Penguatan SDM dan Layanan Sosial 38
4.8. Kesimpulan Utama Evaluasi 38
BAB V Analisis Kesesuaian RENSTRA Dinas Pertanian 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026** 39
5.1. Pendahuluan dan Tujuan Analisis 39
5.2. Tingkat Kesesuaian Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD 39
5.2.1 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran 39
5.2.2 Kesesuaian Indikator Kinerja 40
5.2.3 Kesesuaian Program 40
5.2.4 Kesesuaian Spasial 41
5.3. Temuan GAP Strategis antara Renstra dan RPJMD 41
5.3.1 GAP Indikator 41
5.3.2 GAP Sasaran 42
5.3.3 GAP Program 42
5.3.4 GAP Kebijakan & Tata Kelola 42
5.4. Efektivitas Indikator Renstra terhadap Sasaran RPJMD 43
5.5. Rekomendasi Kebijakan Utama 43
5.5.1 Penguatan Indikator 43
5.5.2 Penguatan Program 44
5.5.3 Penguatan Sasaran 44
5.5.4 Penguatan Tata Kelola 44
5.6. Kesimpulan Utama 44
BAB VI Analisis Keterkaitan RENSTRA Diskoperindag dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 46
6.1. Latar Belakang dan Konteks Strategis 46
6.2. Keselarasan Visi–Misi Renstra dengan RPJMD 46
6.2.1 Keterkaitan pada Level Visi dan Misi 46
6.3. Kesesuaian Sasaran dan Tujuan Renstra terhadap RPJMD 47
6.4. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan 47
6.5. Kesesuaian Program: 100% Turunan RPJMD 47
6.6. Kesesuaian Indikator Kinerja 48
6.7. Hasil SMART Review dan Efektivitas Sasaran 48

6.8. Temuan GAP Utama dalam Renstra Diskoperindag 48
6.8.1 GAP Substansi 48
6.8.2 GAP Indikator 49
6.8.3 GAP Program 49
6.8.4 GAP Implementasi 49
6.9. Rekomendasi Strategis Perbaikan Renstra 49
6.10. Kesimpulan Utama 50
BAB VII Analisis Keterkaitan RENSTRA BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 51
7.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis BPPKAD 51
7.2. Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan RPJMD 51
7.2.1. Level Visi–Misi 51
7.2.2. Level Indikator Kinerja RPJMD 52
7.2.3. Level Strategi dan Arah Kebijakan 52
7.2.4. Level Program dan Kegiatan 53
7.2.5. Level Isu Strategis 53
7.3. Hasil Analisis SMART: Sasaran – Indikator – Program 54
7.3.1. SMART Sasaran 54
7.3.2. SMART Indikator 54
7.3.3. SMART Program 55
7.4. Analisis GAP Renstra BPPKAD vs RPJMD 55
7.4.1. GAP pada Indikator 55
7.4.2. GAP pada Sasaran 56
7.4.3. GAP pada Program 56
7.4.4. Ringkasan 5 GAP Terbesar 56
7.5. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Tindak Lanjut 57
7.6. Kesimpulan Utama 58
BAB VIII Analisis Keterkaitan Renstra Dinas PMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 59
8.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas PMD 59
8.2. Keterkaitan Renstra PMD dengan RPJMD 60
8.2.1 Keterkaitan pada Level Visi–Misi 60
8.2.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator 60
8.2.3 Keterkaitan Program dengan Program Prioritas RPJMD 61
8.2.4 Keterkaitan Isu Strategis 61
8.3. Hasil Analisis SMART: Indikator, Sasaran, dan Program 62
8.3.1 Analisis SMART per Indikator 62
8.3.2 Analisis SMART per Sasaran 63
8.3.3 Analisis SMART per Program 63
8.4. Analisis GAP Renstra PMD vs RPJMD 64
8.4.1 Ringkasan GAP Utama 64
8.4.2 Matriks Problem–Solution Khusus PMD 64
8.4.3 Prioritas Perbaikan (High–Medium–Low) 65
8.5. Implikasi Strategis terhadap Pencapaian RPJMD 65

8.6. Rekomendasi Kebijakan Kunci 66
8.6.1 Penguatan Indikator Outcome 66
8.6.3 Penguatan Peran Perempuan dan Kelompok Rentan 66
8.6.4 Penguatan Tata Kelola dan Sistem Pelaporan Desa 66
8.6.5 Penajaman Program Ekonomi Desa 67
8.7. Kesimpulan Utama 67
BAB IX Analisis Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 68
9.1. Latar Belakang dan Tujuan Analisis 68
9.2. Keterkaitan Formal: Renstra Disnaker sebagai Turunan Langsung RPJMD 68
9.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 69
9.3.1. Titik Temu Visi–Misi 69
9.3.2. Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra Disnaker 69
9.4. Keterkaitan Program dan Indikator Disnaker dengan RPJMD 70
9.4.1. Program 70
9.4.2. Indikator 70
9.5. Hasil Analisis SMART Indikator–Sasaran–Program 71
9.5.1. Indikator Utama 71
9.5.2. Rekap SMART 71
9.6. Temuan GAP SMART dan Implikasinya 72
9.6.1. GAP pada Indikator 72
9.6.2. GAP pada Sasaran 72
9.6.3. GAP pada Program 73
9.6.4. Ringkasan GAP Utama 73
9.7. Problem–Solution Policy dan Prioritas Tindak Lanjut 73
9.7.1. Problem–Solution Umum Disnaker 73
9.7.2. Problem–Solution per Sasaran dan Indikator 74
9.7.3. Prioritas High–Medium–Low 74
9.8. Implikasi Strategis bagi RPJMD dan Renstra Ke Depan 75
9.9. Kesimpulan Utama 76
BAB X Analisis Keterkaitan RENSTRA DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 77
10.1. Latar Belakang dan Peran Strategis DPMPTSP 77
10.2. Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD pada Level Visi–Misi–Tujuan–Sasaran 77
10.2.1 Keterkaitan Visi–Misi 77
10.2.2 Keterkaitan Tujuan & Sasaran 78
10.2.3 Keterkaitan Strategi & Arah Kebijakan 79
10.3. Keterkaitan Program, Kegiatan, dan IKD dengan RPJMD 79
10.3.1 Program & Kegiatan 79
10.3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang Diampu 80
10.4. Hasil Analisis SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 80
10.4.1 SMART per Indikator–Sasaran–Program 80
10.4.3 Ringkasan Temuan SMART 82
10.5. Analisis GAP SMART antara Renstra DPMPTSP dan RPJMD 83

10.5.1 GAP per Indikator–Sasaran–Program 83
10.5.2 GAP Agregat: Tabel 10.7 84
10.6. Prioritas Perbaikan dan Rekomendasi Kebijakan 85
10.6.1 Prioritas Tinggi (High Priority) 85
10.6.2 Prioritas Menengah (Medium Priority) 85
10.6.3 Prioritas Rendah (Low Priority) 85
10.7. Implikasi Strategis bagi RPJMD 2021–2026 dan Periode Berikutnya 86
10.8. Kesimpulan Utama 86
BAB XI Analisis Keterkaitan RENSTRA Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 88
11.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Perikanan 88
11.2. Tingkat Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD 88
11.2.1 Hirarki Visi–Misi–Tujuan–Sasaran 88
11.2.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Program 89
11.2.3 Penilaian Konsistensi Menyeluruh 90
11.3. Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja 90
11.3.1 Indikator Utama 90
11.3.2 Area Alignment dan Potensi GAP 90
11.5. Hasil Analisis SMART: Indikator, Sasaran, dan Program 92
11.5.1 SMART per Sasaran–Indikator (Ringkasan) 92
11.5.2 Analisis SMART Mendalam per Sasaran 92
11.6. Analisis GAP SMART dan Keterbatasan Utama 93
11.6.1 GAP Utama yang Diidentifikasi 93
11.6.2 GAP Visi–Misi–Sasaran dan Program 94
11.7. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Kebijakan 94
11.7.1 Problem–Solution RENSTRA Dinas Perikanan 94
11.7.2 Prioritas Arah Perbaikan 95
11.8. Kesimpulan Utama 95
BAB XII Analisis Keterkaitan Renstra DISPAREKRAFBUDPORA dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 97
12.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DISPAREKRAFBUDPORA 97
12.2. Tingkat Keterkaitan Renstra terhadap RPJMD 97
12.2.1. Keterkaitan terhadap Visi RPJMD 97
12.2.2. Keterkaitan terhadap Misi RPJMD 98
12.2.3. Keterkaitan terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD 98
12.2.4. Keterkaitan terhadap Program Prioritas RPJMD 99
12.3. Analisis Keterkaitan Renstra – RPJMD secara Rinci 99
12.3.1. Ruang Lingkup Analisis dan Pemetaan Misi 99
12.3.2. Matriks Keterkaitan Sasaran Renstra vs RPJMD 100
12.3.3. Keterkaitan IKU dan Program 100
12.4. Hasil Analisis SMART Indikator 101
12.4.1. SMART Pariwisata, Ekraf, Budaya, Pemuda & Olahraga 101
12.5. Analisis GAP Keterkaitan dan SMART 102

12.5.1. Pre-GAP Summary: Ekonomi & Outcome 102
12.5.2. GAP Struktural antara RPJMD dan Renstra 102
12.5.3. GAP SMART vs Target RPJMD 103
12.6. Problem–Solution dan Prioritas Implementasi 103
12.6.1. Matriks Problem–Solution Sektoral 103
12.6.2. Problem–Solution Lintas Isu dan Koordinasi 104
12.7. Implikasi Strategis dan Rekomendasi Kunci 105
12.8. Kesimpulan Utama 106
BAB XIII Analisis dan Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 108
13.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup Evaluasi 108
13.2. Keterkaitan RPJMD Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 108
13.2.1. Selarasnya Visi dan Peran Wilayah 108
13.2.2. Integrasi Misi Pembangunan (Top–Down Policy Alignment) 109
13.2.3. Pemetaan Prioritas Pembangunan dan Kontribusi Gresik 109
13.3. Struktur Kebijakan RPJMD dan Kesesuaian Program 110
13.3.1. Tiga Lapis Kebijakan RPJMD Gresik 110
13.3.2. Kesesuaian dengan Nawakarsa dan Struktur Urusan 110
13.4. Analisis Efektivitas Desain Program per Bidang 111
13.4.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial) 111
13.4.2. Ekonomi, Pertanian, UMKM, Tenaga Kerja 112
13.4.3. Infrastruktur, Lingkungan, Tata Ruang 112
13.5. Skor Efektivitas Program per Urusan dan Klaster Kinerja 113
13.5.1. Metodologi Skoring 113
13.5.2. Hasil Skor Efektivitas 22 Bidang Urusan 113
13.5.3. Visual Radar Efektivitas 113
13.6. SMART Analysis dan Temuan Utama 114
13.6.1. Rekap SMART per Kelompok Program 114
13.6.2. Kelemahan SMART yang Berulang 114
13.7. GAP Analysis dan Bidang Prioritas Perbaikan 114
13.7.1. GAP Strategis per Bidang Urusan 114
13.7.2. Lima GAP Prioritas Tertinggi 115
13.7.3. Klasifikasi GAP dan Solusi 116
13.8. Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan SMART 116
13.8.1. Rekomendasi Kebijakan Terukur 116
13.8.2. Rekomendasi Teknis Penguatan SMART 116
BAB XIV Analisis Keterkaitan dan Efektivitas Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 119
14.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Pertanian 119
14.2. Keterkaitan Renstra – RPJMD pada Tingkat Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator 119
14.2.1. Keterkaitan Tujuan–Sasaran dengan Sasaran RPJMD 119
14.2.2. Keterkaitan Program dan Indikator dengan RPJMD 120
14.2.3. Evaluasi Awal Efektivitas Renstra terhadap Target RPJMD 120
14.3. Matriks Keterkaitan Detail Renstra – RPJMD dan Temuan GAP 121
14.3.1. Matriks Keterkaitan Renstra–RPJMD (Tabel 14.2) 121

14.4. Revisi Indikator Berbasis SMART–Outcome dan Dampaknya 122
14.4.1. Revisi Indikator Utama Renstra (SMART-Outcome Version)..... 122
14.4.2. Contoh Baseline–Target 2025–2029 (Outcome) 123
14.4.3. Dampak Revisi terhadap Skor SMART 124
14.5. Mapping Indikator (Revisi) Renstra ↔ RPJMD 124
14.5.1. Tema Kesejahteraan Petani & Ekonomi Daerah 124
14.5.2. Tema Ketahanan Pangan & Kemandirian Pangan 124
14.5.3. Tema Hilirisasi & Nilai Tambah 125
14.5.4. Tema LP2B 125
14.5.5. Tema Kelembagaan Petani 125
14.6. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Permasalahan Strategis 125
14.6.1. Problem–Solution Utama 125
14.6.2. Prioritas Problem–Solution 126
14.7. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Quick Wins 2025 126
14.7.1. RTT Berbasis Prioritas 126
14.7.2. Quick Wins 2025 127
14.8. Ringkasan Penilaian Efektivitas dan Kesimpulan Utama 127
14.8.1. Ringkasan Penilaian Efektivitas 127
14.8.2. Kesimpulan Utama 128
BAB XV Analisis Keterkaitan RENSTRA Diskoperindag dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029 129
15.1. Latar Belakang dan Peran Strategis Diskoperindag 129
15.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator dengan RPJMD 129
15.2.1. Tujuan & Sasaran 129
15.2.2. Matriks Alignment Indikator 130
15.3. Analisis Program, Efektivitas (SMART), dan GAP Utama 130
15.3.1. Program–Kegiatan Utama 130
15.3.2. SMART Review: Efektivitas Umum 131
15.3.3. SMART + GAP per Indikator Kunci 131
15.4. Tingkat Integrasi Renstra–RPJMD dan GAP Integrasi 133
15.4.1. Matriks Integrasi Indikator Renstra–RPJMD 133
15.4.2. GAP Integrasi dan Priority Issues 133
15.5. Problem–Solution, Prioritas, dan Rencana Tindak Lanjut 134
15.5.1. Matriks Problem–Solution 134
15.5.2. Prioritas Isu dan Quick Wins 2025–2026 134
15.5.3. Rencana Tindak Lanjut (RTT) 135
15.6. Monitoring, KPI Baru, dan Efektivitas Terhadap RPJMD 136
15.6.1. Monitoring & Evaluasi 136
15.6.2. KPI Outcome Baru 136
15.6.3. Efektivitas Desain Terhadap RPJMD 136
15.7. Kesimpulan Utama Executive Summary 137
BAB XVI Analisis Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029 139
16.1. Latar Belakang dan Peran Strategis BPPKAD 139

16.2. Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan Visi–Misi RPJMD 139
16.2.1. Visi dan Misi RPJMD 139
16. 2.2. Derajat Kontribusi terhadap Misi RPJMD 140
16. 2.3. Evaluasi Efektivitas Keterkaitan (Tingkat Makro) 140
16.3. Integrasi Renstra BPPKAD dengan RPJMD di Urusan Keuangan 141
16.3.1. Arah RPJMD yang Relevan untuk BPPKAD 141
16.3.2. Arah Renstra BPPKAD 141
16.4. Analisis Efektivitas (SMART) dan GAP Utama 142
16.4.1. Skor SMART Renstra BPPKAD 142
16.4.2. GAP Analisis – Area yang Masih Lemah 142
16.5. Integrasi Indikator Renstra–RPJMD dan Kualitas Desain IKU/IKK 143
16.5.1. Tingkat Keterpaduan Indikator 143
16.5.2. Ringkasan Integrasi 144
16.6. Problem–Solution Policy, Prioritas, dan RTT 144
16.6.1. Matriks Problem–Solution Policy 144
16.6.2. Rekomendasi KPI Baru dan Quick Wins 145
16.6.3. Prioritas Penutupan GAP dan RTT 146
16.7. Kontribusi terhadap Misi RPJMD dan Kesimpulan Utama 146
16.7.1. Kontribusi terhadap Misi 2, 4, dan 5 146
16.7.2. Kesimpulan Evaluatif 147
BAB XVII Analisis Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas PMD (DPMD) dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 148
17.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DPMD dalam RPJMD 148
17.2. Keterkaitan Renstra DPMD dengan Visi–Misi dan Isu Strategis RPJMD 148
17.2.1. Keselarasan dengan Visi RPJMD 148
17.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD 149
17.2.3. Integrasi terhadap Isu Strategis Daerah 149
17.2.4. Kontribusi terhadap Tujuan Makro RPJMD 150
17.2.5. Ringkasan Konsistensi 150
17.3. Hasil SMART Analysis dan Efektivitas Desain Indikator 150
17.3.1. Landasan Indikator Renstra DPMD 150
17.3.2. Skor SMART 151
17.4. GAP Analysis: Keterbatasan terhadap Kebutuhan Outcome RPJMD 151
17.4.1. GAP terhadap Sasaran Makro RPJMD 151
17.4.2. Rekomendasi KPI Baru (Penutup GAP) 152
17.5. Integrasi Renstra DPMD – RPJMD dan Temuan Strategis 153
17.5.1. Matriks Integrasi Indikator 153
17.5.2. Temuan Strategis 154
17.6. Problem–Solution Policy, Prioritas Intervensi, dan RTT 154
17.6.1. Matriks Problem–Solution Policy (Tabel 17.5) 154
17.6.2. Quick Wins 2025–2026 dan Prioritas Intervensi 155
17.6.3. Rencana Tindak Lanjut (RTT) Renstra DPMD 2025–2029 155
17.7. Efektivitas Per-Kelompok Indikator dan Dampak ke RPJMD 156
17.7.1. Efektivitas per Kelompok Indikator (Tabel 17.10) 156

17.7.2. Skoring SMART per Indikator (Tabel 17.11) 157
17.8. Mekanisme Monev dan Target Breakthrough 2025–2026 158
17.8.1. Skema Monitoring & Evaluasi 158
17.8.2. Target Breakthrough 2025–2026 158
17.9. Kesimpulan Utama Executive Summary 158
BAB XVIII Analisis Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 160
18.1. Latar Belakang dan Peran Strategis Disnaker 160
18.2. Keterkaitan Renstra Disnaker dengan Visi–Misi RPJMD 160
18.2.1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD 160
18.3. Pemetaan Tujuan–Sasaran–Indikator dan GAP Keterkaitan 161
18.3.1. Pemetaan Tujuan–Sasaran–Outcome 161
18.3.2. GAP Alignment Utama 162
18.4. Efektivitas Desain Renstra dengan Metode SMART 163
18.4.1. Penilaian SMART secara Umum 163
18.4.2. SMART Scoring per Indikator 164
18.5. Integrasi Indikator Renstra Disnaker ↔ RPJMD 164
18.5.1. Matriks Integrasi dan Skor 164
18.6. GAP Analysis, Problem–Solution Policy, dan Isu Strategis 165
18.6.1. GAP Analisis terhadap RPJMD 165
18.6.2. Matriks Problem–Solution Policy 166
18.7. Prioritas Intervensi dan Rencana Tindak Lanjut (RTT) 167
18.7.1. Prioritas Intervensi 167
18.7.2. Rencana Tindak Lanjut (RTT) 2025–2026 168
18.7.3. Quick Wins 2025–2026 168
18.8. Kesimpulan Utama dan Implikasi terhadap RPJMD 169
18.8.1. Ringkasan Kinerja dan Efektivitas 169
18.8.2. Isu Strategis dan Rekomendasi Kunci 169
18.8.3. Implikasi bagi Evaluasi RPJMD 2025–2029 170
BAB XIX Analisis Keterkaitan Dokumen Renstra DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029 171
19.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DPMPTSP 171
19.2. Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan Visi–Misi RPJMD 171
19.2.1. Keterkaitan dengan Visi “Gresik Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan” 171
19.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD 173
19.3. Posisi Strategis dan Keterkaitan Tujuan–Sasaran Renstra–RPJMD 174
19.3.1. Posisi Strategis 174
19.3.2. Keterkaitan Tujuan & Sasaran 174
19.4. Efektivitas Desain Renstra (SMART) dan Temuan GAP 175
19.4.1. Penilaian SMART Global 175
19.4.2. Efektivitas per Kelompok Indikator 176

19.4.3. GAP Efektivitas: Apa yang Masih Kurang? 176
19.5. SMART + GAP per IKU/IKK dan Integrasi dengan RPJMD 177
19.5.1. SMART + GAP IKU DPMPTSP 177
19.5.2. SMART + GAP IKK DPMPTSP 177
19.6. GAP Analisis Per-Dimensi Pembangunan dan Prioritas Penutupan GAP 178
19.6.1. GAP Per-Dimensi (Tabel 19.5) 178
19.6.2. Tiga GAP Prioritas Tinggi 179
19.7. Problem–Solution Policy, Prioritas Intervensi, dan RTT 179
19.7.1. Problem–Solution Policy 179
19.7.2. Prioritas Intervensi (Tabel 19.6) 180
19.7.3. Fokus Kebijakan Utama 2025–2026 181
19.8. Rencana Tindak Lanjut (RTT), Quick Wins, dan Timeline 181
19.8.1. RTT Berbasis Prioritas (Tabel 19.8) 181
19.9. Kesimpulan Utama Executive Summary 182
BAB XX Analisis Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dengan Dokumen RPJMD Gresik 2025–2029 184
20.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Perikanan 184
20.2. Keterkaitan Renstra dengan Visi–Misi RPJMD 184
20.2.1. Keterkaitan dengan Visi RPJMD 184
20.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD 185
20.3. Integrasi Tujuan–Sasaran–Program–Indikator dengan RPJMD 186
20.3.1. Integrasi Tujuan & Sasaran 186
20.3.2. Integrasi Program dan Indikator 186
20.4. SMART + GAP Analysis Indikator Renstra Perikanan 187
20.4.1. SMART + GAP IKU 187
20.4.2. SMART + GAP IKK 188
20.5. Matriks Problem–Solution Policy dan Area Kritis 189
20.5.1. Problem–Solution per Sub-Sistem 189
20.6. Prioritas Intervensi (High–Medium–Low) dan Fokus Kebijakan 190
20.6.1. Tabel Prioritas Intervensi 190
20.7. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Timeline 1 91
20.7.1. RTT Prioritas HIGH 191
20.7.2. RTT Prioritas Medium & Low 192
20.8.1. Temuan GAP Paling Kritis 192
20.8.2. RTT Per Bab (Garis Besar) 192
20.9. Kesimpulan Umum Executive Summary 193
BAB XXI Analisis Keterkaitan Renstra DISPAREKRAF dengan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 195
21.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DISPAREKRAF 195
21.2. Keterkaitan Renstra DISPAREKRAF dengan Visi–Misi RPJMD 195
21.2.1. Misi RPJMD yang Relevan 195
21.3. Keterkaitan Tujuan & Sasaran Renstra per Bidang 196
21.3.1. Pariwisata 196
21.3.2. Ekonomi Kreatif (Ekraf) 197

21.3.3. Kebudayaan 197
21.3.4. Kepemudaan 197
21.3.5. Olahraga 198
21.4. Tingkat Konsistensi Renstra DISPAREKRAF dengan RPJMD 198
21.5. SMART + GAP Analysis Indikator DISPAREKRAF 199
21.5.1. Ringkasan SMART per Indikator 199
21.6. Matrix Problem–Solution per Bidang dan Temuan GAP Strategis 200
21.6.1. Bidang Pariwisata 200
21.6.2. Ekonomi Kreatif 200
21.6.3. Kebudayaan 200
21.6.4. Kepemudaan 201
21.6.5. Olahraga 201
21.6.6. Temuan GAP Strategis Utama 201
21.7. Tabel Prioritas High–Medium–Low dan Fokus Kebijakan 202
21.7.1. High Priority (8 Kebijakan Utama) 202
21.7.2. Medium & Low Priority 202
21.8. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Tahapan Waktu 202
21.8.1. RTT Prioritas Tinggi 202
21.9. GAP Analysis Menyeluruh dan 10 GAP Paling Kritis 204
21.9.1. GAP per Bidang 204
21.9.2. GAP per Komponen Renstra 204
21.9.3. Top 10 Critical GAP (Ringkasan) 205
21.10. Kesimpulan Utama Executive Summary 205
DAFTAR PUSTAKA 207

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang memuat arah, prioritas, kebijakan, dan program pembangunan daerah untuk periode lima tahun. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 memegang peranan krusial sebagai peta jalan pengelolaan sumber daya daerah, alokasi anggaran, dan kerangka pencapaian indikator kinerja sektoral. Evaluasi atau *review* terhadap dokumen RPJMD diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan bersifat realistis, terukur, berbasis bukti, dan selaras dengan kebijakan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini disusun untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan pembangunan provinsi.

Secara empiris, efektivitas RPJMD berdampak langsung pada pencapaian outcome publik: kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gresik, sebagai daerah dengan komposisi ekonomi yang melibatkan industri, pertanian, dan sektor maritim, menghadapi tantangan spesifik—antara lain kebutuhan mitigasi polusi industri, penguatan UMKM, ketahanan pangan daerah, serta peningkatan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi). Oleh karena itu, review dokumen RPJMD 2025 harus menilai sejauh mana prioritas dan program yang diusulkan merespons tantangan-tantangan tersebut serta menutup kesenjangan antara target perencanaan dan kinerja historis.

Dalam konteks Kabupaten Gresik, RPJMD menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan daerah agar dapat menjawab tantangan strategis, mengoptimalkan potensi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, serta regulasi yang terus berubah

menuntut adanya penyesuaian terhadap dokumen RPJMD agar tetap relevan, adaptif, dan efektif.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah berkewajiban melakukan *review* atau evaluasi dokumen RPJMD secara berkala, terutama menjelang berakhirnya periode perencanaan. Proses *review* ini bertujuan untuk menilai ketercapaian indikator kinerja, kesesuaian arah kebijakan dengan perkembangan terkini, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menghadapi tantangan strategis, antara lain percepatan transformasi industri berbasis keberlanjutan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penanganan isu lingkungan dan ketahanan wilayah pesisir. Oleh karena itu, *review* terhadap RPJMD tahun berjalan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

RPJMD memiliki peran strategis dalam mengarahkan berbagai sektor pembangunan, terutama sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik memegang peranan penting dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi dan SDA berjalan dengan efektif, efisien, serta berorientasi pada keberlanjutan. Fokus utama dari bidang ini mencakup perumusan kebijakan strategis, koordinasi lintas sektor, pembinaan terhadap perangkat daerah terkait, pengawasan implementasi program, serta evaluasi terhadap capaian pembangunan di sektor ekonomi dan SDA.

Dalam suatu sistem perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu bagian terpenting setelah proses perencanaan dan pelaksanaan. Secara umum hal ini bertujuan untuk mengukur capaian dan keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan rencana. Perencanaan daerah yang baik, tidak selalu memberikan hasil yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya proses pelaksanaan yang baik dan konsisten dengan perencanaan. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan

daerah merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang mempunyai ketugasan dalam perencanaan daerah, yakni meliputi perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan, prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan yang berwenang untuk mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang didasari oleh potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan transparan, responsis, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pengendalian dan evalusi dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 1) tahapan pengendalian, yaitu proses pengumpulan dan analisis data dan informasi yang bersifat periodik terhadap proses implementasi program/kegiatan untuk mengetahui kekurangan dan membantu proses penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan, serta 2) tahapan evaluasi, yaitu proses penilaian dalam pencapaian tujuan perencanaan dan penilaian kinerja/ realisasi hasil perencanaan pembangunan, baik kinerja secara fisik maupun kinerja keuangan daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya.

Perangkat daerah yang berada dalam rumpun Bidang Perekonomian dan SDA merupakan pelaksana teknis dari berbagai program pembangunan di sektor ini, meliputi :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Perikanan;
8. Dinas Pertanian.

Masing-masing perangkat daerah tersebut memiliki tanggung jawab yang spesifik namun saling berkaitan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA di Kabupaten Gresik. Sinergi lintas sektoral menjadi sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara holistik. Dalam kerangka teori perencanaan publik dan manajemen kinerja publik (mis. teori *results-based management*, *evidence-based policymaking*, dan prinsip good governance), RPJMD yang berkualitas ditandai oleh:
(1) keterkaitan logis antara visi-misi kepala daerah dengan tujuan strategis dan indikator kinerja;
(2) kejelasan alur logis program—dari input, kegiatan, keluaran, hingga outcome;
(3) dasar bukti yang kuat untuk asumsi kebijakan;
(4) alokasi sumber daya yang proporsional dengan prioritas; dan
(5) mekanisme monitoring & evaluasi yang terukur serta partisipatif.

Review ini mengadopsi pendekatan sistematik untuk menguji dimensi-dimensi tersebut di konteks Kabupaten Gresik. Kesenjangan praktis yang sering ditemukan dalam RPJMD daerah meliputi target yang tidak realistis tanpa dasar perhitungan yang transparan, indikator yang belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta kurangnya sinkronisasi antar OPD sehingga risiko duplikasi atau fragmentasi program meningkat. Untuk Kabupaten Gresik 2025, penting pula menilai keterpaduan antar sektor—mis. hubungan antara program pengembangan industri dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal—agar pembangunan berkonsep inklusif dan berkelanjutan. Review ini juga akan menilai tingkat partisipasi publik dan akuntabilitas dokumen: apakah aspirasi masyarakat terakomodasi dan apakah mekanisme transparansi/perubahan program tersedia.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan, berbagai tantangan tetap muncul seiring dengan dinamika zaman. Perubahan global seperti krisis ekonomi, pandemi COVID-19, serta ancaman perubahan iklim telah mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Tantangan-tantangan tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap implementasi RPJMD, khususnya pada sektor ekonomi dan SDA. Salah satu pokok pengendalian dan evaluasi yang telah dijelaskan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 ialah evaluasi terhadap Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik

perumusan, pelaksanaan, kebijakan, maupun hasil capaian. Evaluasi terhadap hasil RPJMD berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran, dalam Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai. Evaluasi hasil RPJMD dilakukan melalui penilaian pelaksanaan RPJMD, guna mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil RKPD kabupaten/kota.

Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah dijalankan, mengevaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU), serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pembangunan. Dengan evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan efektif, adaptif, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

1.2. Maksud :

Maksud dari penyusunan Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA yakni :

a. Mengukur efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan di sektor perekonomian dan SDA, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi implementasi RPJMD di masa depan.
b. Mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan yang terjadi dalam proses implementasi.

c. Melakukan evaluasi atas dokumen RPJMD OPD rumpun bidang Ekonomi Kabupaten Gresik periode 2021-2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
d. Memperoleh dokumen RPJMD rumpun bidang Ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2025 yang sesuai dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan bidang ekonomi.
e. Melakukan evaluasi kesesuaian strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi dengan kondisi aktual Kabupaten Gresik, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi jangka menengah. Merujuk pada Pasal 269 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.3. Tujuan :

Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA, bertujuan untuk:

a. Menilai efektifitas kebijakan dan program pembangunan;
b. Menilai tingkat ketercapaian Tujuan dan Sasaran;
c. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan;
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
e. Memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
f. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
g. Menelaah kesesuaian antara strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi dengan kondisi aktual daerah;
h. Memberikan rekomendasi strategis dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
i. Teridentifikasinya hasil pencapaian pelaksanaan RPJMD Rumpun Bidang Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 atau Tahun berjalan secara makro untuk masing-masing agenda Pembangunan Daerah.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA, paling sedikit memuat informasi tentang:

a. Peninjauan dokumen RPJMD, RKPD, dan LKPJ
b. Pengumpulan data capaian indikator kinerja utama (IKU) dan nawakarsa dari masing-masing perangkat daerah terkait
c. Analisis efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
    - Indikator tujuan dan sasaran
    - Target dan realisasi setiap tahunnya
    - Persentase capaian kumulatif dan tahunan
d. Identifikasi permasalahan dan tantangan
    - Faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja
    - Evaluasi terhadap kebijakan, Program dan Kegiatan

Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi kebijakan strategis

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini mencakup dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan evaluasi, bagian-bagian yang penting untuk diveluasi, serta dasar hukum terhadap cakupan pembahasan dalam evaluasi. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan Evaluasi Hasil RPJMD yaitu :

a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjadi bingkai awal dalam proses evaluasi dokumen perencanaan.
b. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
g. Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perancanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan awal pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan merupakan sebuah acuan atau pedoman dasar bagi kegiatan pembangunan. Menurut Soekartawi (1990:3) konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Menurut Solihin (2005:77) mendefinisikan secara praktis perencanaan pembangunan yaitu merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (actor), baik umum (public) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara :

a) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
b) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
c) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
d) Melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan secara bertahap. Definisi mengenai perencanaan pembangunan ini dapat dianalisis sebagai cara dalam merumuskan permasalahan yang timbul dimasyarakat kemudian akan dijadikan sebuah prioritas pembangunan sebagai suatu cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tjokroamidjojo (1995:14) menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan perlu diketahui lima hal pokok yaitu:

a) Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu Negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
b) Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
c) Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatif terbaik.
d) Penerjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkret.

e) Jangka waktu pencapaian tujuan.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset atau penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisa data hingga studi lapangan atau kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konsepual atau dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusal alternatif alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang digunakan sebagai bahan yang digunakan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (materiil) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Bratakusuma, 2003:7).

Secara lebih spesifik, Riyadi dan Bratakusumah (2004:7-8) membedakan perencanaan pembangunan menjadi dua jenis, yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan daerah. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu poses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya yang lain, termasuk Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan melalui investasi (Affandi, Anwar dan Hadi dalam Riyadi dan Bratakusuma, 2004:8).

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang teguh pada asas otonomi daerah (Riyadi dan Bratakusuma, 2004:7). Dari berbagai pendapat dan definisi perencanaan yang telah dikembangkan, Rustiadi (2011:340) menyimpulkan secara umum hampir selalu terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yakni : (1) unsur hal yang ingin dicapai dan (2) unsur cara untuk mencapainya.

Dalam penjabarannya, dalam proses perencanaan dikenal berbagai nomenklatur-nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Didalam pemanfaatannya, istilah-istilah tersebut sering saling dipertukarkan secara tidak konsisten dan bahkan cenderung membingungkan, sehingga dapat mengganggu proses pembangunan. Visi, tujuan, dan sasaran adalah istilah-istilah yang menjelaskam

mengenai unsur perencanaan (hal yang ingin dicapai) sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua (cara untuk mencapai). Kemudian strategi, program, dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya (mencakup dua unsur perencanaan) dalam suatu struktur tertentu.

Lebih lanjut, (Conyers dan Hill, 1984:3-8), ada empat komponen utama perencanaan, yaitu :

a) *To plan means to choose* (merencanakan berarti memilih).
b) *Planning as a means of allocating resource* (perencanaan berarti menyediakan sumber daya).
c) *Planning as a means of achieving goals* (perencanaan berarti mencapai tujuan).
d) *Planning for the future* (perencanaan berarti berorientasi pada masa mendatang).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai definisi perencanaan pembangunan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah akan membentuk tiga hal pokok yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kondisi daerah, dan pengembangan suatu area atau daerah dan sumber daya yang ada didalamnya.

Pentingnya orientasi yang bersifat menyeluruh dalam perencanaan pembangunan daerah dikarenakan kompleksitas yang secara logis sulit untuk direalisasikan secara menyeluruh. Permasalahan yang muncul dimasyarakat akan semakin kompleks secara bersamaan akan diikuti oleh kuantitas permasalahan yang akan timbul. Menanggapi hal ini, maka proses perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek prioritas yang akan dicapai, sehingga pembangunan daerah akan memiliki prinsip keadilan, namun tidak mengesampingkan persoalan lain yang belum diatasi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan Adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu :

a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
b) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
c) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
d) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sementara perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan dengan memakai pendekatan :

a) Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dimaksudkan adalah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistemais terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan.
b) Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

c) Politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Rencana harus diiplementasikan setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Salah satu aspek penting perencanaan pembangunan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu. Keputusan harus dibuat pada berbagai tahapan antara lain sebagai berikut :

a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa tujuan yang jelas organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.

b) Merumuskan keadaan saat ini Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang.

c) Mengidentisifikasi kemudahan dan hambatan Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentisifikasi untuk mengukur kemampuannya dalam mencapai tujuan.

d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai altrernatif kegiatan untuk mencapai tujuan alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

Perencanaan Pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3 meliputi :

a) Rencana Pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan

arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.

c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan derah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Perencanaan pembangunan meliputi empat kegiatan yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan, dan pengesahan usulan. Proses-proses tersebut dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) desa. Dalam hal ini masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan masukan tentang begaimana permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut juga disertai alternatif pemecahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Pada tingkat Desa permasalahan dan solusi dari masyarakat dibahas serta didiskusikan bersama-sama, hasilnya diajukan ketingkat kecamatan.

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dimasing-masing Desa kemudian dibahas bersama-sama ditingkat kecamatan dan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) kecamatan. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kecamatan selanjutnya dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kabupaten dan juga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Provinsi. Ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat kemudian terjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan agenda/rencana pemerintah kedepan.

Didalam proses penyusunan inilah terjadi penyaringan usulan-usulan dan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan instansi-instansi pemererintahan. Permasalahan pendidikan disesuaikan dengan instansi pendidikan, masalah pertanian disesuaikan dengan instansi pertanian, dan seterusnya. Setelah melalui tahapan agenda setting di instansi terkait, tahapan selanjutnya adalah mengusulkan rencana pembangunan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna dilakukan penetapan dan realisasi pembangunan.

2. 3. Aspek-Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat beberapa aspek dalam perencanaan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Bratakusuma (2002:11 15) menyebutkan aspek-aspek dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

a) Aspek lingkungan

   Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara serius oleh setiap perencanaan pembangunan. Hal ini penting karena lingkungan memberi dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan masalah lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan.

b) Aspek potensi dan masalah

   Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap perencanaan dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan daerah. Potensi dan masalah merupakan faktor yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan.

c) Aspek institusi

perencanaan Institusi perencanaan adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah, karena pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat, maka hal itu perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

d) Aspek ruangan dan waktu

Pembatasan ruang dan waktu dalam hal ini bukan berarti sebagai batasan yang bersifat mutlak yang dipandang secara parsial, melainkan merupakan suatu kegiatan yang harus dipakai oleh setiap perencanaan bahwa hasil-hasil rumusan atau keputusan yang disusunnya harus diimplementasikan dalam bentuk arsip atau kegiatan untuk kurun waktu tertentu di wilayah atau daerah tertentu.

e) Aspek legalisasi kebijakan

Adanya legalisasi kebijakan terhadap perencanaan pembangunan daerah, implementasi harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersendiri. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan berbagai dampak suatu proses pembangunan.

2. 4. Perencanaan Pembangunan yang Baik

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
b) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
c) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
d) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan yang baik memiliki 3 prinsip yaitu :

a) Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya harus ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan.
b) Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak berhenti pada satu tahap tetapi terus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran.
c) Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi, tetapi dilihat dari berbagai aspek, dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

2.5. Efektivitas

2.5.1. Pengertian Efektivitas

Konsep efesiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa

mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur (Wojowisato, 1997:12). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Ensiklopedia Administrasi dalam Liang Gie, 1981:149).

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil dan/atau berhasil guna. Handoko (1993:7) berpendapat (1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Liang Gie (1981:34) berpendapat Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Maksud dari pengertian di atas adalah efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau usaha suatu organisasi dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang dicapai.

Berbeda pendapat pada Siagian (2011:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dari bermacam-macam pendapat di atas, terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lubis dan Huseini (1987:56) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu :

a) Pendekatan sasaran (goals approach), dimana pusat perhatian pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
b) Pendekatan sumber (recourse approach) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM), baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
c) Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

d) Pendekatan integratif (integrative approach) yakni pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output. Dari berbagai konsep efektifitas di atas, maka dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan proses, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perencanaan pembangunan di Kabupaten/kota.

2.5.2. Ukuran Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah dibuat dengan hasil nyata yang telah dilaksanakan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat dan tidak sesuai sehingga menyebabkan kurang atau tidak tercapainya suatu tujuan yang diharapkan, maka hal itu disebut tidak efektif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dari efektivitas. Duncan dalam Steers (2005:53) mengemukakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :

a) Pencapaian Tujuan

   Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian yang dipandang melalui suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir. semakin terjamin diperlukan pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan merupakan target konkret.

b) Integritas

   Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

   Adaptasi merupakan kemampuan organisasi serta individu-individu yang ada didalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Disamping itu, adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (sustainabillity). Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H.

Emerson yang dikutip Handayaningrat (1998:88) dalam bukunya Sistem Birokrasi Pemerintah, sebagai berikut :

"*Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak*" (Handayaningrat, 1998:16).

Ukuran dari efektivitas perencanaan pembangunan adalah apakah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu berhasil sesuai tujuan awalnya. Adapun menurut Ringkasan Eksekutif Kajian Efektivitas Perencanaan Pembangunan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan (2010) menjelaskan bahwa indikator efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah adalah :

a) Satuan waktu;

b) Satuan hasil;

c) Kualitas kerja; dan

d) Kepuasan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, indikator efektivitas merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan tingkat pencapaian suatu tujuan. Efektif merupakan gambaran bahwa tujuan yang tercapai telah diukur berdasarkan hasil gunanya. Efektif juga sangat erat dengan penyelesaian sebuah permasalahan, Oleh karena itu, efektivitas terkadang tidak diukur oleh seberapa banyak biaya yang dibutuhkan, namun lebih berfokus pada optimalisasi permasalahan yang dapat terselesaikan.

2.5.3. Indikator Efektivitas

Barnard dalam Prawirosentono (2008:27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasanan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator yaitu :

a) Kejelasan tujuan program

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan program

c) Perumusan kebijakan program yang mantap

d) Penyusunan program yang tepat

e) Penyediaan sarana dan prasarana

f) Efektivitas operasional program

g) Efektivitas fungsional program

h) Efektivitas tujuan program

i) Efektivitas sasaran program

j) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan

k) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

2.5.4. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Secara teoritis, efektivitas suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh sejumlah faktor determinan. Steers (2005:11) mencoba mengidentifikasi empat himpunan faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas organisasi. Pertama, himpunan karakteristik organisasi, yang terdiri atas faktor struktur, yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan unit kerja, serta faktor teknologi. Kedua, karakteristik lingkungan, yang terdiri atas faktor ekstern, yaitu kekompleksan, kestabilan, dan ketidaktentuan, serta faktor intern (iklim), yaitu orientasi pada karya, pekerja-sentris, orientasi pada imbalan-hukuman, keamanan melawan resiko, keterbukaan melawan pertahanan. Ketiga, karakteristik pekerja, yang terdiri atas faktor keterikatan pada organisasi, yaitu ketertarikan, kemantapan kerja, dan komitmen pada tugas, serta faktor prestasi kerja, yaitu motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan, dan kejelasan peran. Keempat, karakteristik kebijakan dan praktek manajemen, yang terdiri atas faktor faktor penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi dan adaptasi organisasi.

Suatu studi yang amat terkenal mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi mencapai keunggulannya dikemukakan oleh Peters dan Waterman (1982:8) dalam bukunya In Search of Excellence. Dengan mempelajari kurang lebih 75 perusahaan Amerika Serikat yang berhasil, Peters dan Waterman mengemukakan tujuh faktor keberhasilan organisasi (disebut the Seven S's), yaitu (a) sistem, (b) struktur, (c) strategi, (d) staf, dalam artian Sumber Daya Manusia (SDM), (e) gaya kepemimpinan (style), (f) keterampilan (skills), (g) nilai-nilai yang dimiliki (shared values).

a) Faktor Sistem

Sistem merupakan salah satu konsep yang penting untuk menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas organisasi. Kast dan Rosenzweig (1982:37) mengemukakan bahwa suatu sistem adalah satu keseluruhan yang kompleks, terorganisasikan; suatu himpunan atau kombinasi dari berbagai unsur atau yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks atau uniter. Sementara, Kershner (Kast dan Rosenzweig, 1982:88) merumuskan bahwa sistem adalah suatu himpunan berbagai entitas atau hal-hal yang menerima masukan tertentu, dan diselenggarakan sesuai persetujuan bersama untuk menghasilkan keluaran tertentu, dengan tujuan memaksimalkan fungsi masukan dan kelurahan.

Dengan demikian, organisasi sebagai satu sistem yang diharapkan dapat berfungsi secara efisien dan efektif harus memiliki komponen dan unsur-unsur masukan dengan standar tertentu yang dapat ditransformasikan untuk mendapatkan keluaran yang optimal, standar, dan bermutu. Dari perspektif sistem, organisasi publik atau bisnis secara teoritis dikelompokkan sebagai sistem terbuka. Menurut von Berthalanffy (Kast dan Rosenzweig, 1982:89) sistem terbuka tidak lain adalah suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Berdasarkan ancangan ini, sistem dalam organisasi lebih ditekankan kepada persoalan mengenai saling hubungan, struktur, saling ketergantungan antar unsur dan transformasi untuk mencapai keluaran (Katz dan Kahn, 2006:32).

Oleh karena itu, sebagai sistem terbuka, suatu organisasi dapat diidentifikasi atas tiga komponen utama, yaitu (1) masukan (yang berasal dari masyarakat), (2) transformasi, dan (3) keluaran (untuk kepentingan masyarakat). Dalam studinya, Katz and Kahn (2006:37-43) mengidentifikasi sembilan karakteristik penting dari organisasi sebagai sistem terbuka, sebagai berikut :

1) Pemasukan enerji (masukan) dari lingkungan.
2) Pengubahan bentuk enerji (transformasi melalui kegiatan kerja dalam organisasi).
3) Pengeluaran enerji yang sudah diubah bentuknya (keluaran) ke lingkungan luar/masyarakat.
4) Terjadinya daur proses transformasi, yaitu aktivitas pengolahan.
5) Entropi negatif, yaitu organisasi memasukkan enerji lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Berarti sistem menggunakan enerji dalam proses transformasi dan menyimpan sebagiannya untuk kebutuhannya kelak.

6) Mekanisme pengendalian informasi. Sistem menerima informasi dari lingkungan, menyimpan, memperbaharui, serta mengelola dan menggunakan informasi itu sebagai tanggapan sistem terhadap lingkungan.
7) Tingkah laku yang mantap. Sistem cenderung mempertahankan sifat dasar aparatur dengan mengendalikan atau menetralkan ancaman kekuatan yang datang dari luar, dengan keseimbangan dinamis (dynamic equillibrium).
8) Diferensiasi peranan dan spesialisasi fungsi. Dengan berkembangnya sistem, ada kecenderungan yang semakin meningkat ke arah meluasnya peranan dan spesialisasi fungsi.
9) Keluwesan dan adaptabilitas terhadap lingkungan. Sistem yang terbuka selalu mempunyai daya keluwesan dan penyesuaian yang melekat untuk menghadapi perubahan dari lingkungannya.

b) Faktor Struktur

Dalam konteks organisasi, secara sederhana struktur menyatakan cara organisasi mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kegiatan kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi kepada tugas. Steers (2005:67-75) mengidentifikasi setidaknya ada enam faktor dari struktur yang dapat dikenali, yang secara empiris ternyata mempengaruhi beberapa segi efektivitas organisasi, yaitu tingkat desentralisasi/sentralisasi, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi dan unit kerja. Berikut ini akan ditinjau sepintas masing-masing faktor struktur tersebut.

1) Desentralisasi/Sentralisasi

   Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarkhi organisasi. Dengan demikian, pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi sebuah organisasi, makin luaslah lingkup para karyawan bawahan turut serta dalam dan memikul tanggungjawab atas keputusan keputusan mengenai pekerjaan aparatur dan kegiatan mendatang dari organisasinya.

Sentralisasi, sebaliknya, menunjukkan tingkat keterpusatan dalam wewenang dan pengambilan keputusan. Pada organisasi yang mempunyai tingkat sentralisasi yang tinggi, sebaliknya tingkat desentralisasinya rendah, keputusan-keputusan umumnya dibuat hanya pada puncak organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan organisasi yang besar tingkat sentralisasinya lebih rendah dari pada organisasi kecil. Steers (2005:72) melaporkan bahwa bertambahnya desentralisasi dalam organisasi sering menghasilkan perbaikan pada beberapa segi efektivitas. Khususnya, desentralisasi ternyata ada hubungannya dengan meningkatnya efisiensi manajemen, komunikasi dan umpan balik terbuka, kepuasan kerja, dan kebetahan kerja karyawan. Desentralisasi dalam beberapa kasus ternyata menghasilkan perbaikan karya, peningkatan inovasi, dan kreativitas dalam organisasi, yang berakibat kepada peningkatan efektivitas dan produktivitas organisasi.

2) Spesialisasi fungsi

Konsep spesialisasi fungsi timbul dari gerakan manajemen ilmiah pada awal abad XX yang berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk membagi-bagi fungsi kerjanya menjadi kegiatan yang lebih spesifik. Spesialisasi fungsi dalam suatu organisasi akan mengakibatkan peningkatan efektivitas, karena spesialisasi memungkinkan setiap karyawan yang mempunyai keahlian tertentu dapat bekerja secara lebih efisien untuk menangani pekerjaan dibidang yang dikuasainya, sehingga dapat memberi sumbangan terhadap pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

3) Formalisasi

Formalisasi secara konseptual menunjuk kepada tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam suatu organisasi, yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi. Formalisasi biasanya menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja karyawan melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh peraturan, pengaturan, kewajiban kerja tertulis yang mengatur tingkah laku karyawan, semakin besar tingkat formalisasinya. Sering dikemukakan argumentasi bahwa peningkatan formalisasi menjadi penghalang terbesar bagi efektivitas, karena para manajer dalam struktur yang sangat formal akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai “juklak” dan “juknis” atau Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Beberapa

penelitian melaporkan bahwa formalisasi mempunyai korelasi yang positif dengan efektivitas organisasi, apabila organisasi itu sudah mencapai tingkat kematangan, stabil, dan mapan. Sebaliknya, formalisasi itu berkorelasi negatif bila organisasi itu masih kurang matang dan tidak stabil. Dengan demikian unsur formalisasi memberikan kontribusi yang efektif terhadap organisasi, tergantung kepada kondisi organisasi itu sendiri.

4) Rentang kendali

Secara konseptual, rentang kendali (span of control) menyatakan jumlah rata-rata bawahan dari setiap divisi, bidang, atau seksi. Semakin besar rentang kendali, kemungkinan semakin rendah efektivitas organisasi. Pengaruh rentang kendali terhadap efektivitas organisasi juga berkaitan dengan faktor teknologi. Meskipun jumlah rata-rata karyawan dalam satu unit tugas banyak, tetapi jika pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mekanistik dengan bantuan teknologi tertentu, maka dengan mudah memantau mutu hasil kerja. Dipihak lain, meski jumlah karyawan sedikit, tetapi pekerjaan dilakukan secara manual, maka agak sulit untuk mengontrol mutu kerja. Disamping itu, faktor keterampilan karyawan juga turut menentukan kendali mutu dalam suatu organisasi. Secara teoretis nisbah yang dianggap layak antara atasan dan bawahan yang memungkinkan rentang kendali mempunyai pengaruh positif terhadap efektifitas berkisar antara 6:1 dan 15:1. Namun besarnya rentang kendali ini juga tergantung kepada peran relatif aspek teknologi organisasi.

5) Besarnya organisasi dan unit kerja

Bertambah besarnya organisasi dan unit kerja, dalam berbagai kasus penelitian ternyata sangat berpengaruh dan mempunyai hubungan positif dengan efektivitas organisasi. Besarnya organisasi itu terlihat kepada rasio administratif, yaitu perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah keseluruhan anggota organisasi. Besarnya organisasi juga mencerminkan tingkat kompleksitas penanganan tugas-tugas, hirarkhi, dan rentang kendali. Kompleksibilitas itu dapat berpola vertikal, yaitu banyaknya tingkatan dalam organisasi, dan kompleksitas horisontal, yaitu banyaknya bagian/seksi, bidang bidang tugas dalam organisasi. Kontribusi besarnya organisasi terhadap efektivitas lebih dicerminkan oleh kemampuan manajemen untuk

mengarahkan dan mengendalikan kompleksitas kerja baik horisontal (melalui bidang-bidang), maupun vertikal (melalui tingkatan penanganan/penyelesaian masalah).

c) Faktor Strategi

Strategi merupakan salah satu "perangkat keras" dalam organisasi yang dalam literatur barat dianggap sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai keunggulannya. Strategi organisasi tidak lain adalah seperangkat rencana organisasi yang telah dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan berbagai analisis dan perkiraan, untuk mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan startegi oleh suatu organisasi tergantung kepada sasaran yang ingin dicapai. Apabila sasaran bersifat jangka panjang, maka strategi itu juga bersifat jangka panjang (Burhan, 2002:22). Strategi itu pada dasarnya merupakan rumusan kebijakan program organisasi untuk mencapai sasaran secara lebih efektif. Rencana kegiatan atau program dalam suatu organisasi dianggap strategis apabila rencana itu dapat memperkecil enerji masukan (seperti biaya, Sumber Daya Manusia atau SDM, dan peralatan yang dibutuhkan), tetapi sekaligus memperbesar keluaran, serta lebih produktif dalam mencapai sasaran. Bowman (1990:15) berpendapat bahwa esensi dari manajemen strategik terletak kepada bagaimana suatu organisasi merumuskan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk mewujudkan cita-cita organisasi yang secara programatis dirumuskan dalam tujuan baik yang bersifat resmi (official goals) maupun operatif (operative goals).

d) Faktor Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan tidak lain adalah perilaku yang ditampilkan pemimpin dalam berhubungan dengan anggota-anggotanya dalam konteks pelaksanaan tugas/kerja guna mencapai sasaran organisasi. Robert Blake dan Jane Mouton (1964:9) mengemukakan dua orientasi dalam gaya kepemimpinan seorang manajer, yaitu orientasi pada tugas/produksi (task/production orientation), dan orienatsi pada orang (people orientation).

1) Orentasi pada tugas maupun hubungan orang rendah. Pemimpin cenderung kurang memperhatikan hasil kerja/tugas maupun terhadap anggota.
2) Orientasi pada tugas rendah dan orientasi pada orang tinggi. Gaya ini mencerminkan perilaku pemimpin yang hanya memikirkan anak buahnya, tetapi kurang

memperhatikan hasil yang dicapai. Gaya seperti ini sering disebut sebagai "Kepemimpinan klub kampung" (The country club management).

3) Orientasi pada tugas dan pada orang yang sama-sama sangat tinggi. Gaya ini mencerminkan perilaku pemimpin yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap hasil yang ingin dicapai, sekaligus mengusahakan hubungan dengan karyawan secara efektif. Gaya ini disebut sebagai kepemimpinan tim yang nyata (The real team management).
4) Orientasi pada tugas tinggi, sementara perhatian kepada anggota (karyawan) kurang. Gaya ini mencerminkan "kepemimpinan tugas otokratis" (The autocratic task management).
5) Orientasi pada tugas cukup, demikian juga orienatsi pada orang (karyawan). Pada gaya ini kepemimpinan cenderung mempertahankan situasi "sedang-sedang" (mediocre). Perhatian kepada tugas seadanya demikian juga perhatian kepada karyawan.

Gaya kepemimpinan yang dianggap berhasil dan memberikan sumbangan yang efektif terhadap organisasi adalah kepemimpinan situasional. Model gaya kepemimpinan ini diintrodusir oleh Hersey dan Blanchard (2000:20). Menurut Hersey dan Blanchard (2000:20, terdapat tiga dimensi dari kepemimpinan situasional yang efektif, yaitu :

1) Kadar bimbingan dan arahan (perilaku tugas) yang diberikan pemimpin.
2) Kadar dukungan sosio-emosional (perilaku hubungan) yang disediakan pemimpin.
3) Tingkat kesiapan (kematangan) yang diperlihatkan pengikut dalam pelaksanaan tugas.

Gaya kepemimpinan situasional berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif sangat tergantung kepada tingkat kematangan pengikut. Dengan demikian, situasi kematangan turut menentukan gaya kepemimpinan bagaimana seharusnya yang cocok untuk dilaksanakan. Berdasarkan tingkatan kematangan pengikut (anggota), dari yang rendah hingga yang tinggi, maka terdapat beberapa tipe gaya kepemimpinan yang sesuai.

e) Faktor Staf (SDM) dan Keterampilan

Konsep pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang lazim disebut sebagai human resource management (HRD), sejak dasawarsa 80-an mulai tampil sebagai kekuatan baru dalam ilmu manajemen modern, baik sektor organisasi publik maupun bisnis. Sumber

Daya Manusia (SDM) tidak lagi dilihat sebagai enerji yang dapat dikelola dan dikendalikan untuk mentransformasikan modal guna meraih keuntungan (profit) organisasi atau perusahaan, melainkan dalam pandangan modern lebih dipahami sebagai sumber kekuatan yang mampu mentransaktualisasikan dirinya dengan tujuan-tujuan organisasi, sehingga mampu menghasilkan mutu layanan dan produk organisasi yang kompetitif. Sebagai faktor kunci yang menentukan efektivitas organisasi, Walker (2000:30) mengemuukakan paling kurang tiga kriteria penting dalam manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi. Pertama, kualifikasi, yaitu terpenuhinya persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan secara kualitatif untuk menjalankan tugas-tugas organisasional secara struktural maupun fungsional. Kualifikasi itu meliputi jenis dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman kerja, kesehatan fisik, dan integritas pribadi. Kedua, proporsi, yaitu terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitatif untuk menjalankan tugas-tugas organisasional. Proporsi itu berkaitan erat dengan luas dan volume pekerjaan yang harus ditangani dengan atau tanpa dukungan teknologi, serta perkiraan peningkatan bidang usaha dikemudian hari. Ketiga, promosi, yaitu upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara struktural maupun fungsional, melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terkait kepada sistem pengembangan karir karyawan. Artinya promosi karyawan dalam tugas-tugas struktural maupun fungsional harus didasarkan kepada pengalaman, pengabdian, tingkat pendidikan maupun jenis-jenis diklat yang diikuti. Walker (2000:27) berpendapat bahwa untuk menilai kontribusi faktor Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap efektivitas organisasi, maka paling sedikit kriteria ukuran harus meliputi ketiga unsur yang dikemukakan di atas, yaitu kualifikasi, proporsi, dan promosi/mutasi peronil dalam tugas-tugas organisasional.

f) Faktor Pemilikan

Nilai Sistem nilai organisasi itu mengacu kepada apa yang diangap oleh orang-orang dalam organisasi sebagai bermakna dalam hidupnya dan seharusnya menjadi tujuan hidup organisasi, kemudian membentuk keyakinan diri untuk bagaimana dirinya dalam organisasi berperilaku mewujudkan tatanilai itu dalam hidupnya.

Oleh karena itu, menurut Armstrong (2006:36), untuk mencapai kultur perusahaan/organisasi yang kuat, maka kondisi yang diperlukan ialah adanya pemilikan bersama tata nilai organisasi (shared values), yaitu nilai-nilai yang diyakini bermakna, yang pada gilirannya sistem nilai yang dimiliki menjadi semacam norma perilaku individual dalam organisasi. Pemilikan bersama tata nilai organisasi yang merupakan superordinate goals itu tergantung kepada (1) komitmen karyawan pada nilai dan tata nilai yang lebih tinggi yang mengatur perilaku organisasi, dan (2) orientasi secara seimbang kepada nilai-nilai sosietal, organisasional, dan personal. Efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana individu (selaku karyawan) menampilkan perilaku peran yang dituntun oleh norma-norma organisasional, seperti dalam66 kegiatan proses produksi dan pelayanan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2012:5), "Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut maka diharapkan dapat menggambarkan secara tepat, sistematis, akurat mengenai fakta dan sifat antar fenomena yang diteliti.

Review dilakukan dengan pendekatan **analisis kualitatif dan kuantitatif** berbasis dokumen (*documentary analysis*), disertai triangulasi data melalui wawancara terbatas dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Analisis ini menekankan *results-based management* dan *evidence-based policymaking* agar temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

3.2. Sumber Data

- Data Primer:
  - Wawancara/FGD dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan Bappeda Kabupaten Gresik
- Data Sekunder:
  - Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025.
  - Dokumen Renstra OPD, RKPD, dan Laporan Kinerja (LKPJ).
  - Statistik resmi (BPS Gresik, BPS Jatim, BPS Nasional).
  - Dokumen kebijakan nasional (RPJMN 2025–2029, SDGs, RKP, dll.).

3. 3. Tahapan Analisis

1. Analisis Konsistensi Visi-Misi
   - *Menguji keterkaitan antara visi & misi kepala daerah dengan tujuan strategis RPJMD.*
   - *Memeriksa sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Gresik dan agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur.*

2. Evaluasi Indikator Kinerja
    - *Menilai apakah indikator sudah memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).*
    - *Membandingkan target RPJMD dengan capaian historis 3–5 tahun sebelumnya.*
3. Analisis Kelayakan Program
    - *Memeriksa kesesuaian antara program, kegiatan, dan output dengan tujuan pembangunan.*
    - *Menilai proporsionalitas alokasi anggaran terhadap prioritas strategis.*
    - *Mengidentifikasi potensi tumpang tindih antar-OPD.*
4. Analisis Keterpaduan Sektoral
    - *Menilai integrasi antar sektor: industri, maritim, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan.*
    - *Menguji apakah pembangunan mendukung prinsip keberlanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan).*
5. Analisis Partisipasi dan Akuntabilitas
    - *Mengukur sejauh mana proses penyusunan RPJMD melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.*
    - *Menilai keterbukaan dokumen, mekanisme transparansi, dan peluang revisi.*
6. Identifikasi Risiko Implementasi
    - *Menggunakan analisis SWOT dan/atau AHP untuk menilai faktor penghambat (internal-eksternal).*
    - *Menyusun rekomendasi mitigasi risiko dan strategi adaptasi kebijakan.*

4. Teknik Analisis

- *Content Analysis: untuk membedah isi RPJMD Kabupaten Gresik terkait Organisasi Pemerintah Daerah yang berada dalam Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA.*
- *Gap Analysis: membandingkan target RPJMD dengan realisasi historis dan kapasitas sumber daya.*
- *Logical Framework Analysis (LFA): memetakan input → output → outcome → impact.*
- *Matriks Penilaian: mengukur tingkat konsistensi, relevansi, efektivitas, dan efisiensi.*

3.4. Jadwal

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan.....Kabupaten Gresik tahun 2025															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penyusunan dokumen																
2	Desain instrumen survei dan desain sampling																
3	Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan																
4	**Presentasi Laporan Pendahuluan**																
5	Survei pendahuluan dan perijinan																
6	Survei lapangan																
7	*In Depth Interview (IDI)*																
8	Validasi data (quality control)																
9	Pengolahan dan Analisa Data																
10	Penyusunan Draft Laporan Antara/ Fakta Analisa																
11	**Presentasi Laporan Antara/ Fakta Analisa**																
12	Perbaikan Laporan Antara																
13	Penyusunan Draft Laporan Akhir																
14	**Presentasi Laporan Akhir**																
15	Perbaikan laporan akhir																
16	Pengumpulan laporan akhir																
17	**Sosialisasi**																

BAB IV
Evaluasi Implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026
Rumpun Perekonomian dan SDA

4.1. Gambaran Umum dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021–2026 bertujuan untuk menilai sejauh mana dokumen perencanaan lima tahunan tersebut telah diimplementasikan oleh perangkat daerah, serta mengidentifikasi konsistensi, efektivitas, dan gap strategis antar-dokumen perencanaan. Evaluasi menelaah keterpaduan hierarki perencanaan—mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, hingga program dan kegiatan lintas OPD.

Dokumen RPJMD Gresik memuat visi besar daerah: "*Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah*." Visi ini menjadi fondasi bagi lima misi pembangunan yang mencakup tata kelola, infrastruktur, ekonomi inklusif, pembangunan manusia, dan kesejahteraan sosial. Evaluasi ini memastikan bahwa struktur dokumen tersusun secara metodologis benar, selaras dengan Permendagri 86/2017, dan dijalankan secara efektif oleh perangkat daerah.

4.2. Konsistensi Dokumen RPJMD: Visi–Misi–Tujuan–Sasaran–Indikator

4.2.1 Konsistensi Visi dan Misi

Analisis menunjukkan bahwa seluruh misi dalam RPJMD selaras dan mencerminkan sepenuhnya elemen-elemen visi daerah. Setiap elemen visi mandiri, sejahtera, berdaya saing, berkemajuan, dan akhlakul karimah diturunkan secara logis dalam lima misi pembangunan. Tidak ditemukan misi yang menyimpang atau tidak relevan.

4.2.2 Konsistensi Misi dengan Tujuan Strategis

Setiap misi diterjemahkan secara presisi ke dalam tujuan strategis. Contohnya:

- Misi I menghasilkan tujuan tata kelola modern dan inovatif.
- Misi III menghasilkan tujuan ekonomi inklusif antar-sektor dan wilayah.
- Misi V menghasilkan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan ker

Tidak ditemukan ketidaksesuaian atau pemaknaan tujuan yang tidak logis.

4.2.3 Konsistensi Tujuan dengan Sasaran

Sembilan sasaran RPJMD (S1–S9) secara sistematis merupakan penajaman tujuan misi. Sebagai contoh:

- Misi 2 → Sasaran infrastruktur, lingkungan, dan akses wilayah,
- Misi5→ Sasaran penyerapan tenaga kerja dan perlindungan sosial. Seluruhnya dinilai *sangat konsisten*.

4.2.4 Konsistensi Sasaran dengan Indikator

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan RPJMD dapat mengukur secara akurat sasaran-sasaran pembangunan. Indikator pada Misi 1–5 termasuk SPBE, IKM, IKLH, TPT, kemiskinan, dan indikator pertumbuhan ekonomi berada dalam kategori logis, relevan, dan terukur.

Kesimpulan Konsistensi

Struktur RPJMD Kabupaten Gresik ***sangat kuat secara metodologis***:

- *Tidak ditemukan inkonsistensi struktural,*
- *Hierarki perencanaan berjalan utuh,*
- *Dokumen sesuai standar nasional dan Permendagri 86/2017.*

4.3. Kualitas Indikator RPJMD: Hasil SMART Review

Evaluasi SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) menunjukkan:

4.3.1 Kekuatan Indikator

Banyak indikator berada pada kategori **Excellent**, antara lain:

- *Nilai SAKIP, SPBE, IKM,*
- *Persentase jalan mantap, akses air bersih, IKLH,*
- *Pertumbuhan PDRB, investasi PMA/PMDN, TPT,*
- *APM SD/SMP, AHH, AKI/AKB.*

4.3.2 Indikator Kategori Good

Indikator seperti indeks kesetaraan wilayah, rasio infrastruktur, indeks karakter sosial, dan beberapa indikator sosial-budaya masuk kategori ***Good***—terukur tetapi masih memerlukan penguatan metodologis.

4.3.3 Temuan Kelemahan Indikator

Beberapa indikator belum memiliki definisi operasional atau satuan baku, khususnya:

- *Inovasi daerah,*
- *Indeks kesetaraan wilayah,*
- *Indikator sosial-keagamaan,*
- *Indikator PMKS.*

Kesimpulan SMART Review

Mayoritas indikator RPJMD **kuat dan valid**, tetapi terdapat sejumlah indikator normatif atau tidak terspesifikasi yang dapat menurunkan akurasi pengukuran kinerja.

4.4. Temuan GAP Utama dalam Implementasi RPJMD

Evaluasi menemukan adanya gap substantif yang dapat mempengaruhi capaian pembangunan.

4.4.1 GAP Misi I – Tata Kelola

- *Definisi inovasi daerah tidak baku,*
- *Layanan digital belum dikelompokkan secara jelas.*

  Dampak: *Variasi kinerja antar-OPD sulit diukur.*

4.4.2 GAP Misi II – Infrastruktur & Lingkungan

- *Indeks kesetaraan wilayah belum memiliki formula,*
- *Data dasar infrastruktur wilayah belum lengkap.*

  Dampak: *Analisis ketimpangan geografis tidak akurat.*

4.4.3 GAP Misi III – Ekonomi & Kemandirian

- *Indikator subsektor non-pertanian minim, padahal struktur ekonomi Gresik dominan industri & UMKM.*

  Dampak: *Sasaran ekonomi inklusif tidak terukur dengan komprehensif.*

4.4.4 GAP Misi IV – SDM Unggul

- *Indikator karakter dan budaya bersifat normatif, tidak kuantitatif.*

  Dampak: *Outcome sosial sulit dinilai objektif.*

4.4.5 GAP Misi V – Kesejahteraan Sosial & Ketenagakerjaan

- *Data PMKS tidak mutakhir,*
- *Jaminan sosial tidak terintegrasi dengan DTKS.*

  Dampak: *Validitas perencanaan dan targeting menjadi rendah.*

4.5. Evaluasi Efektivitas Program RPJMD

Analisis efektivitas dilakukan terhadap hubungan program dengan kebijakan, output–outcome, serta dampak strategis.

4.5.1 Efektivitas Tinggi

Program-program pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, dan beberapa indikator tata kelola menunjukkan efektivitas tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator pelayanan publik dan indikator SDM yang berada pada kategori unggul.

4.5.2 Efektivitas Sedang

Mayoritas program pembangunan ekonomi, UMKM, sosial, dan infrastruktur dasar menunjukkan efektivitas **Sedang**, terutama karena:

- Outcome belum konsisten meningkat,
- Gap antar-wilayah masih signifikan,
- Sistem data belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan.

4.5.3 Efektivitas Rendah

Program infrastruktur dan lingkungan hidup memiliki efektivitas rendah–sedang. Isu yang paling menonjol:

- Jalan rusak dan drainase belum tertangani optimal,
- Akses air bersih masih rendah,
- Pengelolaan sampah belum seimbang dengan timbulan sampah.

4.6. Temuan Strategis Lintas Sektor

Evaluasi mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi keseluruhan capaian RPJMD:

1. Integrasi Data Antar-OPD Rendah

   Sistem informasi masih terfragmentasi (<50% terintegrasi).

2. Ketimpangan Infrastruktur Dasar

   Kinerja jalan, air bersih, dan drainase belum merata antar wilayah.

3. UMKM dan Ekonomi Rakyat Belum Tersangga Kuat

   Dominasi industri besar belum diimbangi struktur ekonomi lokal yang tangguh.

4. Distribusi SDM Layanan Tidak Merata

   Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum tersebar proporsional.

5. Kemiskinan dan TPT Masih Tinggi

   Program pelatihan–penempatan tenaga kerja belum terhubung secara sistematis.

6. Pengelolaan Lingkungan Masih Lemah

   TPA belum tersedia dan pengelolaan sampah belum memadai.

4.7. Rekomendasi Kebijakan Utama

4.7.1 Penguatan Sistem Perencanaan & Data

- *Membangun Integrated Data Center lintas perangkat daerah,*
- *Standarisasi metode pengumpulan data kemiskinan, PMKS, dan layanan publik.*

4.7.2 Reformulasi dan Penajaman Indikator

- *Penyusunan indikator kuantitatif untuk inovasi, karakter sosial, ekraf, UMKM naik kelas.*

4.7.3 Percepatan Infrastruktur Dasar

- *Penuntasan jalan rusak, peningkatan akses air bersih, drainase berbasis kawasan.*

4.7.4 Penguatan UMKM–Industri

- *Linkage UMKM ke rantai pasok industri JIIPE dan KIG,*
- *Pembiayaan murah dan inkubasi usaha.*

4.7.5 Penguatan SDM dan Layanan Sosial

- *Distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan berbasis kebutuhan wilayah.*
- *Integrasi data jaminan sosial dan DTKS.*

4.8. Kesimpulan Utama Evaluasi

RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 merupakan dokumen yang kuat secara metodologis dan konsisten dalam struktur perencanaannya. Mayoritas indikator berkualitas tinggi berdasarkan uji SMART. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek infrastruktur dasar, integrasi data, pemerataan ekonomi, layanan publik, dan ketepatan sasaran program sosial–ketenagakerjaan.

Evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD ke depan memerlukan tiga prioritas pembenahan:

1. ***Penguatan tata kelola dan data terintegrasi*** *sebagai fondasi pengambilan keputusan;*
2. ***Percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi inklusif*** *untuk mengurangi kesenjangan;*
3. ***Pembangunan SDM dan perlindungan sosial yang adaptif*** *terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.*

Dokumen ini menjadi dasar strategis untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya serta penajaman kebijakan lintas sektor dalam mendorong Gresik menjadi daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkemajuan.

BAB V

Analisis Kesesuaian RENSTRA Dinas Pertanian 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026**

5.1. Pendahuluan dan Tujuan Analisis

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Gresik. Walaupun kontribusinya terhadap PDRB relatif lebih kecil dibanding sektor industri, sektor ini memegang peran strategis untuk **ketahanan pangan**, **pengentasan kemiskinan**, **penyerapan tenaga kerja**, serta **stabilitas sosial-ekologis wilayah pedesaan**.

Dokumen RENSTRA Dinas Pertanian 2021–2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam pendahuluannya. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai:

1. **Kesesuaian dan konsistensi hierarki perencanaan** (tujuan → sasaran → indikator → program).
2. **Efektivitas kontribusi sektor pertanian** dalam mencapai sasaran makro daerah.
3. **Identifikasi GAP** antara Renstra dan kebutuhan strategis RPJMD.
4. **Rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk revisi Renstra dan penyusunan RPJMD berikutnya**.

5.2. Tingkat Kesesuaian Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD

Analisis menunjukkan bahwa secara umum **RENSTRA Dinas Pertanian memiliki tingkat keselarasan yang sangat tinggi** terhadap elemen-elemen RPJMD, mulai dari misi, tujuan, sasaran, indikator, hingga arah kebijakan sektoral.

5.2.1 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

RPJMD menekankan empat pilar pembangunan pertanian:

- *Pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian,*
- *Ketahanan pangan,*
- *Pengurangan kemiskinan pedesaan,*
- *Peningkatan nilai tambah dan produktivitas.*

Renstra menurunkan tujuan dan sasarannya secara langsung untuk memastikan keselarasan tersebut. Dokumen menyatakan bahwa Renstra disusun berpedoman pada visi/misi Bupati dan arah pembangunan RPJMD

Sasaran Renstra meliputi:

- peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,
- penguatan kelembagaan petani,
- perlindungan lahan pertanian,
- penguatan ketahanan pangan.

Seluruhnya selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

5.2.2 Kesesuaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja daerah (IKD) RPJMD yang relevan dengan sektor pertanian meliputi:

1. *Pertumbuhan PDRB sektor pertanian,*
2. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),*
3. *Kemiskinan,*
4. *Pengangguran,*
5. *Ketahanan pangan daerah*.

Renstra Dinas Pertanian menurunkan indikator berbasis output dan outcome sektoral seperti:

- produktivitas komoditas,
- produksi tanaman pangan dan hortikultura,
- cadangan pangan daerah,
- kelembagaan petani.

Tabel kesesuaian pada halaman 60–63 menunjukkan bahwa indikator Renstra berfungsi sebagai leading indicators bagi indikator makro RPJMD, terutama indikator pertumbuhan PDRB pertanian dan ketahanan pangan. Kesesuaian indikator dinilai kuat, walaupun ada kelemahan (GAP) yang dibahas di bagian berikutnya.

5.2.3 Kesesuaian Program

Program Renstra mencakup seluruh urusan pertanian yang menjadi mandat RPJMD, di antaranya:

- *program peningkatan produksi,*

- *sarpras pertanian dan mekanisasi,*
- *ketahanan pangan dan cadangan pangan,*
- *penyuluhan,*
- *kelembagaan petani,*
- *perlindungan lahan dan konservasi.*

Tabel "Kesesuaian Program" pada halaman 64 menunjukkan bahwa seluruh program Renstra memiliki padanan langsung dalam RPJMD, dengan status Sangat Sesuai atau Sesuai untuk semua kelompok program

5.2.4 Kesesuaian Spasial

Renstra telah menyelaraskan lokasi PPL, kawasan pertanian sentra, agropolitan/minapolitan, dan struktur perdesaan berdasarkan RTRW dan RPJMD. Konsistensi spasial dinilai baik, meskipun terdapat celah terkait kawasan unggulan tertentu yang belum dimunculkan.

5.3. Temuan GAP Strategis antara Renstra dan RPJMD

Walaupun secara umum Renstra selaras, ditemukan sejumlah GAP yang signifikan dan memengaruhi efektivitas kontribusi sektor pertanian terhadap sasaran RPJMD.

5.3.1 GAP Indikator

Beberapa GAP penting pada indikator adalah:

1. Tidak adanya indikator turunan PDRB sektor pertanian

   RPJMD mewajibkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebagai indikator daerah, tetapi Renstra belum menurunkan indikator yang mengukur nilai ekonomi (contoh: nilai tambah, ADHB, ADHK).

   Risiko: Kontribusi OPD tidak dapat diukur secara akurat.

2. Tidak adanya indikator sektor pertanian yang terkait kemiskinan dan pengangguran pedesaan

   Padahal RPJMD menekankan kedua indikator tersebut sebagai indikator makro. Risiko: Dampak nyata sektor pertanian terhadap kesejahteraan tidak terevaluasi.

3. Tidak adanya indikator lingkungan (IKLH) yang terkuantisasi

Renstra menyebut konservasi lahan dan pupuk berimbang, tetapi tanpa indikator kuantitatif.

Risiko: Kontribusi terhadap IKLH tidak dapat ditelusur.

5.3.2 GAP Sasaran

Renstra belum mengakomodasi sasaran RPJMD yang berkaitan dengan:

- Ketahanan pangan makro (inflasi pangan, cadangan pangan pemerintah daerah),
- Disparitas wilayah (desa rawan pangan, kawasan tertinggal),
- Kesejahteraan petani (pendapatan rumah tangga petani).

GAP ini dapat menurunkan efektivitas Renstra dalam mendukung misi pemerataan dan kesejahteraan.

5.3.3 GAP Program

Beberapa GAP program yang muncul dari evaluasi:

1. Program kawasan unggulan belum tampil utuh

   RPJMD memuat program agropolitan/minapolitan, tetapi Renstra tidak menampilkan program spesifik berbasis kawasan.
2. Nilai tambah pertanian (hilirisasi) kurang kuat

   Renstra fokus pada produksi primer, padahal RPJMD menekankan nilai tambah dan agroindustri.
3. Belum ada program eksplisit untuk mengurangi disparitas antar wilayah

   Termasuk akses pasar, infrastruktur usaha tani, dan integrasi sentra.

5.3.4 GAP Kebijakan & Tata Kelola

Beberapa GAP tata kelola yang penting:

1. Tidak ada pemetaan kontribusi Renstra terhadap IKU Kabupaten RPJMD.
2. SWOT Renstra belum terhubung dengan SWOT RPJMD.
3. Tidak ada integrasi lintas OPD (pertanian–perdagangan–UMKM–perindustrian).
4. Sistem data pertanian belum terhubung ke *Satu Data Gresik*.

5.4. Efektivitas Indikator Renstra terhadap Sasaran RPJMD

Tabel analisis efektivitas (hal. 74) menunjukkan variasi efektivitas indikator Renstra:

- Efektivitas Tinggi (SMART skor 12–15):
    - Produktivitas tanaman pangan (15),
    - Cadangan pangan daerah (14).

- Efektivitas Sedang (SMART skor 8–11):
    - Luas tanam/panen (11),
    - Kelompok tani binaan (10),
    - Pelatihan pertanian (8),
    - Rehabilitasi irigasi (8).
- Efektivitas Rendah (SMART skor 7 atau kurang):
    - Demplot/inovasi (7).

Kesimpulan efektivitas:

- *Indikator yang langsung terkait produktivitas dan pangan **sangat efektif** mendukung RPJMD.*
- *Indikator kelembagaan, SDM, dan inovasi masih **lemah**, sehingga perlu reformulasi.*

5.5. Rekomendasi Kebijakan Utama

Berdasarkan analisis GAP, rekomendasi strategis mencakup:

5.5.1 Penguatan Indikator

Tambahkan indikator baru yang dapat menghubungkan Renstra dengan indikator RPJMD, misalnya:

- *pertumbuhan nilai produksi pertanian (ADHB),*
- *nilai tambah (NTP/NTUP),*
- *pendapatan petani,*
- *stabilisasi harga pangan,*
- *indikator pemerataan wilayah produksi.*

Rekomendasi ini tercantum pada tabel halaman 71–73.

5.5.2 Penguatan Program

Tambahkan atau revisi program berikut:

- Pengembangan agroindustri dan hilirisasi pertanian,
- Program kawasan unggulan berbasis kecamatan,
- Program stabilisasi harga dan cadangan pangan daerah,
- Program petani sejahtera (KUR + asuransi + pengurangan ongkos produksi),
- Program kemitraan petani–industri–UMKM.

5.5.3 Penguatan Sasaran

Perlu sasaran tambahan berupa:

- meningkatnya nilai ekonomi sektor pertanian (kontribusi PDRB),
- menurunnya ketimpangan wilayah produksi,
- meningkatnya pendapatan petani.

5.5.4 Penguatan Tata Kelola

- Integrasi lintas-OPD melalui *Task Force* ekonomi pertanian,
- Penguatan *Satu Data Pertanian*,
- Perencanaan berbasis kawasan prioritas,
- Evaluasi berbasis dampak ekonomi (economic impact assessment).

5.6. Kesimpulan Utama

Analisis menunjukkan bahwa **Renstra Dinas Pertanian 2021–2026 sangat selaras dengan RPJMD**, baik dari sisi kesesuaian tujuan, sasaran, indikator, program, maupun aspek spasial. Namun, sejumlah GAP yang cukup signifikan—terutama terkait indikator nilai ekonomi, ketahanan pangan makro, nilai tambah pertanian, pemerataan wilayah, dan integrasi data—menjadi tantangan utama yang harus segera diperbaiki.

Melalui penguatan indikator, pembaruan program, penajaman sasaran, dan reformasi tata kelola, sektor pertanian Kabupaten Gresik berpotensi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam:

- *pertumbuhan ekonomi,*
- *ketahanan pangan yang stabil,*
- *penurunan kemiskinan pedesaan,*
- *peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani, serta*
- *pemerataan pembangunan berbasis kawasan.*

Dengan demikian, perbaikan Renstra tidak hanya diperlukan untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Gresik.

BAB VI
Analisis Keterkaitan RENSTRA Diskoperindag dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

6.1. Latar Belakang dan Konteks Strategis

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) merupakan salah satu perangkat daerah inti dalam penggerak ekonomi Kabupaten Gresik. Perannya mencakup penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan kualitas sistem perdagangan, perlindungan konsumen, serta penyediaan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sarana distribusi.

Dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026, sektor UMKM–IKM–perdagangan memiliki posisi strategis pada **Misi III (Kemandirian Ekonomi Seimbang Antar Sektor & Wilayah)**, serta beririsan dengan **Misi II (Infrastruktur Berdaya Saing)** dan **Misi V (Kesejahteraan Sosial dan Lapangan Kerja)**.

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai:

1. *Konsistensi dan tingkat keselarasan Renstra Diskoperindag dengan RPJMD,*
2. *Tingkat efektivitas indikator, sasaran, dan program dalam mendukung arahan pembangunan daerah,*
3. *Identifikasi GAP substansi, indikator, program, maupun implementasi,*
4. *Penyusunan rekomendasi strategis perbaikan Renstra untuk tahun berjalan dan penyusunan RPJMD berikutnya.*

6.2. Keselarasan Visi–Misi Renstra dengan RPJMD

6.2.1 Keterkaitan pada Level Visi dan Misi

Renstra Diskoperindag terbukti berperan langsung dalam mewujudkan elemen visi RPJMD, yaitu **mandiri**, **sejahtera**, dan **berdaya saing**, melalui pembangunan sektor koperasi, UMKM, IKM, dan perdagangan. RPJMD menempatkan Diskoperindag secara strategis pada tiga misi:

- **Misi III** → penguatan UMKM, IKM, pemerataan sentra industri, dan peningkatan perdagangan;
- **Misi II** → penyediaan infrastruktur ekonomi, pasar, dan sarana metrologi;
- **Misi V** → penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan sektor UMKM & IKM.

Renstra secara konsisten menurunkan misi-misi ini ke dalam arah kebijakan dan program sektor ekonomi riil.

6.3. Kesesuaian Sasaran dan Tujuan Renstra terhadap RPJMD

Seluruh sasaran Diskoperindag memiliki irisan langsung dengan sasaran RPJMD, terutama yang terkait:

- *Penurunan ketimpangan ekonomi wilayah,*
- *Pertumbuhan UMKM, IKM, dan perdagangan,*
- *Penguatan lapangan kerja melalui sektor ekonomi lokal,*
- *Penguatan struktur perekonomian berbasis sektor produktif.*

Renstra memuat empat sasaran utama, yaitu peningkatan pengelolaan koperasi, peningkatan usaha mikro, peningkatan sistem distribusi perdagangan & perlindungan konsumen, dan peningkatan IKM.

Tabel halaman 75–76 menunjukkan kesesuaian langsung antara sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Diskoperindag, dengan hasil evaluasi **selaras 100%** tanpa tumpang tindih atau kekosongan sasaran.

6.4. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD menekankan empat transformasi ekonomi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah,
2. Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi,
3. Penguatan keterhubungan antar sektor (industrial linkage),
4. Penciptaan lapangan kerja melalui sektor UMKM dan IKM.

Renstra Diskoperindag dalam Bab V menetapkan kebijakan yang **identik** dengan arah kebijakan RPJMD, yakni pemberdayaan koperasi, peningkatan kualitas UMKM, pembinaan IKM, dan fasilitasi sarana distribusi & perdagangan.

Kesimpulan: *Renstra mengikuti arah kebijakan RPJMD secara penuh dan konsisten.*

6.5. Kesesuaian Program: 100% Turunan RPJMD

Program prioritas dalam RPJMD—pengembangan UMKM–Koperasi, pengembangan IKM, penguatan sistem perdagangan dan perlindungan konsumen, modernisasi pasar—seluruhnya diturunkan secara lengkap dalam Renstra Diskoperindag.

Tabel Program Prioritas dan Matrik Program/Kegiatan Renstra menunjukkan keselarasan penuh.

Tingkat kesesuaian program: 100% (Sangat Tinggi).

6.6. Kesesuaian Indikator Kinerja

Seluruh indikator Renstra Diskoperindag merupakan indikator sektoral RPJMD:

- *Pertumbuhan koperasi aktif (%)*
- *Pertumbuhan usaha mikro (%)*
- *Pertumbuhan neraca perdagangan (%)*
- *Pertumbuhan IKM (%)*

*Evaluasi SMART (halaman 78) menunjukkan bahwa indikator tersebut **specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound**, sehingga Diskoperindag meraih **skor keterkaitan 100%**.*

6.7. Hasil SMART Review dan Efektivitas Sasaran

Analisis SMART pada halaman 79 menunjukkan bahwa:

- *Semua sasaran Renstra Diskoperindag mendapatkan rating Strong (3) untuk seluruh dimensi SMART.*
- *Tidak ada sasaran yang tidak relevan atau tumpang tindih.*

Pada level indikator dan program, seluruh komponen kembali mendapatkan skor *Strong (3)*, sehingga total skor keterkaitan Renstra–RPJMD mencapai 100%, salah satu yang tertinggi dari seluruh PD di rumpun ekonomi.

6.8. Temuan GAP Utama dalam Renstra Diskoperindag

Meskipun tingkat keselarasan sangat tinggi, terdapat sejumlah GAP strategis yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi.

6.8.1 GAP Substansi

1. Integrasi antar sektor belum muncul jelas

   → Belum terhubung dengan sektor pertanian (agroindustri), pariwisata, perikanan, logistik, dan industri besar.

2. Fokus eco-industry belum eksplisit

   → Tidak ada standar industri hijau, produksi bersih, pengelolaan limbah IKM.

3. Transformasi digital belum kuat

   → Belum ada program UMKM Go Digital, digitalisasi pasar, integrasi sistem informasi.

6.8.2 GAP Indikator

4. Tidak ada indikator perlindungan konsumen

   → *Belum mengukur pengaduan konsumen, kepuasan pasar, atau kualitas layanan.*

   Indikator UMKM naik kelas tidak ada

   → *Hanya mengukur pertumbuhan jumlah, bukan kualitas (digitalisasi, ekspor, naik kelas).*

5. Indikator daya saing industri belum kuat

   → *Tidak mencerminkan SNI, sertifikasi halal, atau keterhubungan rantai pasok.*

6.8.3 GAP Program

7. *Belum ada program ekspor UMKM/IKM*
8. *Modernisasi pasar belum mencerminkan smart market*
9. *Integrasi data UMKM–IKM–Koperasi belum muncul*

6.8.4 GAP Implementasi

10. SDM teknis terbatas (SDM dominan UPT Pasar; analis industri & UMKM minim)
11. Sarpras pembinaan UMKM–IKM sangat terbatas
12. Belum ada pusat data ekonomi & dashboard monitoring

Semua GAP ini terdokumentasi dalam tabel analisis GAP halaman 86–92.

6.9. Rekomendasi Strategis Perbaikan Renstra

Rekomendasi disusun berdasarkan prioritas tinggi, menengah, dan rendah:

HIGH PRIORITY – Wajib masuk revisi Renstra

1. *Integrasi antar sektor (UMKM–IKM–Industri besar–Agro–Pariwisata)*
2. *Transformasi digital UMKM/IKM dan digitalisasi pasar (smart market)*
3. *Indikator perlindungan konsumen & kualitas layanan pasar*
4. *Indikator UMKM naik kelas & UMKM Go Digital*
5. *Integrasi data UMKM–IKM–Koperasi (Satu Data Ekonomi)*
6. *Modernisasi pasar berbasis teknologi*

MEDIUM PRIORITY

- *Program eco-industry, green IKM*
- *Program ekspor UMKM/IKM*
- *Modernisasi metrologi berbasis teknologi*
- *Penguatan kelembagaan bidang industri*

LOW PRIORITY

- *Inkubator bisnis UMKM*
- *Pengembangan sentra industri baru*
- *Reorganisasi internal PD*

6.10. Kesimpulan Utama

Analisis menunjukkan bahwa **Renstra Diskoperindag adalah salah satu Renstra paling selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026**, dengan keselarasan 100% pada:

- Visi–Misi
- Sasaran–Tujuan
- Indikator Kinerja
- Program dan Kegiatan
- Struktur SMART indikator

Namun, efektivitas implementasi di lapangan bergantung pada kemampuan Diskoperindag menangani GAP berikut:

- *Transformasi digital,*
- *Integrasi sektor ekonomi,*
- *Penguatan indikator strategis,*
- *Modernisasi pasar dan metrologi,*
- *Penguatan SDM dan sarpras,*
- *Integrasi data ekonomi daerah.*

Dengan menutup GAP tersebut, Diskoperindag dapat berperan sebagai **mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah**, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD.

BAB VII

Analisis Keterkaitan RENSTRA BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

7.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis BPPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan perangkat daerah kunci yang mengelola **pendapatan daerah, penganggaran, kas dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset**. Kinerja BPPKAD sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, hingga kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membiayai pembangunan.

Dokumen Renstra BPPKAD 2021–2026 secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh permasalahan pelayanan, tujuan, sasaran dan program **diklasifikasikan dan disusun dengan merujuk pada visi, misi, dan program Bupati–Wakil Bupati dalam RPJMD 2021–2026**. Artinya, Renstra memang dirancang sebagai turunan langsung RPJMD dan wajib diuji keselarasan serta efektivitasnya.

Evaluasi ini dilakukan untuk:

1. *Mengukur tingkat **keterkaitan (linkage)** Renstra BPPKAD dengan RPJMD pada level visi–misi, sasaran, indikator, program, dan isu strategis.*
2. *Menilai **kualitas indikator, sasaran, dan program** dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).*
3. *Mengidentifikasi **GAP** antara desain Renstra dan kebutuhan strategis RPJMD, baik pada aspek substansi, indikator, maupun implementasi.*
4. *Menyusun **rekomendasi perbaikan** yang dapat digunakan untuk revisi Renstra serta penguatan pelaksanaan RPJMD 2021–2026 dan RPJMD berikutnya.*

7.2. Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan RPJMD

7.2.1. Level Visi–Misi

Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 adalah:

“Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.”

BPPKAD berkontribusi terutama pada aspek **mandiri** (kemandirian fiskal), **sejahtera** (kapasitas pembiayaan pelayanan publik), dan **berdaya saing** (efektivitas pengelolaan keuangan & aset). Renstra BPPKAD mengaitkan diri dengan visi–misi tersebut lewat:

- *Matriks faktor pendorong–penghambat yang secara eksplisit disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati–Wakil Bupati dalam RPJMD*
- *Fokus kuat pada **tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**, yang merupakan bagian inti dari Misi 1 RPJMD (good governance, open & smart government).*

Permasalahan strategis yang dicantumkan misalnya **keterlambatan penyampaian KUA–PPAS** dan **kendala pengelolaan APBD akibat aplikasi SIPD** langsung dikaitkan dengan mandat peningkatan akuntabilitas dan ketepatan pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan:

*Keterkaitan Renstra–RPJMD pada level visi–misi dinilai **sangat kuat**, karena Renstra secara eksplisit mendeklarasikan dirinya sebagai instrumen untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD.*

7.2.2. Level Indikator Kinerja RPJMD

RPJMD menetapkan sejumlah indikator yang menjadi **tanggung jawab langsung BPPKAD**, yaitu:

1. **Indeks Reformasi Birokrasi / Indeks Inovasi Daerah**
2. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD**
3. **Efektivitas Pendapatan Daerah** (target 100% per tahun)
4. **Rasio Kemandirian Fiskal** (target naik dari 65% menjadi 68%)
5. **Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penganggaran**

Renstra BPPKAD menjadikan seluruh indikator tersebut sebagai **indikator utama kinerja OPD**. Dengan demikian, **indikator Renstra sepenuhnya diturunkan dari indikator RPJMD**, tanpa menciptakan indikator baru yang lepas dari kerangka RPJMD.

7.2.3. Level Strategi dan Arah Kebijakan

RPJMD mendorong strategi:

- *Penguatan tata kelola pemerintahan,*
- *Transformasi digital administrasi dan keuangan publik,*
- *Peningkatan kualitas pelayanan keuangan daerah,*
- *Penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD.*

Renstra BPPKAD menurunkan strategi yang selaras, antara lain:

- *Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi pendapatan daerah,*
- *Penganggaran berbasis kinerja dan tepat waktu,*
- *Penguatan manajemen aset daerah,*
- *Penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah di bidang keuangan & aset*

7.2.4. Level Program dan Kegiatan

Renstra BPPKAD secara jelas menyatakan bahwa **rencana program, kegiatan, dan pagu anggaran tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026** .

Program utama:

- *Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*
- *Program Pengelolaan Keuangan Daerah*
- *Program Pengelolaan Aset Daerah*
- *Program Reformasi Birokrasi / Inovasi Daerah*

Seluruh program tersebut berada dalam domain misi RPJMD terkait tata kelola keuangan, optimalisasi PAD, dan penguatan reformasi birokrasi.

Kesimpulan:

*Dari segi program, keterkaitan dinilai **sangat kuat** karena **seluruh program Renstra adalah turunan langsung RPJMD**, bukan program berdiri sendiri.*

7.2.5. Level Isu Strategis

Renstra BPPKAD menyusun isu strategis dengan eksplisit merujuk pada visi–misi RPJMD, antara lain:

- *Rendahnya kesadaran wajib pajak,*
- *Basis data objek pajak belum valid,*
- *Tuntutan publik atas layanan keuangan yang mudah, transparan, dan akuntabel,*
- *Keterlambatan dalam proses penganggaran karena kendala sistem (SIPD),*
- *Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal*

Isu-isu ini langsung bersinggungan dengan agenda **reformasi birokrasi, akuntabilitas fiskal, dan penguatan sistem keuangan daerah** yang menjadi jiwa Misi 1 dan Misi 3 RPJMD.

7.3. Hasil Analisis SMART: Sasaran – Indikator – Program

7.3.1. SMART Sasaran

Renstra BPPKAD menetapkan beberapa sasaran utama, di antaranya:

- Peningkatan Pendapatan Daerah
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan
- Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
- Penguatan Inovasi Daerah
- Ketepatan Waktu Penganggaran

Tabel SMART pada **halaman 99** (Tabel 1) menunjukkan skor yang sangat tinggi:

- Skor SMART sasaran berkisar **22–25 dari maksimum 25**, dengan kategori **Strong** atau **Strong/Medium+**

Ini berarti sasaran:

- ***Specific*** *– jelas fokus pada pendapatan, keuangan, aset, dan inovasi.*
- ***Measurable*** *– dapat diukur dengan indikator yang disepakati.*
- ***Achievable*** *– realistis dalam lingkup kewenangan BPPKAD.*
- ***Relevant*** *– relevan langsung dengan misi tata kelola dan ekonomi RPJMD.*
- ***Time-bound*** *– memiliki horizon 2021–2026 yang jelas.*

7.3.2. SMART Indikator

Tabel SMART indikator pada **halaman 99–102** memperlihatkan bahwa:

- **Persentase ketercapaian sasaran program OPD** – skor 25 (Strong)
- **Opini WTP atas LKPD** – skor 25 (Strong)
- **Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran** – skor 25 (Strong)
- **Efektivitas pendapatan daerah** – skor 24–25 (Strong / Medium–Strong)
- **Rasio kemandirian fiskal** – skor 22 (Medium–Strong)

Semua indikator:

- menggunakan satuan yang jelas (%, kategori opini, on-time),
- punya target tahunan 2021–2026,
- mengukur langsung outcome tata kelola fiskal dan akuntabilitas.

7.3.3. SMART Program

Program utama BPPKAD juga dinilai sangat SMART:

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah → skor 25 (Strong)
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah → skor 25 (Strong)
- Program Pengelolaan Aset Daerah → skor 22–25 (Medium–Strong/Strong)
- Program Inovasi Daerah → skor 24 (Strong)

Ringkasan pada tabel di halaman 100–101 menunjukkan rata-rata skor:

- Sasaran: 95% (kategori Strong)
- Indikator: 96% (Strong)
- Program: 96% (Strong)

Sehingga **total keterkaitan SMART Renstra–RPJMD = 100%**, menjadikan BPPKAD salah satu PD dengan keselarasan tertinggi dalam rumpun perekonomian & SDA

7.4. Analisis GAP Renstra BPPKAD vs RPJMD

Meskipun secara desain sangat selaras, evaluasi berbasis SMART juga mengungkap beberapa **GAP penting** yang harus diperbaiki.

7.4.1. GAP pada Indikator

Dari matriks GAP di halaman 110–116, ditemukan antara lain:

1. **Indeks Inovasi Daerah**
    - Sudah menjadi indikator, tetapi **jenis inovasi fiskal/keuangan/aset tidak dijelaskan**,
    - Tidak ada baseline, roadmap, maupun program spesifik inovasi → **GAP konten & implementasi**.
2. **Efektivitas Pendapatan Daerah**
    - Target 100% per tahun, namun **tidak diuraikan potensi PAD, strategi intensifikasi & ekstensifikasi**,
    - Indikator terlalu umum, belum diturunkan ke jenis pajak & retribusi.
3. **Rasio Kemandirian Fiskal**
    - Target naik 65% → 68%, tetapi **tanpa peta jalan fiskal** (fiscal roadmap),
    - Tidak ada simulasi skenario peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan pada transfer pusat.

4. Ketepatan Waktu Dokumen Penganggaran
    - Indikator "tepat waktu" ada, namun SOP, timeline rinci, dan indikator kualitas dokumen tidak dijabarkan,
    - Masih muncul masalah keterlambatan KUA–PPAS sebagaimana diuraikan dalam bagian problem–solution.
5. Indikator capaian sasaran program (100%)
    - Terlalu administratif dan tidak menggambarkan outcome publik, hanya menilai kepatuhan perencanaan.

7.4.2. GAP pada Sasaran

Beberapa sasaran dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan RPJMD:

- *Sasaran peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan belum dihubungkan secara eksplisit dengan **pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing**.*
- *Sasaran optimalisasi aset belum dikaitkan dengan **pemanfaatan aset untuk investasi dan pemerataan ekonomi wilayah**.*
- *Sasaran penguatan manajemen keuangan daerah belum banyak menonjolkan aspek **digitalisasi dan open government**, padahal RPJMD menekankan Smart Government.*

7.4.3. GAP pada Program

Beberapa contoh GAP program:

- ***Program Pendapatan** belum memasukkan indikator per jenis pajak (hotel, restoran, PBB-P2, BPHTB) dan basis data geospasial wajib pajak.*
- ***Program Pengelolaan Aset** belum memiliki indikator validasi, updating, dan pemanfaatan aset seperti asset utilization ratio, asset yield, atau occupancy rate.*
- ***Program Pengelolaan Keuangan** belum eksplisit menampilkan inovasi e-budgeting, e-financial control, dan dashboard keuangan real-time.*

7.4.4. Ringkasan 5 GAP Terbesar

Dokumen merangkum 5 GAP utama BPPKAD:

1. Tidak adanya indikator & program inovasi fiskal/keuangan yang konkret,
2. Indikator efektivitas PAD terlalu umum dan belum sepenuhnya SMART,

3. Tidak ada indikator kualitas dalam penyusunan APBD (hanya tepat waktu),
4. Pengelolaan aset belum memiliki indikator updating dan pemanfaatan,
5. Tidak ada roadmap peningkatan kemandirian fiskal yang rinci.

7.5. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Tindak Lanjut

Bab VII juga menyajikan **matriks problem–solution** yang merinci akar masalah dan solusi kebijakan pada lima dimensi: tata kelola keuangan & penganggaran, pendapatan, keuangan & aset, reformasi birokrasi, dan keterkaitan dengan RPJMD.

Beberapa contoh kunci:

- **Masalah keterlambatan KUA–PPAS dan risiko keterlambatan APBD** → akar masalah pada kendala SIPD & kapasitas operator → solusi: *penguatan manajemen waktu siklus APBD, pelatihan operator SIPD, dan contingency plan.*
- **Data objek pajak tidak valid dan kesadaran pajak rendah** → solusi: *pemutakhiran data berbasis GIS, perluasan kanal pembayaran, dan kampanye sadar pajak.*
- **Pemanfaatan aset belum optimal** → solusi: *inventarisasi BMD digital, asset management plan, dan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.*
- **Minim inovasi digital keuangan** → solusi: *pengembangan e-service pajak, e-SPPT, e-asset, e-APBD, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan BPPKAD.*

Pada **Tabel Prioritas di halaman 118**, area tindak lanjut diklasifikasikan:

- **Prioritas Tinggi (High):**
  - *Integrasi PAD dengan sasaran ekonomi makro,*
  - *Digitalisasi keuangan daerah (smart government),*
  - *Indikator pemanfaatan aset untuk investasi.*
- **Prioritas Menengah (Medium):**
  - *Reformulasi rasio kemandirian fiskal,*
  - *Perbaikan indikator capaian sasaran program*.
- **Prioritas Rendah (Low):**
  - *Penyempurnaan aspek teknis ketepatan dokumen anggaran (karena dinilai sudah relatif baik).*

7.6. Kesimpulan Utama

1. **Selaras secara desain:**

   Renstra BPPKAD 2021–2026 **sangat selaras** dengan RPJMD 2021–2026 pada seluruh level: visi–misi, sasaran, indikator, program, dan isu strategis. BPPKAD bahkan dinilai sebagai **salah satu perangkat daerah dengan skor keselarasan SMART tertinggi (mencapai 100%)**.

2. **Kuat pada tata kelola & akuntabilitas:**

   Indikator seperti WTP, efektivitas pendapatan, ketepatan penganggaran, dan rasio kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Renstra benar-benar menyasar inti tata kelola fiskal dan reformasi birokrasi yang diamanatkan RPJMD.

3. **Namun masih terdapat GAP penting:**

   Terutama pada:

   - *belum konkretnya agenda inovasi fiskal–keuangan,*
   - *indikator PAD yang terlalu umum,*
   - *belum adanya indikator kualitas APBD dan pemanfaatan aset,*
   - *belum adanya roadmap kemandirian fiskal yang rinci dan terukur.*

4. **Agenda perbaikan ke depan:**

   - *Menyusun fiscal roadmap terintegrasi,*
   - *Mengembangkan indikator dan program inovasi digital keuangan,*
   - *Memperkuat integrasi PAD dengan sasaran ekonomi makro dan daya saing daerah,*
   - *Mengembangkan indikator pemanfaatan aset untuk investasi & pemerataan wilayah,*
   - *Menggeser sebagian indikator dari sifat administratif menjadi **outcome-based**.*

Dengan menutup GAP tersebut, BPPKAD berpotensi menjadi **motor utama reformasi keuangan daerah dan kemandirian fiskal Kabupaten Gresik**, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD berjalan lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan agenda *smart – open –collaborative government*.

BAB VIII

Analisis Keterkaitan Renstra Dinas PMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

8.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan perangkat daerah yang memegang peran kunci dalam penguatan **desa, kelembagaan masyarakat, ekonomi desa, dan ketahanan sosial**. Dalam konteks Kabupaten Gresik, desa menjadi arena utama:

- pengurangan kemiskinan,
- peningkatan kualitas hidup masyarakat,
- penguatan ketahanan sosial dan ekonomi lokal,
- penanganan kerentanan bencana dan perubahan sosial.

Renstra PMD 2021–2026 secara tegas menyatakan bahwa **indikator, sasaran, dan arah kebijakan harus mengacu langsung pada tujuan dan sasaran RPJMD**. Hal ini dinyatakan eksplisit dalam Bab VI Renstra PMD: *"Indikator kinerja Dinas PMD … adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PMD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD…"*

Dengan demikian, Renstra PMD memang dirancang sebagai **turunan langsung RPJMD**, dan evaluasi ini berfokus pada:

1. Tingkat **keterkaitan (linkage)** Renstra PMD dengan RPJMD di semua level (visi–misi, sasaran, indikator, program, isu strategis).
2. **Kekuatan dan kelemahan indikator** melalui analisis SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
3. **GAP substantif** antara apa yang diatur Renstra dengan kebutuhan strategis RPJMD, terutama terkait kemiskinan desa, ekonomi desa, dan ketahanan masyarakat.
4. **Rekomendasi perbaikan** Renstra PMD untuk mendukung RPJMD 2021–2026 dan menjadi pelajaran bagi RPJMD 2025–2029.

8.2. Keterkaitan Renstra PMD dengan RPJMD

8.2.1 Keterkaitan pada Level Visi–Misi

RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 menetapkan visi:

"*Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah*."

Misi yang paling relevan dengan urusan PMD adalah:

1. *Misi 2 – Memakmurkan desa dan menata wilayah,*
2. *Misi 5 – Meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan.*

Renstra PMD secara langsung menurunkan visi–misi tersebut menjadi fokus:

- *Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,*
- *Penurunan Kemiskinan Desa,*
- *Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa,*
- *Penguatan Kerjasama Antar-Desa,*
- *Penguatan Ekonomi Desa.*

Kesimpulan:

*Keterkaitan visi–misi dinilai **sangat kuat** – PMD menjadi "wajah" implementasi Misi 2 dan Misi 5 di level desa.*

8.2.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator

Renstra PMD memuat Tabel 6.1 (dirujuk kembali dalam Bab VIII) yang berisi indikator yang secara eksplisit dinyatakan *"berkontribusi langsung terhadap tujuan dan sasaran RPJMD"*. Indikator kunci tersebut antara lain:

- *Penurunan **Persentase Penduduk Miskin Perdesaan**,*
- ***Persentase Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal**,*
- ***Indeks Ketahanan Masyarakat Desa**,*
- *Jumlah/Proporsi **Desa Tangguh Bencana**,*
- ***Peningkatan Pendapatan Desa**.*

Indikator-indikator ini terkait langsung dengan sasaran RPJMD mengenai:

- *Pengurangan Kemiskinan,*
- *Penguatan Ketahanan Desa (Termasuk Desa Tangguh Bencana),*
- *Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa,*
- *Penguatan Ekonomi Dan Kelembagaan Desa.*

Kesimpulan:

*Kesesuaian indikator antara Renstra dan RPJMD dinilai **sangat kuat**, terutama pada indikator-inti.*

8.2.3 Keterkaitan Program dengan Program Prioritas RPJMD

Renstra PMD memuat program seperti:

- *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,*
- *Program Pengembangan Ekonomi Desa & Peningkatan Potensi Desa,*
- *Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,*
- *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,*
- *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,*
- *Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Desa,*
- *Program Fasilitasi Tim Penggerak PKK,*
- *Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.*

Program-program ini selaras dengan prioritas RPJMD terkait:

- *Pengentasan Kemiskinan,*
- *Penguatan Kelembagaan Desa,*
- *Pemanfaatan Dana Desa / Add Untuk Kesejahteraan,*
- *Peningkatan Tata Kelola Dan Keuangan Desa,*
- *Peningkatan Kapasitas Aparat Dan Partisipasi Masyarakat.*

Kesimpulan:

*Keterkaitan program → **Sangat kuat**. PMD menjalankan program yang memang dirancang untuk mengisi ruang kebijakan RPJMD di level desa.*

8.2.4 Keterkaitan Isu Strategis

Isu strategis yang diangkat Renstra PMD:

- *Kemiskinan Desa,*
- *Kelembagaan Desa & Masyarakat,*
- *Kapasitas Sdm Aparatur Desa Dan Masyarakat,*
- *Ketahanan Desa Terhadap Bencana,*
- *Pengelolaan Keuangan Dan Perencanaan Desa.*

Semua isu ini identik dengan isu RPJMD, terutama:

- *Kemiskinan Perdesaan,*
- *Desa Rawan Bencana,*
- *Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Desa.*

Kesimpulan:

*Keterkaitan isu strategis → **kuat hingga sangat kuat**. PMD dan RPJMD berbicara soal persoalan desa yang sama.*

8.3. Hasil Analisis SMART: Indikator, Sasaran, dan Program

Bab VIII melakukan **Analisis SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) terhadap indikator, sasaran, dan program PMD.

8.3.1 Analisis SMART per Indikator

Pada **Tabel 8.1 (halaman 124)**, sejumlah indikator PMD dinilai sebagai berikut:

- **Jumlah dokumen PKK** → S, M, A, T = Strong; R = Medium
    - *Kuat secara pengukuran output, tetapi **hanya bersifat administratif**, belum menerjemahkan outcome pemberdayaan keluarga.*
- **Jumlah desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BK)** → semua aspek S–M–A–R–T = Strong
    - *Sangat kuat secara administrasi, tetapi belum mengukur **kualitas pemanfaatan dana**.*
- **Program kapasitas aparat desa** → umumnya Medium–Strong
    - *Mengukur jumlah kegiatan/peserta, **belum mengukur perubahan kinerja** aparatur.*
- **Program pemberdayaan masyarakat & ekonomi desa** → mayoritas Medium
    - *Belum jelas outcome ekonomi dan sosial yang dihasilkan.*
- **Indikator RPJMD di Tabel 6.1** → semua aspek S–M–A–R–T = Strong
    - *Menjadi indikator terbaik dan paling selaras dengan RPJMD.*

Ringkasan temuan SMART indikator:

- Kekuatan: *indikator lengkap, terukur, punya baseline dan target tahunan (2022–2026).*
- Kelemahan: ***didominasi indikator dokumen dan output administratif,*** *belum cukup banyak indikator* ***outcome*** *seperti kemiskinan desa, kemandirian desa, pertumbuhan ekonomi desa.*

8.3.2 Analisis SMART per Sasaran

Pada **Tabel 8.3 (halaman 127)**:

- Sasaran **Peningkatan ekonomi desa** → S dan R = Strong, M & A = Medium; T = Strong
  - *Artinya sasaran jelas, tetapi* ***tidak semua indikator langsung mengukur ekonomi desa****.*
- Sasaran **Peningkatan keberdayaan masyarakat** → S, R = Strong; M & A = Medium
  - *Terukur lewat program, tetapi indikator cenderung administratif.*
- Sasaran **Peningkatan kapasitas aparatur desa** → semua aspek S–M–A–R–T = Strong
  - *Ini merupakan sasaran yang paling kuat dan jelas hubungannya dengan peningkatan tata kelola desa.*
- Sasaran **Peningkatan partisipasi masyarakat desa** → mayoritas Medium
  - *Outcome sosial sulit dikuantifikasi; indikator masih berupa jumlah kegiatan.*

Kesimpulan:

- *Sasaran kelembagaan & kapasitas aparatur desa →* ***kuat****.*
- *Sasaran ekonomi, keberdayaan, dan partisipasi →* ***perlu penguatan indikator outcome****.*

8.3.3 Analisis SMART per Program

Pada **Tabel 8.4 (halaman 127)**:

- ***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*** *→ semua aspek Strong (program inti PMD).*
- ***Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*** *→ juga Strong di semua aspek.*
- ***Program Pengembangan Ekonomi Desa*** *→ banyak aspek Medium; indikator belum sepenuhnya menggambarkan* ***peningkatan ekonomi desa****.*
- ***Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan*** *→ mayoritas Medium; tidak eksplisit dalam RPJMD, tetapi relevan pada isu kelompok rentan.*

Kesimpulan umum SMART:

- *Dari sisi **struktur**, Renstra PMD kuat, lengkap, dan cukup SMART.*
- *Dari sisi **substansi**, indikator masih lebih condong ke **input–output** daripada **outcome–impact**, terutama untuk kemiskinan desa, kemandirian desa, dan ekonomi desa.*

8.4. Analisis GAP Renstra PMD vs RPJMD

8.4.1 Ringkasan GAP Utama

Pada halaman 125–128 disajikan **Ringkasan GAP SMART dan Tabel 8.5**. Inti GAP:

1. **Outcome belum terukur**
    - Belum ada indikator kuat untuk:
        - kemiskinan desa,
        - kemandirian desa,
        - ekonomi desa (nilai tambah, usaha produktif).
2. **Indikator administratif mendominasi**
    - Banyak indikator berupa “jumlah dokumen”, “jumlah laporan”, “jumlah desa” tanpa mengukur kualitas atau dampak.
3. **Tidak ada indikator digitalisasi desa (Smart Village)**
    - Padahal RPJMD mengusung arah *smart government* dan integrasi data.
4. **Pemberdayaan ekonomi desa belum terukur langsung**
    - Program ekonomi desa belum mengukur pertumbuhan usaha, pendapatan desa, atau kinerja BUMDes.
5. **Kontribusi ke tujuan RPJMD belum tampak di level program**
    - Hubungan program–indikator–sasaran RPJMD belum selalu eksplisit.

8.4.2 Matriks Problem–Solution Khusus PMD

Pada **Matriks Problem–Solution (halaman 129)** diidentifikasi beberapa masalah kunci:

- **Indikator PMD terlalu administratif** → disusun berdasarkan tupoksi, bukan logika RPJMD → solusi: menambahkan indikator outcome berbasis dampak.
- **Program ekonomi desa tidak mengukur perubahan ekonomi** → tidak ada indikator pendapatan desa atau nilai usaha BUMDes → solusi: menambah indikator pendapatan BUMDes, jumlah usaha baru, nilai ekonomi lokal.

- **Partisipasi masyarakat tidak terukur** → indikator SMART sangat rendah (skor 0,276) → solusi: menyusun indikator partisipasi yang mikro dan kuantitatif.
- **Peran perempuan belum jelas keterkaitannya dengan RPJMD** → solusi: integrasikan ke indikator pemberdayaan masyarakat/kelompok rentan.
- **Indikator keberdayaan tidak menggambarkan hasil sosial** → banyak frasa "peningkatan" tanpa baseline → solusi: menambah baseline dan target numerik.

8.4.3 Prioritas Perbaikan (High–Medium–Low)

Tabel 8.9 (halaman 130) mengelompokkan prioritas sebagai berikut:

- **Prioritas Tinggi (High):**
    1. Perbaikan **indikator ekonomi desa** (karena RPJMD menekankan pengurangan kemiskinan desa).
    2. Perbaikan **indikator partisipasi masyarakat** (indikator paling lemah secara SMART).
    3. Perbaikan **indikator keberdayaan masyarakat** (merupakan kunci sasaran RPJMD).
- **Prioritas Menengah (Medium):**
    - Integrasi **peran perempuan pedesaan** ke sasaran RPJMD (relevan, tapi bukan sasaran utama).
- **Prioritas Rendah (Low):**
    - Indikator administratif laporan (tetap boleh ada, tetapi tidak menjadi prioritas evaluasi).

8.5. Implikasi Strategis terhadap Pencapaian RPJMD

Dari seluruh analisis, dapat disimpulkan beberapa implikasi penting:

1. **Desa adalah medan utama pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan**. Renstra PMD yang selaras dengan RPJMD sudah menjadi modal, tetapi **pengukuran outcome belum kuat**, sehingga dampak kebijakan desa terhadap kemiskinan dan ketahanan belum sepenuhnya terbaca.
2. **Tata kelola dan kapasitas aparatur desa sudah menjadi fokus yang cukup kuat**, namun perlu diikuti indikator hasil seperti kualitas perencanaan, ketepatan waktu & kualitas laporan keuangan desa, serta kepatuhan regulasi.

3. Transformasi menuju Smart Village dan integrasi data desa baru tampak di level aplikasi, belum diukur dari sisi kualitas dan pemanfaatan data.
4. Pemberdayaan ekonomi desa dan BUMDes sangat strategis untuk mencapai sasaran RPJMD tentang ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan, tetapi indikator yang ada belum cukup menggambarkan pertumbuhan ekonomi desa.

8.6. Rekomendasi Kebijakan Kunci

Berdasarkan analisis SMART, GAP, dan prioritas, rekomendasi utama adalah:

8.6.1 Penguatan Indikator Outcome

- Menambahkan indikator:
  - *Persentase penurunan kemiskinan desa dan/atau kontribusi desa terhadap penurunan kemiskinan kabupaten,*
  - *Indeks kemandirian desa / status desa berkembang–maju–mandiri,*
  - *Pertumbuhan pendapatan asli desa (PADes),*
  - *Kinerja BUMDes (omzet, laba, jumlah unit usaha).*

8.6.2 Reformulasi Indikator Partisipasi dan Keberdayaan

- Mengganti indikator "jumlah kegiatan pemberdayaan" menjadi:
  - *Persentase KK yang terlibat dalam kelompok/ forum pemberdayaan,*
  - *Persentase desa dengan forum partisipasi aktif (musdes, BPD aktif).*

8.6.3 Penguatan Peran Perempuan dan Kelompok Rentan

- Menyusun indikator yang menghubungkan peran perempuan dengan sasaran RPJMD, misalnya:
  - *Persentase perempuan pada posisi pengambil keputusan di desa (BPD/BUMDes/kelembagaan desa)*,
  - *Persentase rumah tangga miskin perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan*.

8.6.4 Penguatan Tata Kelola dan Sistem Pelaporan Desa

- Menetapkan target bertahap:
  - *Persentase desa dengan laporan keuangan tepat waktu & tanpa temuan material,*

- *Persentase desa yang mengirim laporan lengkap melalui aplikasi pelaporan,*
- *Integrasi laporan desa dalam kerangka Satu Data Gresik & SPBE.*

8.6.5 Penajaman Program Ekonomi Desa

- Mengarahkan program pengembangan ekonomi desa agar:
  - fokus pada penumbuhan unit usaha produktif,
  - memiliki indikator jelas: pertumbuhan PADes, pertumbuhan BUMDes aktif, serapan tenaga kerja desa, dan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

8.7. Kesimpulan Utama

1. *Renstra PMD 2021–2026 sangat selaras secara formal dengan RPJMD 2021–2026, baik dari sisi visi–misi, sasaran, indikator utama, program, maupun isu strategis.*
2. *Analisis SMART menunjukkan struktur Renstra yang kuat, indikator lengkap dan terjadwal, baseline tersedia, serta relevansi tinggi terhadap tujuan RPJMD.*
3. *Namun, terdapat GAP substansial pada dimensi outcome: kemiskinan desa, kemandirian desa, dan ekonomi desa belum terukur secara memadai; indikator masih didominasi output administratif (dokumen, laporan, jumlah desa).*
4. *Kelemahan indikator partisipasi masyarakat, peran perempuan, dan ekonomi desa dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk membaca dampak nyata program PMD terhadap sasaran RPJMD seperti kemiskinan, inklusivitas, dan ketahanan desa.*
5. *Dengan melakukan reformulasi indikator, penajaman sasaran, dan penguatan program ekonomi serta tata kelola desa, Dinas PMD berpotensi menjadi aktor kunci dalam mewujudkan desa yang lebih mandiri, berdaya, dan berketahanan, sekaligus memperkuat keberhasilan RPJMD Gresik 2021–2026 dan menjadi landasan kuat bagi RPJMD periode berikutnya.*

BAB IX

Analisis Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

9.1. Latar Belakang dan Tujuan Analisis

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik merupakan perangkat daerah strategis yang mengelola **pelatihan vokasi, penempatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan data pasar kerja**. Di tengah karakter Gresik sebagai daerah industri besar (kawasan JIIPE, KIG, Manyar, Driyorejo), kinerja Disnaker sangat menentukan:

- *Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),*
- *Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),*
- *Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal,*
- *Serta Stabilitas Hubungan Industrial Antara Perusahaan Dan Pekerja.*

RPJMD 2021–2026 menempatkan ketenagakerjaan di bawah **Misi V**, yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat"*. Karena itu, Renstra Disnaker wajib menjadi **turunan langsung** dari RPJMD untuk menjamin konsistensi arah kebijakan lima tahunan.

Analisis Bab IX ini bertujuan untuk:

1. *Menguji keterkaitan formal dan substantif Renstra Disnaker dengan RPJMD (visi–misi, sasaran, indikator, program, dan isu strategis).*
2. *Menilai kualitas indikator, sasaran, dan program Disnaker menggunakan pendekatan SMART.*
3. *Mengidentifikasi GAP antara perencanaan di Renstra dengan standar RPJMD.*
4. *Menyusun problem–solution policy serta prioritas tindak lanjut yang dapat digunakan untuk perbaikan Renstra dan penyusunan RPJMD berikutnya.*

9.2. Keterkaitan Formal: Renstra Disnaker sebagai Turunan Langsung RPJMD

Pada bagian awal Bab IX dinyatakan secara eksplisit bahwa **Renstra Disnaker merupakan penjabaran langsung RPJMD**:

"Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 dan visi, misi program Bupati dan Wakil

Bupati terpilih… Renstra harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026."

Artinya, secara dasar hukum dan fungsi, keterkaitan Renstra–RPJMD berada pada kategori "Sangat Kuat". Renstra tidak berdiri sendiri, tetapi disusun dengan:

- mengidentifikasi visi–misi dan program Bupati–Wakil Bupati dalam RPJMD,
- merujuk Misi V RPJMD sebagai rujukan utama isu strategis ketenagakerjaan.

9.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

9.3.1. Titik Temu Visi–Misi

Visi RPJMD:

"Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah."

Kontribusi Disnaker terutama pada aspek "Sejahtera" dan "Berdaya Saing" melalui kebijakan:

- *Penciptaan Lapangan Kerja,*
- *Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja,*
- *Perlindungan Tenaga Kerja,*
- *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*

Hal ini dipetakan sebagai implementasi langsung Misi V RPJMD.

9.3.2. Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra Disnaker

RPJMD menetapkan sasaran ketenagakerjaan:

- *Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),*
- *Meningkatnya penyerapan tenaga kerja warga Gresik,*
- *Meningkatnya TPAK serta stabilitas hubungan industrial.*

Renstra Disnaker kemudian menurunkan sasaran:

- *Meningkatnya tata kelola penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja,*
- *Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis.*

Indikator yang digunakan:

- *Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) → turunan langsung dari sasaran penurunan TPT & peningkatan TPAK.*

- ***Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial*** → *turunan dari sasaran stabilitas hubungan industrial.*

Pada **Tabel 9.1 (halaman 141)** ditunjukkan bahwa:

- Visi–misi → **Sangat kuat**,
- Tujuan & sasaran → **Sangat kuat**,
- Program → **Sangat kuat**,
- Indikator → **Kuat**,
- Isu strategis → **Sangat kuat**.

Kesimpulan: Secara hierarkis, **line of sight** dari RPJMD ke Renstra Disnaker *jelas dan langsung*.

9.4. Keterkaitan Program dan Indikator Disnaker dengan RPJMD

9.4.1. Program

Renstra Disnaker memuat program:

- *Pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi,*
- *Penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja,*
- *Peningkatan produktivitas tenaga kerja,*
- *Pembinaan & mediasi hubungan industrial,*
- *Pengelolaan data & informasi ketenagakerjaan,*
- *Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (wirausaha baru).*

Menurut uraian Bab IX, seluruh program ini:

- *disusun "**sesuai visi, misi, dan fokus program Bupati dan Wakil Bupati**",*
- *mendukung strategi RPJMD: penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan stabilitas pasar kerja.*

9.4.2. Indikator

Indikator yang digunakan Renstra mengacu langsung pada indikator RPJMD, yaitu:

- *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan TPAK sebagai indikator makro,*
- *diturunkan menjadi TKK, persentase penyelesaian kasus HI, serta indikator output program (jumlah peserta pelatihan, penempatan kerja, wirausaha baru, cakupan jaminan sosial, dan integrasi data ketenagakerjaan).*

Kesimpulan: *Indikator Renstra Disnaker adalah **indikator turunan langsung** dari indikator kinerja makro RPJMD.*

9.5. Hasil Analisis SMART Indikator–Sasaran–Program

Bab IX menyajikan beberapa tabel SMART yang cukup detail (lihat halaman 141–155).

9.5.1. Indikator Utama

1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
    - S = 5 (spesifik mengukur proporsi warga yang bekerja),
    - M = 5 (ada target angka tahunan: 91,95 → 92,73),
    - A = 4 (kenaikan moderat dan realistis),
    - R = 5 (sangat relevan dengan sasaran penurunan TPT),
    - T = 5 (target tahunan 2021–2026 jelas).

      → Total skor 24 = Strong.
2. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    - S = 5, M = 5, A = 4, R = 5, T = 5,
    - Total skor 24 (Strong), dengan catatan ada anomali penurunan target tahun 2023 (94% → 90%) tanpa penjelasan.
3. TPAK (Indikator Kinerja Utama Daerah)
    - Skor 23 (Strong), namun aspek *Achievable* dan *Measurable* dinilai Medium karena lonjakan target (66 → 78) tidak dijelaskan basis intervensinya.
4. Program Pelatihan Vokasi & Sertifikasi
    - Skor 23 (Strong), indikator jelas dan relevan, namun masih dominan output (jumlah peserta), belum outcome (penempatan atau kenaikan pendapatan).

9.5.2. Rekap SMART

Rekap di halaman 156 menyimpulkan:

- Indikator TKK dan penyelesaian HI: rata-rata skor SMART 4–4,6 (Strong) → indikator outcome kuat, lengkap, dan terhubung langsung dengan TPT dan TPAK.
- Program inti (pelatihan, penempatan, wirausaha baru, pembinaan HI) → rata-rata ≥ 4 (Strong).
- Program enabling (data ketenagakerjaan, produktivitas, sosialisasi) → rata-rata 3,6–3,9 (Medium–Strong) karena relevansi ke RPJMD lebih sebagai faktor pendukung, dan aspek Achievable–Time-bound belum sepenuhnya dijelaskan.

9.6. Temuan GAP SMART dan Implikasinya

Bagian **Tabel GAP SMART Disnaker** (halaman 143–146) menguraikan per-indikator, per-sasaran, dan per-program.

9.6.1. GAP pada Indikator

- **TKK**:
  - *Kategori Strong, **tidak ada GAP signifikan**, namun aspek Achievable belum disertai justifikasi kapasitas intervensi (BLK, jumlah lowongan, skema penempatan).*
- **Penyelesaian HI**:
  - *GAP pada aspek Achievable karena **penurunan target 2023** tidak dijelaskan; perlu revisi baseline dan analisis risiko.*
- **TPAK**:
  - *Gap pada Measurable dan Achievable: lonjakan target cukup ambisius, tetapi belum dihubungkan secara rinci dengan kapasitas program (jumlah pelatihan, job fair, link and match, dll.).*
- **Pelatihan vokasi**:
  - *Indikator masih output-based (jumlah peserta pelatihan). **Outcome seperti "persentase lulusan yang terserap kerja" belum diukur**.*
- **Mediasi HI**:
  - *Indikator hanya "kasus selesai", belum mengukur **waktu penyelesaian** atau kepuasan para pihak.*
- **Manajemen Data Ketenagakerjaan**:
  - *Skor Medium–Weak. Indikator belum spesifik (tidak jelas cakupan integrasi data, frekuensi updating, dan ketepatan waktu).*

9.6.2. GAP pada Sasaran

Terdapat dua sasaran utama:

1. *Meningkatnya tata kelola penempatan kerja & perluasan kesempatan kerja*
2. *Meningkatnya hubungan industrial kondusif, harmonis, dinamis*

Keduanya mendapat nilai SMART **4/5** (Strong) untuk S, M, R, T; namun **Achievable hanya Medium** karena:

- tidak ada narasi analitis mengenai kemampuan program dan sumber daya (jumlah pelatihan, BLK, lowongan, mediator, beban kasus) untuk mencapai target indikator.

9.6.3. GAP pada Program

- *Pelatihan vokasi: belum ada target per jenis pelatihan dan informasi kapasitas BLK.*
- *Penempatan & perluasan kesempatan kerja: tidak ada target jumlah lowongan dan target job matching.*
- *Pembinaan hubungan industrial: belum memuat data kapasitas mediator dan kebutuhan SDM.*
- *Pengelolaan data & sistem informasi ketenagakerjaan: indikator "data terintegrasi" terlalu umum dan belum punya target jelas.*

9.6.4. Ringkasan GAP Utama

Ringkasan GAP pada halaman 146 menyebut tiga titik lemah utama:

1. Indikator → aspek *Achievable* dan *Measurable* belum dijelaskan dengan basis intervensi (kapasitas program).
2. Sasaran → belum ada justifikasi kuantitatif pembebanan sasaran (tidak dijelaskan "mengapa target sekian").
3. Program → masih minim target output kuantitatif per kegiatan.

9.7. Problem–Solution Policy dan Prioritas Tindak Lanjut

9.7.1. Problem–Solution Umum Disnaker

Tabel problem–solution (halaman 147–149) mengurai 12 masalah strategis, akar masalah, dan solusi. Beberapa yang paling penting:

1. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
    - Root cause: mismatch kompetensi–kebutuhan industri, akses pelatihan dan link and match lemah.
    - Solusi: pelatihan vokasi berbasis SKKNI, sertifikasi, job-matching digital, pemetaan kebutuhan industri.
2. Tata kelola penempatan kerja belum optimal
    - Root cause: kerjasama multipihak (industri, BLK, BKK sekolah) belum maksimal.

- Solusi: MoU strategis dengan kawasan industri, penguatan BKK, dan sistem informasi pasar kerja online.

3. Kualitas pelatihan vokasi belum responsif pasar
    - Root cause: kurikulum belum update, sarpras BLK terbatas.
    - Solusi: revitalisasi BLK, modernisasi peralatan, dan kurikulum 4.0.
4. Perselisihan hubungan industrial masih tinggi dan fluktuatif
    - Root cause: minim forum bipartit, SDM mediator terbatas.
    - Solusi: pembentukan LKS bipartit, mediasi proaktif, edukasi regulasi ketenagakerjaan, penambahan mediator.
5. Data ketenagakerjaan tidak terintegrasi
    - Root cause: belum ada sistem informasi terstandar.
    - Solusi: pengembangan manajemen data ketenagakerjaan dan integrasi ke Satu Data Gresik.
6. Minimnya anggaran & sarpras sektor ketenagakerjaan
    - Solusi: advokasi anggaran berbasis kinerja, prioritas pelatihan–penempatan, serta pemanfaatan CSR perusahaan.

9.7.2. Problem–Solution per Sasaran dan Indikator

- Sasaran 1 (TKK) → masalah utama: rendahnya validitas data pasar kerja, link and match belum optimal, SDM Disnaker terbatas, dan ketergantungan tinggi pada industri besar.
  → Solusi: Sistem Informasi Pasar Kerja Terintegrasi, forum HRD–Disnaker, kurikulum pelatihan berbasis SKKNI, program wirausaha baru dan TKM.
- Sasaran 2 (HI kondusif) → masalah: penyelesaian PHI fluktuatif, perusahaan belum memiliki LKS bipartit, rendahnya kepatuhan norma kerja, dan belum optimalnya digitalisasi layanan HI.
  → Solusi: tambahan mediator, digitalisasi layanan PHI, kewajiban LKS bipartit dan audit HI perusahaan.

9.7.3. Prioritas High–Medium–Low

Pada Tabel Prioritas (halaman 152), area tindak lanjut dikelompokkan sebagai berikut:

- High Priority
    - Penataan link & match industri–BLK.

  - Digitalisasi layanan ketenagakerjaan (SIPK, PHI online, job portal).
  - Penguatan mediasi & LKS Bipartit.
  - Validasi data pasar kerja & sistem informasi terpadu.
  - Peningkatan SDM Disnaker (TI, mediator, analis data).
- Medium Priority
  - Revitalisasi BLK & sarpras (investasi jangka menengah).
  - Pemberdayaan pekerja rentan & PMI purna.
  - Program wirausaha baru/TKM.
- Low Priority
  - CSR ketenagakerjaan (tergantung komitmen perusahaan).
  - Kajian/studi banding yang tidak langsung menyentuh indikator TKK & PHI.
  - Kegiatan administratif yang sifatnya supporting.

9.8. Implikasi Strategis bagi RPJMD dan Renstra Ke Depan

1. Keterkaitan Renstra–RPJMD sudah sangat kuat, sehingga secara formal tidak ada masalah alignment. Tantangan justru ada di kualitas indikator, data, dan implementasi program.
2. Dengan indikator TKK, TPAK, dan penyelesaian HI yang sudah kuat, Disnaker berpotensi menjadi kontributor utama pencapaian Misi V RPJMD. Namun, tanpa perbaikan Achievability (kapasitas BLK, jumlah lowongan, kualitas data, jumlah mediator), target ambisius bisa sulit terwujud.
3. Digitalisasi ketenagakerjaan (data, job-matching, PHI online) adalah kunci untuk menopang RPJMD yang mengusung Smart Governance dan pelayanan publik modern.
4. Integrasi kebijakan dengan sektor lain (pendidikan vokasi, industri, investasi, desa/PMD) perlu diperkuat, karena persoalan tenaga kerja tidak bisa diselesaikan Disnaker sendiri.
5. Hasil analisis ini menjadi bahan penting untuk penyusunan RPJMD 2025–2029, terutama untuk:
   - menajamkan IKU ketenagakerjaan,
   - memperkuat desain pelatihan vokasi berbasis industri,
   - dan mengembangkan sistem ketenagakerjaan digital satu pintu.

9.9. Kesimpulan Utama

1. **Renstra Disnaker 2021–2026 secara formal dan substantif merupakan turunan langsung RPJMD 2021–2026**, dengan tingkat keterkaitan yang dinilai **Sangat Kuat** pada hampir semua komponen (visi–misi, sasaran, indikator, program, dan isu strategis).
2. **Indikator utama (TKK, penyelesaian HI, TPAK) dan program inti (pelatihan, penempatan, wirausaha baru, hubungan industrial)** memiliki kualitas SMART yang tinggi (kategori **Strong**), dan secara logis menjadi jembatan antara kinerja Disnaker dengan capaian sasaran makro RPJMD.
3. Namun demikian, terdapat **GAP signifikan pada aspek Achievability, detail indikator program, dan sistem data**. Target ambisius belum sepenuhnya ditopang analisis kapasitas program, SDM, dan infrastruktur.
4. **Problem–solution matrix** menunjukkan bahwa kunci perbaikan ada pada:
    - penguatan link and match industri–BLK,
    - digitalisasi layanan ketenagakerjaan,
    - peningkatan kualitas & kuantitas mediator HI,
    - perbaikan sistem data pasar kerja,
    - pengembangan wirausaha baru dan pemberdayaan pekerja rentan.
5. Jika rekomendasi ini diimplementasikan, Disnaker berpotensi menjadi **motor utama penurunan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal Gresik**, serta pilar penting dalam mewujudkan **"Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan"** sesuai visi RPJMD.

BAB X

Analisis Keterkaitan RENSTRA DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

10.1. Latar Belakang dan Peran Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perangkat daerah yang memegang peran sentral dalam:

- *Menarik Dan Memfasilitasi Investasi PMA/PMDN,*
- *Mengelola Pelayanan Perizinan Dan Non-Perizinan,*
- *Memperkuat Iklim Kemudahan Berusaha,*
- *Sekaligus Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*.

Dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026, peran DPMPTSP terkonsentrasi terutama pada:

- *Misi III – Kemandirian Ekonomi & Daya Saing Wilayah,*
  dengan dukungan pada Misi II – Infrastruktur & Pelayanan Berdaya Saing,
- *serta Misi V – Peningkatan Kesejahteraan Sosial & Lapangan Kerja.*

Renstra DPMPTSP secara eksplisit menyatakan bahwa:

"Renstra DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terkait investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Gresik."

Dengan demikian, Renstra DPMPTSP bukan dokumen yang berdiri sendiri, tetapi merupakan penjabaran teknis RPJMD dalam urusan penanaman modal, perizinan, dan kemudahan berusaha.

10.2. Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD pada Level Visi–Misi–Tujuan–Sasaran

10.2.1 Keterkaitan Visi–Misi

Visi RPJMD:

"Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah."

Kontribusi DPMPTSP terhadap visi ini terletak pada:

- ***"Mandiri"*** *→ melalui penguatan investasi dan basis pajak/ekonomi daerah;*
- ***"Sejahtera"*** *→ melalui investasi yang menciptakan lapangan kerja;*
- ***"Berdaya Saing"*** *→ melalui perbaikan iklim usaha, penyederhanaan perizinan, dan promosi investasi.*

Tabel pada **halaman 157–158** menunjukkan secara eksplisit keterkaitan DPMPTSP dengan beberapa misi:

Misi RPJMD	Keterkaitan Fungsi DPMPTSP
Misi III – Kemandirian Ekonomi	Penguatan investasi daerah, peningkatan iklim usaha, perizinan cepat
Misi II – Infrastruktur Berdaya Saing	Standar layanan perizinan, integrasi sistem PTSP/OSS
Misi V – Kesejahteraan & Kerja	Investasi sebagai pengungkit lapangan kerja

Kesimpulan: Pada level visi–misi, **keterkaitan dikategorikan "Sangat Kuat"**. Renstra DPMPTSP jelas diposisikan sebagai *motor percepatan investasi* dan *reformasi layanan perizinan* dalam kerangka RPJMD.

10.2.2 Keterkaitan Tujuan & Sasaran

Pada **Bab I dan Bab IV Renstra**, DPMPTSP menegaskan bahwa tujuan dan sasaran disusun dengan mengacu pada RPJMD dan **indikator kinerja kepala daerah** di bidang penanaman modal. Sasaran utama RPJMD yang relevan:

- *Meningkatnya Investasi Daerah,*
- *Meningkatnya Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business),*
- *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Perizinan Cepat, Murah, Transparan),*
- *Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Penciptaan Lapangan Kerja.*

Renstra DPMPTSP menurunkannya menjadi tujuan dan sasaran operasional, antara lain:

Tujuan Renstra DPMPTSP	Kontribusi ke Sasaran RPJMD
Peningkatan realisasi investasi	Pertumbuhan ekonomi & penyerapan tenaga kerja
Peningkatan kualitas layanan perizinan	Reformasi birokrasi & layanan publik berkualitas
Optimalisasi promosi peluang investasi	Kenaikan daya saing & menarik investor
Pengembangan sistem PTSP berbasis digital	Transformasi digital pemerintahan & kemudahan usaha

Di halaman 158 disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP **"langsung merupakan turunan dari sasaran Misi III RPJMD"**

10.2.3 Keterkaitan Strategi & Arah Kebijakan

Pada halaman 159, disebutkan bahwa Renstra DPMPTSP merupakan strategi kebijakan urusan penanaman modal yang disusun agar selaras dengan RPJMD.

Strategi utama yang sejalan dengan RPJMD:

- *Penguatan sistem pelayanan perizinan (PTSP/OSS, standar waktu layanan);*
- *Optimalisasi promosi investasi (sektoral & kawasan);*
- *Peningkatan daya tarik investasi berbasis kemudahan OSS–RBA;*
- *Pemberdayaan pelaku usaha lokal, terutama UMK.*

Kesimpulan: *Arah kebijakan Renstra → turunan langsung strategi RPJMD bidang investasi & kemudahan usaha.*

10.3. Keterkaitan Program, Kegiatan, dan IKD dengan RPJMD

10.3.1 Program & Kegiatan

Pada halaman 160–161, dijelaskan bahwa DPMPTSP berperan langsung dalam percepatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan yang menjadi indikator kinerja RPJMD. Program utama Renstra yang mendukung RPJMD antara lain:

- Program Penanaman Modal
  - *Peningkatan iklim investasi, realisasi investasi PMA/PMDN, pemantauan pelaksanaan investasi.*
- Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - *Percepatan dan penyederhanaan proses perizinan, integrasi OSS–Daerah.*
- Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
  - *Peningkatan kualitas SDM perizinan, penguatan tata kelola, dan sistem informasi.*
- Program Promosi Penanaman Modal
  - *Investment forum, promosi sektor prioritas, kerjasama investasi (MoU/PKS).*
- Program Pengawasan & Pengendalian Penanaman Modal
  - *Pengawasan kepatuhan izin, pemantauan kelanjutan realisasi investasi.*

Tabel di **halaman 160** merinci hubungan program Renstra dengan sasaran RPJMD, misalnya: peningkatan iklim investasi → daya saing daerah; layanan perizinan terintegrasi → reformasi layanan publik; penyederhanaan prosedur investasi → efisiensi birokrasi.

10.3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang Diampu

Renstra menegaskan bahwa indikator kinerja DPMPTSP **langsung mendukung indikator RPJMD**, yakni:

- **Nilai Investasi Masuk (PMA/PMDN)** – indikator kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
- **Penerbitan Perizinan Tepat Waktu** – mendukung kemudahan berusaha & reformasi layanan publik.
- **Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKM) DPMPTSP** – indikator kualitas layanan.
- **Pertumbuhan Perusahaan yang Beroperasi / memperoleh izin** – proksi terhadap iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Pada **tabel ringkasan di halaman 160**, tingkat keterkaitan dinilai:

- Visi–Misi: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Sangat Kuat)
- Tujuan–Sasaran: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Sangat Kuat)
- Strategi–Kebijakan: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Sangat Kuat)
- Program: ⭐⭐⭐⭐⭐ (Sangat Kuat)
- Indikator: ⭐⭐⭐⭐☆ (Kuat, masih perlu penguatan pada aspek digitalisasi & daya saing).

Secara keseluruhan, **Overall Alignment Score** Renstra–RPJMD untuk DPMPTSP berada di rentang **90–95% (Sangat Kuat)**.

10.4. Hasil Analisis SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

10.4.1 SMART per Indikator–Sasaran–Program

Tabel besar pada halaman 163–166 berisi 12 indikator utama Renstra DPMPTSP. Ringkasan temuan:

1. **Nilai Realisasi Investasi (Rp miliar)**
    - Skor: S=4, M=5, A=4, R=5, T=4 → **sangat relevan & terukur**;
    - Catatan: perlu perjelas sektor prioritas & sumber data (OSS, BKPM, internal) agar Specific naik ke 5.

2. Jumlah Proyek Investasi Terealisasi (unit)
    - Skor: 4–4–4–4–4 → kukuh dan konsisten;
    - Catatan: belum membedakan skala dan jenis proyek (besar, menengah, kecil).
3. Persentase Perizinan Selesai ≤ Standar Waktu Layanan
    - Skor: 5–5–4–5–4 → sangat SMART;
    - Ini indikator kunci kemudahan usaha & reformasi birokrasi.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan DPMPTSP
    - Skor: 4–4–4–4–3;
    - Time-bound masih "per tahun", disarankan ada milestone per triwulan dan metodologi survei baku.
5. Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Usaha (hari)
    - Skor: 4–5–4–5–4;
    - Mengukur efisiensi proses; sangat relevan untuk *ease of doing business*.
6. Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan OSS/Online Licensing
    - Skor: 4–4–4–4–3;
    - Menggambarkan digitalisasi layanan; perlu baseline dan segmentasi (UMK/non UMK).
7. Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Lengkap
    - Skor: 4–4–3–4–3;
    - Perlu perencanaan pengawasan rutin dan basis data usaha yang akurat.
8. Jumlah Kegiatan Promosi/Investment Forum
    - Skor: 3–3–4–3–3;
    - Masih input-oriented; disarankan bergeser ke indikator outcome (lead, komitmen investasi).
9. Jumlah Kerjasama Investasi yang Ditindaklanjuti (MoU/PKS)
    - Skor: 4–4–4–4–3;
    - Sudah outcome-oriented, perlu definisi "ditindaklanjuti" dan horizon waktu tindak lanjut.
10. Nilai SAKIP/ Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP
    - Skor: 3–4–4–4–3;

- Bisa diperkuat dengan indikator turunan seperti persentase indikator Renstra yang tercapai.

11. Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat/ Sertifikasi Perizinan & Investasi
    - Skor: 4–4–4–4–3;
    - Relevan untuk mendukung pencapaian sasaran; disarankan target kumulatif sampai 2026.
12. Jumlah Pengaduan Terkait Layanan Perizinan yang Diselesaikan
    - Skor: 3–4–4–4–3;
    - Akan lebih SMART jika diubah menjadi rasio dengan batas waktu (*% pengaduan selesai ≤ X hari*).

10.4.3 Ringkasan Temuan SMART

Pada halaman 167 dirangkum:

- Kekuatan utama:
  - Indikator DPMPTSP umumnya relevan (R=4–5) dan terukur (M=4–5) karena langsung mengacu sasaran RPJMD (investasi, kemudahan usaha, reformasi layanan).
  - Indikator outcome kunci (nilai investasi, ketepatan waktu layanan, IKM) sudah jelas satuan dan periodenya.
- Ruang perbaikan:
  - Beberapa indikator masih input-based (jumlah kegiatan promosi, jumlah forum).
  - Dimensi Time-bound (T) umumnya baru di level “pertahun Renstra”; belum ada milestone triwulan/semester.
- Implikasi:
  - Dengan penguatan SMART (terutama Specific, Time-bound, dan orientasi outcome), indikator DPMPTSP akan lebih kuat sebagai IKU pendukung sasaran RPJMD di bidang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan kerja.

10.5. Analisis GAP SMART antara Renstra DPMPTSP dan RPJMD

10.5.1 GAP per Indikator–Sasaran–Program

Bagian **halaman 168–169** memetakan GAP utama antara tuntutan RPJMD dan rumusan Renstra:

1. **Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)**
    - GAP kecil: indikator sudah selaras; namun **target dinilai terlalu konservatif** dibanding potensi kawasan industri Gresik.
    - Dampak: Renstra kurang mendorong percepatan investasi strategis;
    - Rekomendasi: menaikkan target investasi bertahap selaras proyeksi pertumbuhan ekonomi & pengembangan kawasan industri.
2. **Jumlah Izin yang Diterbitkan**
    - GAP pada S & M: indikator hanya menghitung **jumlah izin** tanpa mengukur kualitas pelayanan (lama proses, kepastian, kepuasan).
    - Risiko: bisa terjadi *misleading* – izin banyak tetapi proses lambat dan tidak pasti.
    - Rekomendasi: tambahkan indikator **% izin selesai ≤ SLA**, rata-rata lama penyelesaian, dan/atau IKM perizinan.
3. **Jumlah Kegiatan Promosi Investasi**
    - GAP pada R & result-oriented: indikator terlalu aktivitas-sentris.
    - Dampak: sulit menilai efektivitas promosi terhadap realisasi investasi.
    - Rekomendasi: ubah ke indikator outcome, misalnya jumlah investor potensial yang follow-up, nilai komitmen investasi (MoU), atau konversi promosi → izin berusaha.
4. **Jumlah Perusahaan yang Diawasi (Pengendalian Pelaksanaan Investasi)**
    - GAP pada M & T: tidak jelas kriteria perusahaan sasaran, frekuensi pengawasan, dan standar kepatuhan.
    - Dampak: pengawasan bisa parsial dan tidak fokus pada proyek strategis; sulit melihat tren kepatuhan.
    - Rekomendasi: jadikan persentase perusahaan prioritas yang diawasi minimal 1x/tahun, plus indikator tindak lanjut temuan.

5. Ketersediaan Aplikasi/SI Penanaman Modal
    - GAP pada S & M: indikator hanya "ada/tidak ada aplikasi", tidak mengukur kualitas dan pemanfaatan data.
    - Dampak: aplikasi bisa ada tapi tidak digunakan, data tidak lengkap.
    - Rekomendasi: tambahkan indikator pemanfaatan (jumlah user aktif, frekuensi penggunaan, kelengkapan data).

10.5.2 GAP Agregat: Tabel 10.7

Pada halaman 170–171, disajikan Tabel GAP SMART – DPMPTSP vs RPJMD dan ringkasan:

- Fully aligned (GAP = 0): 2 indikator (25%)
- Minor GAP (1 poin): 3 indikator (37,5%)
- Medium GAP (2 poin): 2 indikator (25%)
- High GAP (≥3 poin): 1 indikator (12,5%)

Mayoritas indikator sudah relevan, namun:

- belum semua mencerminkan *outcome strategis RPJMD*;
- masih kurang kuat dalam menghubungkan kinerja DPMPTSP dengan *kontribusi ekonomi & kualitas investasi* (misalnya rasio investasi terhadap PDRB, kualitas UMKM berizin, daya saing ekonomi lokal).

Akar masalah GAP (hal. 171):

- Indikator fokus pada *output* (jumlah izin, jumlah kegiatan) bukan *outcome* (nilai investasi, kontribusi PDRB, serapan tenaga kerja);
- Pengukuran kinerja belum multi-dimensi (ekonomi, sosial, dan tata kelola);
- Belum ada linkage eksplisit dengan target RPJMD yang terukur (pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kualitas investasi);
- Digitalisasi baru diukur dari sisi "jumlah sistem", bukan produktivitas (kecepatan, adopsi pengguna).

10.6. Prioritas Perbaikan dan Rekomendasi Kebijakan

Tabel **prioritas perbaikan di halaman 171** mengelompokkan area perbaikan sebagai berikut:

10.6.1 Prioritas Tinggi (High Priority)

1. **Rasio Investasi terhadap PDRB**
    - Tambahkan indikator yang menghubungkan langsung investasi dengan pengungkit ekonomi daerah (investasi/PDRB, sektor prioritas).
2. **Kepatuhan Pelaku Usaha**
    - Kembangkan indikator kepatuhan perizinan yang terkait dengan stabilitas usaha dan keberlanjutan investasi (misalnya persentase perusahaan patuh terhadap izin & regulasi lingkungan).

Tujuan utama prioritas tinggi:

Menggeser fokus dari sekadar "melayani izin" menjadi **"menghasilkan investasi berkualitas yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kerja"**.

10.6.2 Prioritas Menengah (Medium Priority)

3. **Jumlah Izin Usaha**
    - Ubah menjadi **outcome-based KPI**, misalnya dikaitkan dengan serapan tenaga kerja, pertumbuhan perusahaan aktif, atau kontribusi sektor prioritas.
4. **UMKM Berizin**
    - Kaitkan dengan **produktivitas UMKM** (pertumbuhan omzet/omset rata-rata, akses pasar, ekspor), bukan hanya jumlah izin.

10.6.3 Prioritas Rendah (Low Priority)

5. **Indikator Pelayanan Digital**
    - Fokus perbaikan tidak lagi pada jumlah sistem, tetapi pada **métrik adopsi pengguna** (persentase permohonan lewat online, rata-rata waktu proses sebelum & sesudah digitalisasi, kepuasan pengguna kanal digital).

10.7. Implikasi Strategis bagi RPJMD 2021–2026 dan Periode Berikutnya

Dari keseluruhan evaluasi, beberapa implikasi strategis dapat diambil:

1. **Renstra DPMPTSP sudah sangat selaras dengan RPJMD** secara struktur (visi–misi–sasaran–program–indikator), sehingga **tidak diperlukan koreksi besar pada alignment**, tetapi perlu **penguatan kualitas indikator dan target**.
2. DPMPTSP adalah **mesin utama percepatan ekonomi daerah** melalui investasi dan kemudahan berusaha. Dengan indikator outcome yang lebih tajam (investasi/PDRB, kualitas investasi, serapan tenaga kerja, kepatuhan), kontribusinya terhadap sasaran makro RPJMD akan lebih terukur.
3. **Transformasi digital layanan perizinan** (OSS–RBA, integrasi dengan sistem daerah) harus berpindah dari sekadar ketersediaan sistem ke **produktivitas sistem** (lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan). Ini sekaligus mendukung agenda *Nawakarsa Gresik* di bidang transformasi pelayanan publik.
4. **Promosi dan pengawasan investasi** perlu dilekatkan pada indikator hasil: komitmen investasi nyata, keberlanjutan investasinya, dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan hanya jumlah kegiatan promosi atau jumlah perusahaan yang diawasi.
5. Hasil analisis ini penting sebagai masukan bagi **penyusunan RPJMD periode berikutnya (2025–2029)**, terutama:
    - Penguatan IKU investasi dan kemudahan usaha berbasis outcome,
    - Integrasi data investasi ke *Satu Data Gresik*,
    - Penajaman sasaran sektor prioritas (industri, logistik, kawasan strategis).

10.8. Kesimpulan Utama

1. **Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026 berada pada kategori "Sangat Kuat"**, dengan skor keseluruhan 90–95%. Seluruh elemen Visi–Misi, Tujuan–Sasaran, Strategi–Program, dan IKD menunjukkan konsistensi yang tinggi.
2. Indikator dan program DPMPTSP telah **secara langsung berkontribusi pada sasaran RPJMD** di bidang investasi, kemudahan usaha, reformasi birokrasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. **Analisis SMART** menunjukkan bahwa mayoritas indikator sudah **relevan dan terukur**, namun masih terdapat ruang perbaikan pada:

- orientasi outcome (bukan sekadar output),
- kedalaman dimensi Time-bound,
- serta kejelasan Achievability berdasarkan kapasitas dan strategi.

4. Analisis GAP mengungkap bahwa sebagian indikator belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi strategis (rasio investasi/PDRB, kualitas investasi, produktivitas UMKM), dan digitalisasi masih diukur dari sisi sistem, bukan dari sisi dampak.
5. Rekomendasi strategis menekankan perlunya:
   - penambahan indikator pengungkit ekonomi,
   - pergeseran KPI dari aktivitas ke outcome,
   - penguatan pengawasan dan kepatuhan investasi,
   - serta pengukuran adopsi dan produktivitas sistem digital perizinan.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, DPMPTSP berpotensi semakin kokoh sebagai aktor kunci percepatan investasi berkualitas dan transformasi layanan perizinan di Kabupaten Gresik, serta menjadi pilar penting dalam mewujudkan "Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan."

BAB XI

Analisis Keterkaitan RENSTRA Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026

11.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memegang peran kunci pada **subsektor kelautan dan perikanan**, yang menyentuh langsung:

- *Ketahanan pangan berbasis protein ikan,*
- *Pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya,*
- *Penguatan ekonomi wilayah pesisir,*
- *Konservasi sumber daya kelautan dan pesisir.*

Pada bagian pendahuluan RENSTRA dinyatakan tegas bahwa dokumen ini adalah:

"penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026…"

Sejak awal, penyusunan RENSTRA ditempatkan sebagai upaya memastikan **konsistensi kebijakan sektor perikanan** dengan arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Visi RPJMD "**Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah**" diterjemahkan di sektor perikanan melalui peran:

- *Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Ikan,*
- *Pengentasan Kemiskinan Pesisir,*
- *Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Yang Berdaya Saing,*
- *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan.*

Karena itu, kualitas keterkaitan RENSTRA Dinas Perikanan dengan RPJMD menjadi kunci agar subsektor ini benar-benar menjadi pengungkit *GO Tani* dan agenda **"Nelayan Gresik Berdaulat"**.

11.2. Tingkat Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD

11.2.1 Hirarki Visi–Misi–Tujuan–Sasaran

Tabel 11.1 di halaman 173 menggambarkan *hirarki perencanaan* dan status keterkaitannya: visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Ringkasannya:

- **Visi**: RPJMD menargetkan Gresik Maju & Berdaya Saing; RENSTRA Dinas Perikanan berkontribusi lewat peningkatan sektor kelautan–perikanan → **status: Selaras**.

- Misi: misi terkait ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat diterjemahkan menjadi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap sebagai sumber ekonomi lokal → Selaras.
- Tujuan: peningkatan ekonomi daerah & ketahanan pangan dioperasionalkan menjadi peningkatan produksi, kualitas hasil perikanan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan → Selaras.
- Sasaran: peningkatan output sektor unggulan diwujudkan melalui sasaran produksi budidaya/tangkap, konsumsi ikan, dan pengelolaan aset kelautan → Selaras, namun indikator masih perlu penguatan.

Kesimpulan: Pada level visi–misi–tujuan–sasaran, RENSTRA Dinas Perikanan selaras kuat dengan RPJMD, meskipun pada level sasaran masih diperlukan penguatan indikator yang lebih mencerminkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

11.2.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Program

Di halaman 14–15 RENSTRA yang diringkas dalam Bab XI, isu strategis yang diidentifikasi antara lain: rendahnya nilai tambah produk perikanan, kualitas SDM nelayan, dan infrastruktur pelabuhan/perizinan yang belum optimal. Semua ini selaras dengan sasaran RPJMD di bidang pertanian luas–ketahanan pangan–ekonomi inklusif.

Program utama yang tercantum (Tabel pada halaman 173–175) antara lain:

- *Pengembangan Budidaya Perikanan,*
- *Pengembangan Perikanan Tangkap Dan Teknologi,*
- *Pengolahan & Pemasaran Hasil Laut (Hilirisasi),*
- *Perlindungan Nelayan Dan Masyarakat Pesisir,*
- *Pengelolaan & Pengawasan Sumber Daya Kelautan–Perikanan.*

Program-program ini di-*mapping* terhadap RPJMD dan dinilai berkorelasi sangat kuat dengan penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, modernisasi usaha perikanan, peningkatan nilai tambah & ekspor, serta pengurangan kemiskinan pesisir.

11.2.3 Penilaian Konsistensi Menyeluruh

Tabel 11.2 di halaman 174 memberi penilaian tingkat konsistensi:

- Visi–Misi: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Sangat Kuat)
- Sasaran Kinerja: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ (Kuat)
- Program: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Sangat Kuat)
- Indikator: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ (Kuat, indikator sudah selaras namun butuh penguatan hilirisasi)
- Strategi Kebijakan: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Sangat Kuat, mengikuti arahan kepala daerah)

Dari sini simpulan awal Bab XI menyatakan bahwa **RENSTRA Dinas Perikanan 2021–2026 memiliki keterkaitan "sangat kuat" dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026** dan telah:

- *Menurunkan Visi–Misi RPJMD Ke Tujuan Sektoral,*
- *Menyelaraskan Sasaran Pembangunan Pesisir–Kelautan,*
- *Mewajibkan Program UPT, Budidaya, Hilirisasi, Dan Kesejahteraan Nelayan.*

11.3. Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja

11.3.1 Indikator Utama

RENSTRA Dinas Perikanan mengusung indikator utama:

- *Produksi Perikanan Budidaya (Persentase Dan Volume),*
- *Produksi Perikanan Tangkap,*
- *Produktivitas Lahan Tambak (Air Payau & Tawar),*
- *Nilai Komoditas Unggulan Perikanan,*
- *Persentase Peningkatan Luas Kawasan Pesisir Yang Direhabilitasi,*
- *Angka Konsumsi Ikan Per Kapita.*

Seluruh indikator tersebut adalah elaborasi indikator RPJMD terkait ketahanan pangan dan ekonomi berbasis potensi kelautan–perikanan, sehingga keterkaitannya dinilai kuat.

11.3.2 Area Alignment dan Potensi GAP

Tabel 11.3 di halaman 175 merangkum area yang sudah selaras dan GAP yang muncul:

- *Produksi budidaya & tangkap → indikator & target sudah tersedia, namun baseline per komoditas belum lengkap.*

- *Ketahanan pangan–konsumsi ikan → indikator sejalan RPJMD, tetapi program edukasi dan pemasaran belum terstruktur kuat.*
- *Pemberdayaan pelaku usaha perikanan → ada beberapa kegiatan, namun belum menjadi indikator kinerja utama.*
- *Pengawasan & kelestarian lingkungan pesisir → sudah ada indikator rehabilitasi, tetapi butuh data spasial dan deret waktu yang lebih rinci.*
- *Kontribusi ekonomi wilayah pesisir → terkait sasaran RPJMD, tetapi belum ada indikator nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja perikanan.*

Kesimpulan:

Secara umum selaras, tetapi indikator turunan yang mencerminkan UMKM/IKM olahan, tenaga kerja perikanan, dan nilai tambah ekonomi masih belum eksplisit.

4. Evaluasi Program terhadap RPJMD dan Rekomendasi Penguatan

Tabel 11.4 (hal. 175) mengevaluasi program RENSTRA terhadap RPJMD:

- *Pengembangan Budidaya Perikanan → kesesuaian tinggi, namun disarankan fokus pada komoditas unggulan daerah.*
- *Pengembangan Perikanan Tangkap → kesesuaian tinggi, perlu indikator efisiensi armada dan SDM.*
- *Pengelolaan & Pengawasan SD Perikanan → kesesuaian sedang, karena belum bertransformasi ke smart monitoring.*
- *Peningkatan Konsumsi Ikan & Pengolahan Hasil → kesesuaian tinggi, perlu indikator hilirisasi industri olahan.*
- *Dukungan Sarpras Perikanan → kesesuaian tinggi, perlu sinkron dengan pengembangan kawasan pesisir strategis.*

Tabel 11.5 (hal. 176) kemudian memberi rekomendasi penguatan: baseline & target harus lengkap, indikator nilai tambah UMKM/IKM hasil perikanan perlu ditambahkan, indikator sertifikasi nelayan/pembudidaya, indikator spasial pesisir, dan pengembangan e-monitoring & e-traceability hasil perikanan.

11.5. Hasil Analisis SMART: Indikator, Sasaran, dan Program

11.5.1 SMART per Sasaran–Indikator (Ringkasan)

Tabel 11.3 dan matriks di halaman 176–177 mengevaluasi indikator RENSTRA dengan skala SMART (5 = Strong, 3 = Medium, 1 = Weak):

- **Produksi perikanan tangkap (volume, ton)** → Skor 24 (Strong).
- **Produksi perikanan budidaya (ton)** → Skor 24 (Strong), selaras dengan agenda *minapolitan*.
- **Kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan/NTP)** → Skor 20 (Medium–Strong), namun baseline dan target belum presisi.
- **Pengawasan SDI (jumlah operasi & kepatuhan)** → Skor 19 (Medium–Strong), integrasi data pusat–daerah perlu diperjelas.
- **Layanan perizinan kapal ikan (waktu proses)** → Skor 18 (Medium), indikator tidak eksplisit di RPJMD perikanan dan dinilai kurang relevan.
- **Diversifikasi hasil perikanan (jumlah UMKM/produk olahan)** → Skor 19 (Medium–Strong), baik namun target belum jelas.

Rekapitulasi SMART menunjukkan:

- **33% indikator** berada pada kategori **Strong (≥22)**,
- **50% pada Medium–Strong (19–21)**,
- **17% pada Medium (15–18)**,
- **0% yang Weak (<15)**.

Artinya, **tidak ada indikator yang benar-benar lemah**, namun sebagian masih perlu penguatan aspek baseline, outcome ekonomi, dan relevance terhadap RPJMD.

11.5.2 Analisis SMART Mendalam per Sasaran

Pada bagian **11.8 dan 11.9 (hal. 183–187)** dilakukan pembacaan SMART lebih rinci:

1. **Sasaran 1 – Peningkatan produksi & produktivitas perikanan budidaya dan tangkap**
    - % peningkatan produksi budidaya → Skor 5 (sangat SMART).
    - % peningkatan produksi tangkap → Skor 4 (target realistis namun perlu penguatan strategi armada).
    - Volume produksi komoditas unggulan (udang, bandeng, kerapu, nila) → Skor 5 (indikator paling kuat).

2. Sasaran 2 – Pemanfaatan sumber daya kelautan optimal & berkelanjutan
    - % peningkatan luas ekosistem pesisir direhabilitasi → Skor 4 (sudah baik, tetapi satuan luas teknis belum detail).
    - % kepatuhan pengawasan usaha perikanan → Skor 4–5 (strategis bagi keberlanjutan).
3. Sasaran 3 – Kecukupan konsumsi protein hewani dari ikan
    - Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) → Skor 4; indikator kuat, tetapi **ambisi target relatif rendah** (kenaikan kecil).
4. Hilirisasi
    - % produk perikanan yang diolah & dipasarkan → Skor 4 (cukup baik, namun target peningkatan nilai tambah masih konservatif).

Rata-rata skor SMART indikator perikanan ≈ **4,4 (SMART "Baik" dan selaras RPJMD)**.

11.6. Analisis GAP SMART dan Keterbatasan Utama

11.6.1 GAP Utama yang Diidentifikasi

Tabel 11.4 dan 11.8–11.9 menyoroti GAP berikut:

1. *Baseline & target indikator kesejahteraan nelayan (NTP) belum lengkap* → menyulitkan pengukuran outcome sosial dan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan pesisir.
2. *Indikator layanan perizinan kapal tidak langsung terkait sasaran RPJMD perikanan* → urusan perizinan kapal lebih tepat menjadi domain OPD lain (misal DPMPTSP); berisiko mengaburkan peran sektor perikanan.
3. *Integrasi data pengawasan sumber daya ikan (SDI) belum jelas* → perbedaan data antara pusat (KKP) dan daerah; menurunkan validitas indikator konservasi.
4. *Diversifikasi produk tidak punya indikator nilai tambah* → indikator hanya menghitung jumlah UMKM/produk olahan, belum mengukur kontribusi ekonomi (omzet, ekspor, serapan tenaga kerja).
5. *Tidak adanya indikator eksplisit untuk investasi dan akses pasar perikanan* → padahal GO Tani dan Misi Ekonomi Inklusif sangat membutuhkan percepatan investasi dan penguatan rantai nilai perikanan.

11.6.2 GAP Visi–Misi–Sasaran dan Program

Pada **subbab 11.7.2–11.7.4 (hal. 180–182)**, analisis GAP memperlihatkan bahwa:

- Tagline **"Nelayan Gresik Berdaulat"** belum muncul eksplisit dalam rumusan visi sektor.
- Sasaran utama RPJMD (kesejahteraan, produksi, pemasaran) dalam RENSTRA masih lebih menonjol sebagai **pelayanan teknis** (pengawasan, pelelangan) ketimbang outcome kesejahteraan.
- Program prioritas RPJMD (perikanan tangkap, budidaya, pengawasan SDI, pengolahan & pemasaran) memang ada dalam RENSTRA, tetapi **target kinerja, baseline, dan ukuran output/outcome belum selalu dirinci**.

GAP tambahan:

- Belum ditemukan tabel indikator yang langsung menautkan indikator Renstra ke indikator RPJMD,
- Baseline & target tahunan tidak selalu teridentifikasi secara penuh untuk periode 2021–2026,
- Indikator masih cenderung **input/proses** (pelayanan UPT) dan belum sepenuhnya outcome.

11.7. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Kebijakan

11.7.1 Problem–Solution RENSTRA Dinas Perikanan

Tabel 11.10 (hal. 190–191) merinci 8 GAP utama beserta akar masalah dan solusi kebijakan. Beberapa yang paling strategis:

1. **Relevansi indikator kontribusi ekonomi masih lemah (High Priority)**
    - Problem: indikator produksi belum menggambarkan nilai tambah dan kesejahteraan nelayan.
    - Solusi: program hilirisasi (olah hasil, cold storage, pemasaran) dan indikator nilai tambah.
2. **Baseline data belum lengkap (High Priority)**
    - Problem: banyak indikator tidak punya baseline dan SOP pengukuran jelas.
    - Solusi: penyusunan baseline, *quality assurance* data, dan pengembangan **Satu Data Perikanan**.
3. **Indikator hanya fokus level produksi (Medium Priority)**
    - Problem: tidak ada indikator ekspor, sertifikasi, atau akses pasar.

- Solusi: indikator UMKM perikanan naik kelas, ekspor, kemitraan bisnis.

4. Budidaya belum adaptif perubahan iklim (Medium Priority)
   - Solusi: *green aquaculture*, biosecurity, dan sertifikasi budidaya berkelanjutan.
5. Pengawasan dan illegal fishing belum terukur outcome-nya (Medium Priority)
   - Solusi: indikator kepatuhan dan pemulihan stok ikan.
6. Kesejahteraan nelayan belum diukur eksplisit (High Priority)
   - Solusi: menambah indikator TPT pesisir dan pendapatan rumah tangga nelayan.
7. Digitalisasi UMKM perikanan belum terprogram (Medium Priority)
   - Solusi: pengembangan *e-marketplace*, *traceability system*, dan integrasi dengan ekonomi digital.
8. Mitigasi risiko bencana pesisir belum terintegrasi (Low Priority)
   - Solusi: program keselamatan pelayaran dan *early warning system* bersifat bertahap.

11.7.2 Prioritas Arah Perbaikan

Ringkasan prioritas (hal. 191):

- High Priority
  - Penguatan indikator kesejahteraan nelayan (pendapatan & kemiskinan pesisir),
  - Penyusunan baseline & tata kualitas data,
  - Pengembangan hilirisasi hasil perikanan.
- Medium Priority
  - Green aquaculture,
  - Digitalisasi pemasaran (e-commerce hasil perikanan),
  - Pengawasan sumber daya kelautan.
- Low Priority
  - Mitigasi bencana pesisir (dilakukan bertahap sesuai kapasitas).

11.8. Kesimpulan Utama

1. Tingkat Keterkaitan Tinggi dan Konsisten

   RENSTRA Dinas Perikanan 2021–2026 sangat selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026: visi–misi, tujuan–sasaran, isu strategis, dan program utama (budidaya, tangkap, pengawasan SDI, pengolahan & pemasaran) menunjukkan hubungan langsung dengan sasaran *GO Tani* dan agenda Nelayan Gresik Berdaulat.

2. Indikator Kinerja Sudah SMART dan Relevan, tetapi Belum Sepenuhnya Outcome-Based
   Rata-rata skor SMART indikator berada pada kategori **Strong (≈4,4)**. Indikator produksi budidaya, produksi tangkap, rehabilitasi pesisir, dan konsumsi ikan dirumuskan dengan baik. Namun, indikator terkait **kesejahteraan nelayan, nilai tambah, investasi, dan pasar** masih dominan output dan belum mengekspresikan outcome ekonomi & sosial secara kuat.
3. GAP Utama: Baseline, Nilai Tambah Ekonomi, dan Kesejahteraan Nelayan
   Kelemahan terbesar terletak pada ketiadaan indikator eksplisit untuk **pendapatan nelayan, kemiskinan pesisir, nilai tambah olahan, dan investasi perikanan**, serta baseline data yang belum lengkap. Hal ini berisiko membuat kontribusi sektor perikanan terhadap target RPJMD (khususnya penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi pesisir) tidak sepenuhnya terbaca.
4. Problem–Solution Menunjukkan Arah Penguatan Kebijakan yang Jelas
   Dokumen telah mengidentifikasi problem, akar masalah, dan solusi kebijakan yang realistis: mulai dari hilirisasi dan digitalisasi hasil perikanan, penguatan pengawasan sumber daya, green aquaculture, hingga Satu Data Perikanan. Jika dijalankan konsisten, langkah ini dapat mendorong sektor perikanan menjadi **pengungkit ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan**.
5. Rekomendasi Kunci untuk Penyempurnaan Renstra & RPJMD ke Depan
   - Menjadikan **indikator kesejahteraan nelayan dan nilai tambah perikanan** sebagai IKU utama, berdampingan dengan indikator produksi.
   - Menyempurnakan baseline & target tahunan 2021–2026, dengan integrasi ke sistem Satu Data.
   - Mempertegas peran perikanan dalam **investasi, ekspor, dan ekonomi wilayah pesisir**.
   - Mendorong integrasi program hilirisasi, green aquaculture, dan ekonomi digital sebagai agenda utama lima tahun ke depan.

Dengan penguatan tersebut, Dinas Perikanan berpotensi menjadi **aktor strategis** dalam mewujudkan **ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan ekonomi pesisir yang berdaya saing**, sejalan dengan visi besar **"Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan."**

BAB XII

Analisis Keterkaitan Renstra DISPAREKRAFBUDPORA dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026

12.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DISPAREKRAFBUDPORA

DISPAREKRAFBUDPORA (pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga) adalah perangkat daerah yang memegang peran strategis pada empat simpul pembangunan RPJMD:

1. *Penggerak Ekonomi Baru Melalui Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif,*
2. *Penjaga Identitas Dan Karakter Daerah Melalui Pelestarian Budaya,*
3. *Penguat Kualitas SDM Melalui Kepemudaan Dan Olahraga,*
4. *Pencipta Lapangan Kerja Melalui Aktivitas Wisata Dan Ekraf.*

Pada bagian awal Bab XII ditegaskan bahwa seluruh analisis keterkaitan dilakukan dalam kerangka Evaluasi Dokumen Implementasi RPJMD 2021–2026 untuk rumpun perekonomian dan SDA, sehingga Renstra DISPAREKRAFBUDPORA tidak berdiri sendiri, melainkan instrumen pelaksana misi 3, 4, dan 5 RPJMD.

Dengan demikian, kualitas alignment Renstra terhadap RPJMD akan menentukan seberapa besar sektor pariwisata–ekraf–budaya–pemuda–olahraga benar-benar menjadi motor kemandirian ekonomi, penguatan SDM, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

12.2. Tingkat Keterkaitan Renstra terhadap RPJMD

12.2.1. Keterkaitan terhadap Visi RPJMD

Visi RPJMD:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.”

Analisis di **halaman 196** menegaskan bahwa subsektor pariwisata, seni budaya, pemuda, dan olahraga:

- **meningkatkan daya saing daerah** (melalui destinasi dan event),
- **menambah kesejahteraan** (melalui devisa wisata, ekraf, dan lapangan kerja),
- **menguatkan identitas budaya religius–akhlakul karimah** (melalui cagar budaya dan event berbasis nilai keagamaan).

Hasil penilaian: **"Selaras kuat"** dengan visi RPJMD.

12.2.2. Keterkaitan terhadap Misi RPJMD

Tabel pada **halaman 196** memetakan secara eksplisit keterkaitan dengan **tiga misi RPJMD**:

- **Misi 3 – Ekonomi Seimbang & Mandiri**
  - Tujuan: menurunkan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
  - Kontribusi DISPAREKRAFBUDPORA: pengembangan **ekonomi kreatif** dan **destinasi wisata**, termasuk Bawean dan wisata kota.
- **Misi 4 – SDM Unggul & Akhlakul Karimah**
  - Tujuan: meningkatkan kualitas manusia.
  - Kontribusi: pembinaan pemuda, pengembangan talenta olahraga, dan pelestarian budaya sebagai media pembentukan karakter.
- **Misi 5 – Kesejahteraan Sosial**
  - Tujuan: terserapnya tenaga kerja warga Gresik.
  - Kontribusi: pembukaan kesempatan kerja langsung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kesimpulan sub-bab: kontribusi DISPAREKRAFBUDPORA **kuat** pada misi 3–5, terutama sebagai penggerak **ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga**.

12.2.3. Keterkaitan terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada **halaman 196–197**, sasaran RPJMD yang secara langsung dikaitkan dengan Renstra antara lain:

- **Penguatan ekonomi inklusif dan seimbang** → didukung oleh peningkatan jumlah pengunjung wisata & pengembangan pelaku ekraf,
- **Peningkatan nilai budaya dan karakter masyarakat** → didukung oleh pelestarian cagar budaya dan event seni budaya,
- **Penguatan pemuda dan olahraga daerah** → didukung oleh peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi kepemudaan,
- **Perluasan lapangan kerja** → didukung oleh perluasan usaha ekraf dan kerja sama sektor pariwisata.

Catatan penting dalam tabel: **"Semua sasaran yang bersinggungan diakomodasi dalam Renstra"**, meskipun sebagian kontribusi bersifat **tidak langsung** (terutama terkait lapangan kerja).

12.2.4. Keterkaitan terhadap Program Prioritas RPJMD

Pada **halaman 197**, pemetaan program Renstra terhadap prioritas RPJMD menunjukkan:

Area Program DISPAREKRAFBUDPORA	Status terhadap RPJMD
Pengembangan destinasi wisata	✓ Mendukung prioritas daerah
Pengembangan ekonomi kreatif	✓ Mendukung prioritas unggulan
Pelestarian kebudayaan & cagar budaya	✓ Selaras Misi 4
Kepemudaan & organisasi kepemudaan	✓ Mendukung peningkatan kualitas SDM
Olahraga prestasi & rekreasi	✓ Mendukung kesejahteraan sosial

Tidak ditemukan program yang bertentangan dengan RPJMD.

Ringkasan rating konsistensi di kotak pada halaman 197–198:

- Kesesuaian visi–misi: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (sangat selaras),
- Dukungan sasaran RPJMD: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ (butuh indikator lebih tajam untuk nilai budaya & ekraf),
- Koherensi program: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (jelas mendukung prioritas daerah),
- Kelengkapan indikator kinerja: ⭐ ⭐ ⭐ ☆ (beberapa target perlu lebih terukur & komparatif),
- *Tingkat konsistensi keseluruhan: 88% – "Sangat Kuat."*

12.3. Analisis Keterkaitan Renstra – RPJMD secara Rinci

12.3.1. Ruang Lingkup Analisis dan Pemetaan Misi

Di **halaman 200**, ruang lingkup analisis dibagi ke tiga elemen utama Renstra: sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan – semuanya dipetakan ke tujuan & sasaran RPJMD Bab IV–VI.

Pemetaan Misi RPJMD ke tugas OPD:

- **Misi 3 – Ekonomi Inklusif & Pariwisata** → pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif,

- Misi 4 – SDM Unggul & Berakhlakul Karimah → pengembangan kebudayaan dan pembinaan pemuda,
- Misi 5 – Kesejahteraan Sosial → penciptaan aktivitas wisata, event, dan lapangan kerja baru.

Kesimpulan di kotak: "*Seluruh aspek kewenangan OPD masuk dalam payung kebijakan RPJMD.*"

12.3.2. Matriks Keterkaitan Sasaran Renstra vs RPJMD

Pada tabel di halaman 200, sasaran Renstra dan level keterkaitan dinilai sebagai berikut:

- Meningkatnya kunjungan wisata → sangat selaras dengan sasaran RPJMD bidang ekonomi,
- Meningkatnya pelaku ekraf naik kelas → selaras dengan sasaran UMKM & ekraf,
- Terjaganya warisan budaya daerah → sangat selaras dengan sasaran RPJMD SDM–keagamaan,
- Meningkatnya prestasi pemuda & olahraga → selaras dengan sasaran penguatan SDM.

Catatan penting: belum muncul indikator pariwisata sebagai "growth driver" (misalnya kontribusi PDRB pariwisata), sehingga membuka ruang perbaikan ke depan.

12.3.3. Keterkaitan IKU dan Program

Pada halaman 201, beberapa IKU kunci Renstra dikaitkan dengan RPJMD:

- Pertumbuhan kunjungan wisatawan → indikator ekonomi inklusif → *match kuat*,
- Persentase kekayaan budaya yang dilestarikan → indikator pembangunan manusia → *match kuat*,
- Persentase pemuda berprestasi → indikator SDM unggul → *match sedang* karena definisi berbeda.

Semua program utama – pengembangan destinasi wisata, penguatan ekraf, pelestarian kebudayaan lokal, pembinaan kepemudaan dan olahraga – dinyatakan inline dengan arah kebijakan RPJMD, dengan kesimpulan:

- Sasaran: 100% selaras,
- Program: 100% selaras,
- Indikator: ±80% selaras (perlu pemutakhiran),
- Terminologi & definisi output–outcome: perlu sedikit penyesuaian.

12.4. Hasil Analisis SMART Indikator

12.4.1. SMART Pariwisata, Ekraf, Budaya, Pemuda & Olahraga

Tahap 2 Analisis SMART di halaman 206 menilai beberapa indikator utama dengan skala 1–5:

- Jumlah kunjungan wisatawan
  - *S=5, M=4, A=4, R=5, T=4 → rata-rata 4,4 (**Strong**), terukur dan sangat relevan dengan misi ekonomi.*
- Jumlah event budaya
  - Skor rata-rata 4,0 (Strong), namun baseline rinci belum sepenuhnya jelas.
- Jumlah pelaku ekraf tersertifikasi
  - *Skor 3,6 (**Medium–Strong**), karena sertifikasi sangat bergantung pada dukungan pusat dan akses pelaku.*
- Jumlah atlet berprestasi
  - *Skor 3,4 (**Medium**), indikator ada, tetapi belum sepenuhnya menangkap dimensi pembinaan jangka panjang.*
- Indeks Pembangunan Pemuda (proxy)
  - *Skor 3,2 (**Medium**), baseline dan satuan belum konsisten.*

Di sub-bab keolahragaan (halaman 212–215), indikator olahraga wisata, sarpras, dan kerja sama juga dianalisis SMART:

- *Jumlah Partisipan Olahraga Wisata* → 4,2 (Strong),
- *Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata* → 4,0 (Strong tetapi sangat administratif),
- *Persentase Cabang Olahraga Berprestasi* → 4,8 (indikator paling kuat),
- *Sarpras Olahraga Yang Terpelihara* → 4,0,
- *Peserta Olahraga Rekreasi* → 3,8,
- *Dokumen Kerja Sama Keolahragaan* → 3,4.

Kesimpulan SMART:

- *Indikator pariwisata dan budaya kuat & relevan,*
- *Indikator ekraf dan kepemudaan cukup baik tetapi belum optimal (Medium–Strong),*
- *Indikator olahraga sangat kuat di aspek prestasi, namun indikator sosial–ekonomi (sport for all, sport tourism) masih terbatas.*

12.5. Analisis GAP Keterkaitan dan SMART

12.5.1. Pre-GAP Summary: Ekonomi & Outcome

Pada halaman 199, ringkasan GAP awal menyoroti lima area:

1. *Ekonomi & tenaga kerja – tidak ada indikator spesifik penyerapan kerja di pariwisata/ekraf → kontribusi ekonomi tidak terbuka secara angka.*
2. *Pariwisata – belum ada indikator belanja wisatawan atau length of stay → outcome ekonomi wisata kurang terukur.*
3. *Ekonomi kreatif – tidak ada baseline digitalisasi ekraf → transformasi digital tidak dapat dimonitor.*
4. *Olahraga – fokus pada prestasi, kurang indikator rekreasi & sport tourism.*
5. *Kebudayaan – indikator kuantitatif tinggi (jumlah event/dokumen), kualitas dan dampak budaya tidak diukur.*

Diarahkan kebutuhan indikator ekonomi tambahan: nilai tambah ekraf, lapangan kerja sektor wisata & ekraf, dan pendapatan daerah dari pariwisata.

12.5.2. GAP Struktural antara RPJMD dan Renstra

Matriks problem–solution di halaman 208–209 mengidentifikasi 10 GAP struktural, di antaranya:

- *Rumusan sasaran Renstra tidak selalu menyalin rumusan sasaran RPJMD → menyulitkan pembacaan keterkaitan eksplisit.*
- *Indikator pariwisata Renstra belum sepenuhnya "mirror" indikator RPJMD (beda formula/satuan).*
- *Dimensi ekonomi kreatif UMKM belum eksplisit dikaitkan dengan sasaran kemandirian ekonomi inklusif.*
- *Pelestarian kebudayaan belum dikaitkan langsung dengan aspek toleransi dan karakter akhlakul karimah.*
- *Kepemudaan lebih menonjolkan prestasi daripada partisipasi dan kemandirian ekonomi pemuda.*
- *Olahraga fokus prestasi, belum cukup menegaskan fungsi kesehatan masyarakat (sport for all).*

- *Sebagian target belum sepenuhnya SMART (Achievable & Time-bound terhadap target RPJMD).*
- *Linkage eksplisit program Renstra dengan program prioritas RPJMD belum selalu tertulis (misal label Nawakarsa).*
- *Indikator lintas urusan (wisata–budaya–pemuda–olahraga) masih silo, belum banyak kolaborasi event terintegrasi.*
- *Dokumentasi alasan pemilihan indikator RPJMD yang diadopsi dalam Renstra belum ditulis eksplisit.*

12.5.3. GAP SMART vs Target RPJMD

Tabel GAP SMART di **halaman 206** merangkum perbedaan antara yang diminta RPJMD dan kondisi Renstra:

- **Kunjungan wisatawan** → RPJMD menghendaki pertumbuhan signifikan destinasi unggulan, sementara target Renstra relatif moderat (±10%/tahun) karena promosi masih lemah.
- **Ekonomi kreatif** → RPJMD menekankan inovasi & sertifikasi luas, namun baru sebagian kecil pelaku yang tersertifikasi (akses pelatihan dan inkubasi terbatas).
- **Prestasi olahraga** → RPJMD menginginkan pembinaan atlet berkelanjutan; di Renstra event belum konsisten sehingga capaian fluktuatif.
- **Budaya** → RPJMD mendorong event unggulan regional; Renstra masih banyak event lokal dengan dampak belum merata dan keterhubungan destinasi budaya yang kurang.

12.6. Problem–Solution dan Prioritas Implementasi

12.6.1. Matriks Problem–Solution Sektoral

Pada **tahap 4 dan 5 (halaman 207–208 serta 210)**, dokumen menyusun **problem–solution matrix** dan skor prioritas:

Contoh problem–solution utama:

- **Target wisata kurang agresif**
    - *Problem: promosi belum digital, branding Gresik belum kuat.*
    - *Solusi: digital tourism marketing, kolaborasi industri, pengembangan MICE & event nasional.*

- *Program: Pemasaran Pariwisata.*
- *Prioritas: **High**.*

- Ekraf belum tersertifikasi masif
  - *Problem: SDM kreatif belum sesuai standar industri, akses sertifikasi & inkubasi minim.*
  - *Solusi: inkubator ekraf, sertifikasi kompetensi, akses pasar digital.*
  - *Program: Pengembangan Ekraf.*
  - *Prioritas: **High**.*
- Prestasi olahraga fluktuatif
  - *Problem: pembinaan tidak berjenjang, kurikulum pembinaan tidak merata.*
  - *Solusi: liga lokal, talent scouting, pendekatan sport science.*
  - *Prioritas: **Medium**.*
- Budaya belum menjadi unggulan
  - *Problem: event tidak terklasterisasi, kurang paket wisata budaya.*
  - *Solusi: kurasi event unggulan, integrasi destinasi budaya dengan pariwisata dan ekraf.*
  - *Prioritas: **Medium**.*

Ringkasan prioritas implementasi (halaman 207):

- Wisata (kunjungan) & Ekraf → High Priority,
- Olahraga & Kebudayaan → Medium Priority,
- Kepemudaan → Medium–Low (lebih ke penguatan kolaborasi komunitas).

12.6.2. Problem–Solution Lintas Isu dan Koordinasi

Tabel 12.6 di halaman 210 menambahkan dimensi lintas OPD:

- Kontribusi sektor pariwisata ke PDRB belum selaras target RPJMD → butuh penguatan destinasi prioritas, infrastruktur, promosi digital, dan event nasional.
- Pelestarian budaya belum terukur → solusi *cultural mapping* dan revitalisasi budaya berbasis komunitas.
- Ekonomi kreatif belum measurable di RPJMD → perlu indikator nilai tambah ekraf dan basis data UMKM–ekraf.

- **Program kepemudaan belum mengarah ke indikator ketenagakerjaan** → perlu youth entrepreneurship dan pelatihan kompetensi.
- **Olahraga belum dikaitkan dengan sport industry** → perlu event sport tourism.
- **Kurang sinergi lintas OPD untuk ikon pariwisata "Gresik Baru"** → perlu *joint budgeting* dan co-branding.
- **Indikator layanan publik belum SMART** → perlu revisi IKU/IKD berbasis baseline & benchmark.

Kesimpulan umum (halaman 211): terdapat 3 GAP kritis di pariwisata & ekraf, 2 GAP sasaran layanan publik, dan 1 GAP koordinasi lintas sektor yang perlu segera dibenahi.

12.7. Implikasi Strategis dan Rekomendasi Kunci

Berdasarkan keseluruhan analisis, implikasi strategis dan rekomendasi utama adalah:

1. **Konsistensi dokumen sudah tinggi, namun orientasi outcome ekonomi perlu dipertajam.**
   Renstra sangat kompatibel dengan RPJMD, tetapi indikator masih dominan **output** (kunjungan, event, dokumen), belum sepenuhnya menggambarkan **nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, dan kontribusi PDRB** sektor wisata–ekraf.
2. **Pariwisata dan ekraf perlu dijadikan "growth engine" yang terukur.**
   Diperlukan indikator tambahan:
   - kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif,
   - jumlah dan kualitas lapangan kerja sektor wisata/ekraf,
   - belanja wisatawan dan *length of stay*,
   - nilai transaksi ekraf (online maupun offline).
3. **Digital tourism dan branding "Gresik Baru" perlu didorong agresif.**
   - Penguatan promosi digital terintegrasi (website, media sosial, marketplace wisata),
   - *Branding* kota budaya–religi–maritim, termasuk Bawean sebagai **prime destination**,
   - *Event calendar* tahunan yang konsisten dan bisa dijual secara nasional/internasional.

4. Kepemudaan dan olahraga perlu geser dari prestasi semata menuju pemberdayaan & sport tourism.
    - Indikator baru: wirausaha muda, penyerapan kerja pemuda, partisipasi pemuda dalam organisasi.
    - Pengembangan sport tourism dan industri olahraga, bukan hanya medali.
5. Pelestarian budaya harus ditautkan dengan toleransi, kohesi sosial, dan city branding.
    - Indikator kualitas: indeks pelestarian budaya, tingkat partisipasi komunitas, pengakuan nasional/internasional (UNESCO).
6. Penguatan koordinasi lintas OPD dan integrasi indikator.
    - Program wisata–budaya–ekraf–pemuda–olahraga harus semakin banyak didesain sebagai event terpadu,
    - Perlu *joint budgeting* proyek prioritas (misalnya event besar Bawean, festival kota, sport tourism).

12.8. Kesimpulan Utama

1. Tingkat keterkaitan Renstra DISPAREKRAFBUDPORA dengan RPJMD 2021–2026 berada pada kategori “Sangat Kuat” dengan skor konsistensi sekitar 88%, dan lebih dari 70% indikator Renstra telah selaras langsung dengan RPJMD.
2. Keterkaitan paling kuat terlihat pada pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan, sementara kepemudaan dan olahraga berada pada kategori keterkaitan sedang–kuat karena indikatornya masih perlu dipertajam.
3. Analisis SMART menunjukkan bahwa mayoritas indikator sudah cukup kuat (rata-rata 3,6–4,4), terutama kunjungan wisata, pelestarian budaya, dan prestasi olahraga. Namun, masih terdapat indikator dengan skor Medium yang bersifat administratif (dokumen, jumlah kegiatan) dan belum outcome-based.
4. GAP utama terletak pada:
    - belum adanya indikator eksplisit untuk nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi PDRB sektor wisata–ekraf,
    - indikator kepemudaan dan olahraga yang cenderung fokus prestasi, belum pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,

- lemahnya baseline dan integrasi data digital (ekraf, pariwisata, sport tourism), serta koordinasi lintas OPD.

5. Problem–solution matrix dan prioritas implementasi sudah memberikan arah yang jelas: menguatkan promosi digital, inkubasi dan sertifikasi ekraf, pembinaan olahraga berjenjang, kurasi event budaya unggulan, dan sport tourism – yang jika dijalankan konsisten akan memperbesar kontribusi DISPAREKRAFBUDPORA terhadap target RPJMD pada misi ekonomi, SDM, dan kesejahteraan sosial.

Dengan penyempurnaan indikator dan penguatan program berbasis outcome tersebut, DISPAREKRAFBUDPORA berpotensi menjadi aktor kunci dalam mewujudkan Gresik sebagai daerah wisata–ekraf yang berdaya saing, berbudaya kuat, serta memiliki generasi muda dan masyarakat yang sehat, kreatif, dan sejahtera sesuai arah besar RPJMD 2021–2026.

BAB XIII
Analisis dan Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029

13.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup Evaluasi

Bab XIII ini memuat **analisis menyeluruh** terhadap desain RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, dengan fokus pada:

1. *Keterkaitan vertikal antara RPJMD Gresik dan RPJMD Provinsi Jawa Timur (sinkronisasi pusat–provinsi–kabupaten).*
2. *Kesesuaian program dengan kebijakan RPJMD, termasuk Nawakarsa, mandatory spending, dan struktur urusan perangkat daerah.*
3. *Efektivitas desain program melalui analisis:*
    - *Keterhubungan kebijakan → prioritas → program → indikator → pagu.*
    - *Analisis kuantitatif per-bidang urusan.*
    - *SMART analysis (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).*
4. *GAP analysis untuk mengidentifikasi kelemahan strategis dan merumuskan rekomendasi perbaikan.*

Dokumen ini mengevaluasi *bukan hanya daftar program*, tetapi juga *daya dorongnya* terhadap sasaran RPJMD dan kontribusinya pada sasaran Provinsi Jawa Timur.

13.2. Keterkaitan RPJMD Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

13.2.1. Selarasnya Visi dan Peran Wilayah

Visi RPJMD Jawa Timur 2025–2029:

“Menuju Masyarakat Jawa Timur Maju, Adil, Makmur dan Berkelanjutan”

Visi RPJMD Gresik 2025–2029:

“*Gresik Maju Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat*”

Dari **tabel pada halaman 216**, jelas bahwa:

- *Provinsi menempatkan Gresik sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi industri–maritim Jawa Timur.*
- *RPJMD Gresik menegaskan posisi sebagai “Pusat Pertumbuhan” di kawasan Gerbangkertosusila (metropolitan Jatim).*

Kesimpulan: *Visi Gresik **selaras langsung** dengan visi Jatim, bahkan **menguatkan fokus provinsi** pada industri, pelabuhan, dan maritim.*

13.2.2. Integrasi Misi Pembangunan (Top–Down Policy Alignment)

Tabel "*Nawa Bhakti Satya RPJMD Jatim → 5 Misi RPJMD Gresik*" (halaman 216–217) menunjukkan pemetaan langsung:

- Jatim Cerdas & Sehat → Misi 1: SDM Unggul
  - Pendidikan & kesehatan inklusif, fokus kelompok miskin dan perempuan.
- Jatim Kerja & Jatim Sejahtera → Misi 2 (Ekonomi Berbasis Potensi Lokal) dan Misi 5 (Lapangan Kerja)
  - Integrasi industri, UMKM, dan ekonomi desa untuk menciptakan peluang kerja.
- Jatim Akses → Misi 3: Infrastruktur Terintegrasi
  - Konektivitas jalan strategis, transportasi kawasan industri–pelabuhan.
- Jatim Agro → Misi 2: Pertanian–Perikanan
  - Hilirisasi agropolitan & minapolitan sebagai basis ketahanan pangan.
- Jatim Lestari → Misi 3: Lingkungan Berkelanjutan
  - Pengendalian limbah industri dan penataan ruang pesisir.
- Jatim Amanah & Harmoni → Misi 4: Pemerintahan Transparan
  - Smart governance dan pelayanan publik berbasis data (SPBE).

Implikasi: *Tidak ada misi Jatim yang "gantung"; semuanya mendapatkan "rumah" di RPJMD Gresik.*

13.2.3. Pemetaan Prioritas Pembangunan dan Kontribusi Gresik

Pada tabel harmonisasi prioritas Jatim–Gresik (halaman 217), ditunjukkan bahwa:

- *Ekonomi & Tenaga Kerja → prioritas sangat tinggi di keduanya, dengan Gresik sebagai motor penciptaan kerja berbasis investasi (JIIPE, kawasan industri).*
- *Pertanian & Perikanan → prioritas tinggi; Gresik diposisikan sebagai sentra Agro–Maritim di pesisir utara Jawa Timur.*
- *Tata kelola digital–SPBE → prioritas sangat tinggi; Gresik diarahkan sebagai pilot layanan digital se-Gerbangkertosusila*.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti lingkungan–persampahan dan pariwisata–budaya masih memerlukan penguatan prioritas di Gresik untuk mengejar target provinsi.

Ringkasan kesimpulan halaman 218:

- Tingkat keselarasan RPJMD Gresik dengan RPJMD Jatim → **SANGAT TINGGI**.
- Tingkat kontribusi terhadap sasaran provinsi → **TINGGI**, tetapi perlu penguatan di penataan ruang dan pemerataan sosial-ekonomi.

13.3. Struktur Kebijakan RPJMD dan Kesesuaian Program

13.3.1. Tiga Lapis Kebijakan RPJMD Gresik

Bab XIII menjelaskan bahwa Bab IV RPJMD 2025–2029 menyusun program berbasis tiga lapis kebijakan:

1. **Belanja wajib (mandatory spending):**
    - Pendidikan min. 20%,
    - Kesehatan min. 10%,
    - Infrastruktur publik min. 40% dari belanja APBD (di luar transfer ke desa),
    - Transfer ke desa sesuai regulasi.
2. **Program Prioritas Nawakarsa (9 Navigasi)**
    - Contoh: Gresik Tuntas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Sehat, Gresik Barokah, Pesona Gresik, dan lainnya.
    - Setiap sub-navigasi dipetakan ke nomenklatur program perangkat daerah (Tabel 4.1).
3. **Program Pembangunan Daerah (Program Urusan/PD)**
    - ±146 program di seluruh urusan: pendidikan, kesehatan, PU, sosial, lingkungan, UMKM, pertanian, perikanan, tenaga kerja, dan lain-lain (Tabel 4.2).

Selain itu, **Tabel 4.3** memuat indikator outcome, baseline 2024, target 2025–2030, dan pagu indikatif per program. Ini menunjukkan adanya rantai logis: **kebijakan → prioritas → program → indikator → anggaran**, yang menjadi prasyarat penting efektivitas RPJMD.

13.3.2. Kesesuaian dengan Nawakarsa dan Struktur Urusan

Sub-bab 13.2 menyimpulkan:

- Setiap navigasi Nawakarsa **memiliki jejak jelas** dalam program urusan:
    - *Gresik Tuntas* → program aplikasi informatika, penataan ruang, perencanaan, penunjang seluruh PD.

- *Gresik Mapan* → paket program bebas banjir, jalan lintas utara–selatan, sistem transportasi terpadu.
- *Gresik Agropolitan* → sarpras pertanian, perikanan tangkap & budidaya, pengolahan hasil.
- *Gresik Sehat* → Puskesmas, UHC, posyandu, poskestren, tunjangan nakes.

- Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa seluruh **urusan wajib dan pilihan** telah memiliki:
  - Program penunjang (administrasi, manajemen internal),
  - Program substantif (pendidikan, kesehatan, SDA, perumahan, perikanan, UMKM, tenaga kerja, dll).
- Dari sisi regulasi (Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889/2021), **tidak ada program "ilegal"** di luar nomenklatur, dan kewajiban belanja mandatori terwadahi.

Kesimpulan: dari sisi **desain struktural**, RPJMD Gresik **sudah compliant dan konsisten** dengan regulasi, prioritas, dan Nawakarsa.

13.4. Analisis Efektivitas Desain Program per Bidang

13.4.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial)

Pendidikan

- *Program: pengelolaan pendidikan, kurikulum, PTK, dll.*
- *Indikator: APM/APK PAUD, SD, SMP, lengkap dengan segmentasi perempuan dan keluarga miskin, baseline dan target 2025–2030.*
- ***Efektivitas:*** *indikator sangat spesifik dan inklusif, tetapi kenaikan target relatif kecil (incremental).*

Kesehatan

- P*rogram: pemenuhan UKP–UKM, SDM kesehatan, farmasi, pemberdayaan masyarakat, RSUD.*
- *Nawakarsa: Gresik Sehat (Puskesmas, UHC, posyandu, gizi, E-Akte).*
- ***Efektivitas:*** *desain sudah integratif, tetapi keberhasilan sangat tergantung ketersediaan nakes dan koordinasi lintas dinas (Dukcapil, UMKM, PMD).*

Sosial & Perlindungan

- Program: PKH inklusif, bantuan panti, jaminan sosial, perlindungan buruh migran.

- **Efektivitas:** menyasar kelompok rentan, namun sangat bergantung pada **akurasi data kemiskinan dan integrasi ke Gresik Integrated Smart System.**

13.4.2. Ekonomi, Pertanian, UMKM, Tenaga Kerja

- Program pertanian & pangan: sarpras, kesehatan hewan, penyuluhan, ketahanan pangan.
- Program perikanan: tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, pengawasan SDA.
- Program UMKM & industri: pemberdayaan UMKM, koperasi, ekspor, sistem informasi industri.
- Program tenaga kerja: perencanaan, pelatihan, penempatan, hubungan industrial.

Kekuatan:

1. Alignment tinggi dengan Nawakarsa Agropolitan & Gema Karya.
2. Rantai nilai dari **hulu–hilir** sudah tercakup: produksi → pengolahan → pemasaran → ekspor → tenaga kerja lokal.

Kelemahan:

- Indikator kesenjangan antar wilayah/sektor **belum eksplisit** (misalnya share PDRB UMKM vs industri besar, PDRB per kapita wilayah).
- Risiko: ekonomi bisa tumbuh **tanpa** otomatis mengurangi ketimpangan.

13.4.3. Infrastruktur, Lingkungan, Tata Ruang

- Program: SDA, jalan, air minum, drainase, perumahan, persampahan, pengendalian pencemaran, PPLH, kehati.
- Nawakarsa: Gresik Mapan, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, naturalisasi tambang, green industry.

Kekuatan:

- Mandatory spending infrastruktur 40% ditopang banyak program.
- Ada program spesifik air minum, banjir, jalan strategis, transportasi.

Kelemahan:

- Efektivitas bergantung pada prioritas pagu (air bersih vs estetika kota).
- Analisis risiko perubahan iklim dan bencana belum cukup masuk dalam indikator.

13.5. Skor Efektivitas Program per Urusan dan Klaster Kinerja

13.5.1. Metodologi Skoring

Tiga aspek penilaian:

- K1 – Kesesuaian dengan kebijakan RPJMD (40%)
- K2 – Kesiapan indikator & target (35%)
- K3 – Potensi dampak terhadap sasaran RPJMD (25%)

Skala: Tinggi = 3, Sedang = 2, Rendah = 1. Rumus: Skor = (K1×0,40) + (K2×0,35) + (K3×0,25).

13.5.2. Hasil Skor Efektivitas 22 Bidang Urusan

Dari Tabel di halaman 228–229:

- Kategori Tinggi (≥2,65 / ≥88 poin): 9 urusan (43%), antara lain:
    - Pendidikan, Bappeda/Statistik & Perencanaan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Dukcapil, UMKM/Industri/Perdagangan, Penanaman Modal, Kominfo.
- Kategori Sedang (2,10–2,64 / 70–87 poin): 12 urusan (52%), antara lain:
    - PU & Tata Ruang, Perumahan, Sosial, Tenaga Kerja, PPPA, Lingkungan, PMD, Perhubungan, Pariwisata & Kebudayaan, Setda/Penunjang, KB & PP, Kesbangpol.
- Kategori Rendah–Sedang (≤2,00 / ≤69 poin): 1 urusan (5%), yaitu Pertanahan (skor 1,65 / 55 poin).

Interpretasi utama:

- RPJMD dirancang cukup kuat, namun mayoritas bidang masih di klaster "sedang" – artinya kebijakan dan program sudah selaras, tetapi ambisi target & alat ukur belum cukup untuk mendorong lompatan besar.

13.5.3. Visual Radar Efektivitas

Grafik "Radar Efektivitas Program per-Bidang Urusan" pada halaman 230–232 menegaskan:

- Puncak tertinggi (≈3,0) → Pendidikan dan Bappeda (indikator lengkap & integrasi kebijakan paling kuat).
- Klaster tinggi (≈2,65–2,75) → Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Dukcapil, Kominfo, UMKM/Industri, Penanaman Modal.
- Klaster sedang (≈2,10–2,50) → PU/TR, Perumahan, Sosial, Tenaga Kerja, PPPA, Lingkungan, PMD, Perhubungan, Pariwisata, Setda, KB & PP, Kesbangpol.

- Terendah (≈1,65) → **Pertanahan**, yang belum terkoneksi kuat dengan tata ruang dan infrastruktur.

6. SMART Analysis dan Temuan Utama

6.1. Rekap SMART per Kelompok Program

Dari tabel SMART pada halaman 237–239:

- *Pendidikan dan Smart Governance (Kominfo–Dukcapil) → skor SMART 95% (sangat efektif).*
- *Kesehatan serta Pertanian & Perikanan → 90% (efektif).*
- *UMKM/Industri & Investasi → 88% (efektif & strategis).*
- *PU/Infrastruktur → 80% (efektivitas sedang).*
- *Lingkungan Hidup → 78% (kurang efektif).*

Kesimpulan SMART: *RPJMD sudah efektif terutama di SDM dan sektor basis ekonomi, tetapi masih terdapat gap efektivitas di infrastruktur dasar (air, sanitasi, banjir) dan lingkungan hidup*.

13.6.2. Kelemahan SMART yang Berulang

Halaman 240–242 merangkum kelemahan di setiap elemen SMART:

- ***Specific:*** *indikator belum menggambarkan* ***kesejahteraan*** *(pendapatan petani/nelayan, tenaga kerja).*
- ***Measurable:*** *terlalu banyak indikator* ***output fisik****, bukan outcome.*
- ***Achievable:*** *target belum disertai analisis kesiapan SDM dan anggaran.*
- ***Relevant:*** *sebagian program belum terkait langsung dengan* ***kemiskinan & tenaga kerja****.*
- ***Time-bound:*** *milestone belum dipecah per semester untuk proyek besar → berisiko menumpuk di akhir periode.*

13.7. GAP Analysis dan Bidang Prioritas Perbaikan

13,7.1. GAP Strategis per Bidang Urusan

Tabel GAP di **halaman 240–241** mengelompokkan permasalahan kunci, jenis GAP, dan tingkat risiko:

- **Pertanahan (skor 58 / rendah)**
    - Masalah: belum mengungkit investasi & infrastruktur.
    - Jenis GAP: struktural, risiko **ekstrem**.

- PU & Tata Ruang (skor 78)
    - Masalah: air bersih & banjir belum tertangani signifikan.
    - GAP: target outcome & anggaran, risiko **sangat tinggi**.
- Sosial
    - Masalah: kemiskinan masih tinggi & data belum valid.
    - GAP: One Data + outcome, risiko **sangat tinggi**.
- Lingkungan Hidup
    - Masalah: polusi industri, kualitas lingkungan menurun.
    - GAP: indikator outcome lingkungan, risiko **sangat tinggi**.
- Tenaga Kerja
    - Masalah: serapan kerja lokal masih rendah.
    - GAP: relevansi program dengan TPT lokal, risiko **tinggi**.

Sementara itu, sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM/industri, penanaman modal, Dukcapil, dan Kominfo memiliki **SMART tinggi**, tetapi tetap menyimpan risiko implementasi (SDM, pendanaan, integrasi data).

13.7.2. Lima GAP Prioritas Tertinggi

Bab XIII menegaskan lima prioritas perbaikan:

1. **Pertanahan** – jika tidak diintegrasikan dengan tata ruang & DPMPTSP, akan menghambat investasi & proyek strategis.
2. **PU & Tata Ruang (air bersih, banjir)** – tanpa lompatan di sektor ini, **daya saing Gresik hilang**.
3. **Sosial (kemiskinan)** – kemiskinan tidak turun → RPJMD berpotensi gagal mencapai sasaran utama.
4. **Lingkungan** – polusi industri yang tidak terkontrol mengancam kesehatan dan ekonomi jangka panjang.
5. **Tenaga Kerja** – sebagai pusat industri, Gresik tidak boleh memiliki tingkat pengangguran lokal tinggi.

13.7.3. Klasifikasi GAP dan Solusi

Tabel klasifikasi GAP (halaman 242) mengelompokkan:

- ***Outcome Gap:*** *UMKM, Pertanian, Perikanan, Tenaga Kerja → perlu indikator pendapatan & serapan kerja.*
- ***Funding Gap:*** *PU/TR, Perumahan, Lingkungan → butuh realokasi untuk layanan dasar.*
- ***Regulatory Gap:*** *Pertanahan & Perizinan → integrasi dengan DPMPTSP.*
- ***Data Gap:*** *Sosial, Kesehatan → Dukcapil sebagai Single Data Gateway.*
- ***Governance Gap:*** *Kominfo & Sekda → SPBE wajib terhubung ke program OPD.*

13.8. Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan SMART

13.8.1. Rekomendasi Kebijakan Terukur

Tabel rekomendasi (halaman 229–230) mengajukan beberapa penguatan yang bila diterapkan akan menaikkan skor efektivitas:

- Menambah indikator pemerataan (disparitas wilayah & sektor)
- Meningkatkan target air bersih, sanitasi, dan pengurangan banjir
- Mengintegrasikan One Data Gresik ke seluruh program sosial
- Mengaitkan pelatihan–penempatan kerja dengan indikator TPT
- Menargetkan peningkatan kunjungan wisata & nilai tambah budaya

Jika lima penguatan ini dijalankan:

"*Sebagian besar urusan naik ke kategori tinggi dan daya dorong RPJMD meningkat signifikan*."

13.8.2. Rekomendasi Teknis Penguatan SMART

Halaman 240 merumuskan rekomendasi teknis:

- Specific: tambahkan indikator kesejahteraan (UMKM, petani, nelayan, tenaga kerja).
- Measurable: gunakan *Key Result Indicator* (KRI) outcome, bukan hanya output fisik.
- Achievable: lengkapi rencana SDM dan pendanaan untuk infrastruktur prioritas.
- Relevant: pastikan program terkait langsung dengan sasaran RPJMD dan SDGs (kemiskinan, tenaga kerja, lingkungan).
- Time-bound: tetapkan milestone per semester untuk program kritis (air bersih, banjir, lingkungan, kemiskinan, tenaga kerja).

9. Kesimpulan Umum Executive Summary

1. RPJMD Gresik 2025–2029 memiliki tingkat keselarasan yang sangat tinggi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, baik pada visi, misi, maupun posisi Gresik sebagai pusat pertumbuhan industri–maritim di kawasan Gerbangkertosusila.
2. Struktur kebijakan dan program RPJMD sudah kuat dan regulatif, dengan tiga lapis kebijakan (mandatory spending, Nawakarsa, program urusan) dan rantai logis kebijakan → program → indikator → pagu yang jelas.
3. Analisis efektivitas per-bidang urusan menunjukkan bahwa 43% urusan telah berada di kategori tinggi, khususnya pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM/industri, investasi, Dukcapil, dan Kominfo. Namun 52% masih di kategori sedang, dan 1 urusan (pertanahan) di kategori rendah–sedang, yang berpotensi menghambat investasi dan tata ruang.
4. SMART analysis menilai RPJMD Gresik efektif terutama di SDM (pendidikan, kesehatan) dan sektor basis (pertanian, perikanan, UMKM, investasi), tetapi masih terdapat kelemahan di infrastruktur dasar (air bersih, drainase) dan lingkungan hidup (persampahan, kualitas ekologis).
5. GAP analysis mengungkap lima area kritis yang harus mendapat prioritas intervensi:
    - Integrasi urusan pertanahan dengan investasi & infrastruktur.
    - Lompatan layanan air bersih, sanitasi, dan pengendalian banjir.
    - Perbaikan data dan outcome kemiskinan.
    - Penguatan indikator outcome lingkungan di tengah tekanan industri.
    - Relevansi nyata program tenaga kerja terhadap serapan kerja lokal.
6. Secara umum, desain program RPJMD sudah cukup baik (SMART mayoritas ≥78), tetapi dampak aktual ke masyarakat belum otomatis terjamin jika indikator masih berorientasi output, target masih moderat, dan integrasi data–anggaran belum ditingkatkan.
7. Dengan melaksanakan paket rekomendasi (penguatan indikator outcome, prioritas pendanaan layanan dasar, integrasi One Data Gresik, linkage pelatihan–penempatan kerja, dan reformulasi urusan pertanahan), RPJMD Gresik 2025–2029 berpotensi berubah dari “cukup efektif” menjadi “sangat mengungkit”, terutama dalam:
    - Penurunan kemiskinan,
    - Penyediaan pekerjaan layak bagi warga lokal,

- Penyediaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat,
- Penguatan ekonomi sektor basis yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, Bab XIII menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi pada "apa yang akan dikerjakan", tetapi "seberapa berani targetnya dan seberapa kuat instrumen implementasinya" agar visi "Gresik Maju Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat" benar-benar tercapai pada 2029

BAB XIV
Analisis Keterkaitan dan Efektivitas Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029

14.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Pertanian

Bab XIV membahas secara khusus seberapa kuat Renstra Dinas Pertanian 2025–2029 terhubung dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, sekaligus seberapa efektif Renstra tersebut dalam mendorong pencapaian sasaran ketahanan pangan, ekonomi inklusif, dan kesejahteraan petani.

Beberapa poin kunci:

- Di pendahuluan Renstra dinyatakan **secara eksplisit** bahwa Renstra Pertanian adalah **penjabaran RPJMD Gresik 2025–2029**, sekaligus selaras dengan kebijakan pertanian nasional dan provinsi.
- Tujuan Renstra mencakup:
    - *Ketahanan Pangan,*
    - *Produktivitas Pertanian,*
    - *Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah,*
    - *Penguatan Kelembagaan Dan Sdm Petani.*

Artinya, kepatuhan hierarkis terhadap RPJMD bersifat mandatory dan sudah diakomodasi, sehingga pembahasan Bab XIV lebih menekankan pada kualitas keterkaitan substansi dan efektivitas outcome.

14.2. Keterkaitan Renstra – RPJMD pada Tingkat Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator

14.2.1. Keterkaitan Tujuan–Sasaran dengan Sasaran RPJMD

Tabel 14.1 merangkum *Matriks Keselarasan Tujuan–Sasaran* antara RPJMD dan Renstra Pertanian. Ringkasannya:

Sasaran RPJMD	Kontribusi Renstra Pertanian	Tingkat Keterkaitan
Peningkatan ketahanan pangan daerah	Peningkatan produksi & ketersediaan pangan (tanaman pangan & hortikultura)	**Tinggi**
Pengendalian inflasi pangan	Kebijakan distribusi, stabilitas harga, dan pascapanen (sebagian sudah ada dalam program teknis)	**Sedang–Tinggi**
Pengurangan kemiskinan desa	Penguatan kelembagaan petani & peluang nilai tambah usaha tani	**Sedang**
Mitigasi risiko perubahan iklim	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	**Tinggi**

Makna pentingnya:

- Secara tujuan dan sasaran, Renstra Pertanian sudah menempel langsung pada sasaran RPJMD di bidang ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, dan pengurangan kemiskinan perdesaan.
- Namun, dimensi kesejahteraan petani (pendapatan, kemiskinan) dan nilai tambah komoditas masih kurang eksplisit dalam indikator Renstra yang sekarang.

14.2.2. Keterkaitan Program dan Indikator dengan RPJMD

Di RPJMD, program sektor pertanian memiliki indikator outcome utama:

- *Persentase Penanganan OPT,*
- *Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim,*
- *Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas.*

Renstra Pertanian (Bab IV) memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah mendukung langsung indikator tersebut, misalnya:

- *Program Pengendalian OPT Tanaman Pangan & Hortikultura,*
- *Program Penanganan DPI & Adaptasi Iklim,*
- *Program Penyuluhan & Penguatan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan),*
- *Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (Irigasi, Embung, Jalan Usaha Tani).*

Kesimpulan awal: *"Program teknis pertanian Renstra selaras langsung dengan indikator outcome RPJMD yang ditetapkan untuk Dinas Pertanian."*

14.2.3. Evaluasi Awal Efektivitas Renstra terhadap Target RPJMD

Tabel ringkas "Area Dukungan – Kondisi – Evaluasi Efektivitas" menyajikan penilaian awal:

- *Dukungan terhadap indikator RPJMD → sudah ada IKU/IKK terkait → Efektivitas Tinggi.*
- *Integrasi prioritas & Nawakarsa (Gresik Agropolitan / GO Tani) → program masuk daftar subkegiatan prioritas → Cukup efektif, perlu penajaman bobot prioritas.*
- *Pengendalian inflasi pangan → sudah ada arah kebijakan, namun indikator masih banyak di hulu → Sedang, perlu penguatan indikator hilir (harga, distribusi, logistik).*
- *Hilirisasi & nilai tambah hasil pertanian → fungsi sudah ada, tetapi belum kuat pada indikator → Rendah–Sedang.*
- *SDM penyuluh & kelembagaan → program cukup jelas dan sejalan RPJMD → Tinggi.*

Dari sini ditarik simpulan:

Kekuatan utama Renstra Pertanian: ketahanan pangan & pengendalian OPT. Ruang peningkatan utama: hilirisasi, pasar, dan kesejahteraan petani (outcome ekonomi).

14.3. Matriks Keterkaitan Detail Renstra – RPJMD dan Temuan GAP

14.3.1. Matriks Keterkaitan Renstra–RPJMD (Tabel 14.2)

Tabel 14.2 menyajikan *Matriks Keterkaitan Renstra Dinas Pertanian ↔ RPJMD Gresik 2025–2029* per level: sasaran, program, indikator, target, dan penilaian keterkaitan–GAP–efektivitas.

Beberapa contoh penting:

1. Penguatan SDM & kelembagaan petani
    - *Indikator Renstra: **Persentase kelompok tani naik kelas** → sudah menjadi IKU/IKK.*
    - *Di RPJMD: indikator yang sama digunakan (baseline 10,98 → target 8,93% tahun 2029, ada sedikit keanehan tren yang perlu dicek).*
    - *Keterkaitan: **Tinggi**,*
    - *GAP: memerlukan **baseline & tahapan (milestone) yang lebih jelas** per tahun.*
2. Ketahanan pangan (produksi & ketersediaan)
    - *Indikator Renstra: produktivitas tanaman pangan & hortikultura, kualitas sarpras pertanian.*
    - *Di RPJMD: ketahanan pangan lebih dipotret lewat produksi dan sarpras.*
    - *Keterkaitan: **Sedang**,*
    - *GAP: belum ada indikator eksplisit **inflasi pangan** di Renstra.*
3. Pengendalian inflasi pangan
    - *Renstra: dukungan akses pasar & pascapanen sudah ada di program teknis.*
    - *RPJMD: ada indikator dan alokasi untuk stabilisasi harga Bahan Kebutuhan Pokok (BKP).*
    - *Keterkaitan: **Sedang**,*
    - *GAP: outcome harga (stabilitas harga) belum terukur jelas di Renstra.*
4. Perlindungan lahan pertanian (LP2B)
    - *Renstra: indikator berupa **Peta LP2B tersusun (dokumen)**.*

- *RPJMD: belum menjadikan LP2B sebagai indikator outcome eksplisit.*
- *Keterkaitan: **Rendah**,*
- *GAP: isu penting, tetapi belum masuk dalam indikator RPJMD; masih sebatas output dokumen.*

5. Nilai tambah produk (hilirisasi)
    - *Renstra: pemanfaatan prasarana pascapanen → indikator jumlah unit sarpras dimanfaatkan (bahkan target turun dari 4.005 → 1.000 unit).*
    - *RPJMD: tidak secara eksplisit memuat indikator nilai tambah petani.*
    - *Keterkaitan: **Rendah**,*
    - *GAP: indikator belum berorientasi **added value & pendapatan petani**.*
6. Adaptasi perubahan iklim dan OPT
    - *Renstra: penanganan DPI & penanganan OPT menjadi IKU/IKK.*
    - *RPJMD: menampung indikator penanganan OPT dan perubahan iklim.*
    - *Keterkaitan: **Tinggi**,*
    - *GAP: perlu indikator **dampak** seperti loss reduction (penurunan gagal panen).*

Ringkasan temuan matriks:

- ***Selaras Program RPJMD:** Tinggi – seluruh urusan teknis terhubung.*
- ***Selaras Indikator RPJMD:** Sedang–Tinggi – terutama penyuluhan & kesehatan hewan.*
- ***Kontribusi terhadap outcome ekonomi petani:** Rendah–Sedang – perlu indikator NTP lokal, pendapatan, hilirisasi.*
- ***Kontribusi pengendalian inflasi pangan:** Sedang – stabilitas harga belum kuat sebagai outcome.*
- ***Isu LP2B:** penting, tetapi **kurang terukur** di RPJMD.*

14.4. Revisi Indikator Berbasis SMART–Outcome dan Dampaknya

14.4.1. Revisi Indikator Utama Renstra (SMART-Outcome Version)

Bab XIV menyajikan **tabel revisi indikator** yang menggeser fokus dari output ke outcome. Contoh:

- Sebelum: *Persentase kelompok tani naik kelas*
  → Sesudah: *Kenaikan pendapatan rata-rata petani anggota Poktan/Gapoktan (%)*.
- Sebelum: *Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)*
  → Sesudah: *Persentase peningkatan produktivitas lahan pangan (%).*

- Sebelum: *Jumlah prasarana pascapanen dimanfaatkan (unit)*

  → Sesudah: *Peningkatan nilai tambah komoditas pascapanen (Rp/ton atau Rp/kg).*
- Sebelum: *Peta LP2B tersusun (dokumen)*

  → Sesudah: *Luas LP2B yang terlindungi dari alih fungsi (%).*
- Sebelum: *Penanganan DPI (Ha)*

  → Sesudah: *Pengurangan kerugian akibat iklim (% gagal panen).*
- Sebelum: *Pengawasan sarpras (laporan)*

  → Sesudah: *Kepatuhan penggunaan sarpras pertanian (%).*
- Sebelum: *Pengujian lab keswan (dokumen)*

  → Sesudah: *Persentase penurunan penyakit hewan strategis*.
- Sebelum: *Pemenuhan prasarana kelembagaan tani*

  → Sesudah: *Indeks Kelembagaan Petani (skor 1–4).*

Revisi ini menjadikan indikator:

- *lebih spesifik ke outcome ekonomi dan ketahanan pangan,*
- *lebih measurable (bisa dihitung dengan jelas),*
- *lebih relevan langsung ke RPJMD (pertumbuhan, kemiskinan, ketahanan pangan),*
- *tetap time-bound dengan target tahunan jelas.*

14.4.2. Contoh Baseline–Target 2025–2029 (Outcome)

Bab menyiapkan contoh angka baseline dan target baru (ilustratif tetapi realistis), misalnya:

- Kenaikan pendapatan anggota Poktan:
  - 2024: 0% → 2025: 3% → 2026: 5% → 2027: 8% → 2028: 10% → 2029: 12%.
- Produktivitas padi (ton/Ha):
  - 6,0 → 6,2 → 6,4 → 6,6 → 6,9 → 7,2.
- Nilai tambah komoditas hortikultura (Rp/kg):
  - baseline 0 → +300 → +400 → +600 → +800 → +1.000.
- Luas LP2B terlindungi (%):
  - 80 → 85 → 90 → 92 → 95.
- Penurunan gagal panen (%):
  - 0 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Indeks kelembagaan petani (1–4):
  - 1,8 → 2,0 → 2,3 → 2,6 → 2,9 → 3,2.

14.4.3. Dampak Revisi terhadap Skor SMART

Ringkasan: skor SMART naik dari "A" menjadi "A+ (Superior Outcome Alignment)", dengan komponen:

- Specific: 4,5 → **5**
- Measurable: 4 → **5**
- Achievable: 4 → **4,5**
- Relevant: 4 → **5**
- Time-bound: tetap 5

Dengan demikian, setelah revisi, indikator Renstra:

- **benar-benar menjadi jembatan** antara program teknis (sarana, penyuluhan, DPI, OPT)
- dan **indikator makro RPJMD** (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketahanan pangan).

14.5. Mapping Indikator (Revisi) Renstra ↔ RPJMD

Bab XIV kemudian memetakan indikator revisi ke **tema-tema utama RPJMD**:

14.5.1. Tema Kesejahteraan Petani & Ekonomi Daerah

- **Indikator revisi:** kenaikan pendapatan rata-rata petani anggota Poktan/Gapoktan.
- Dipetakan ke:
    - IKU pertumbuhan ekonomi & penurunan kemiskinan,
    - Nawakarsa **Gresik Agropolitan** (sub-navigasi GO Tani).

Intinya:

Pendapatan petani diakui sebagai **"jembatan"** antara:

- *program teknis (pupuk, sarpras, penyuluhan), dan*
- *sasaran makro RPJMD (kemiskinan & ekonomi inklusif).*

14.5.2. Tema Ketahanan Pangan & Kemandirian Pangan

- **Indikator revisi:** persentase peningkatan produktivitas lahan pangan & pengurangan gagal panen.
- Dipetakan ke indikator RPJMD: penanganan OPT & penanganan perubahan iklim.

Perubahan ini menggeser indikator dari **proses** ("penanganan" saja) menjadi **dampak** (produktivitas naik, gagal panen turun).

14.5.3. Tema Hilirisasi & Nilai Tambah

- **Indikator revisi:** peningkatan nilai tambah komoditas pascapanen (Rp/kg atau Rp/ton).
- Di-RPJMD-kan sebagai bagian dari program daya saing produk lokal, sarana distribusi, dan stabilisasi harga.

14.5.4. Tema LP2B

- **Indikator revisi:** persentase LP2B yang terlindungi dari alih fungsi.
- Disarankan menjadi **IKD/indikator lintas urusan** Pertanian × PUPR/Tata Ruang, karena menyangkut ketahanan pangan jangka panjang.

14.5.5. Tema Kelembagaan Petani

- **Indikator revisi:** Indeks Kelembagaan Petani (skor 1–4).
- Menguatkan indikator RPJMD *"persentase kelompok tani naik kelas"* dengan dimensi kualitas kelembagaan (fungsi, jaringan, tata kelola).

14.6. Matriks Problem–Solution dan Prioritas Permasalahan Strategis

14.6.1. Problem–Solution Utama

Tabel 14.4 memuat *Matriks Problem–Solution* untuk Dinas Pertanian 2025–2029. Beberapa masalah kunci:

1. **Alih fungsi lahan sawah (LP2B)**
    - Akar masalah: LP2B belum terlindungi optimal, tekanan industri & perumahan.
    - Dampak: penurunan kapasitas produksi & ancaman ketahanan pangan.
    - Solusi: penyusunan Peta LP2B + integrasi LP2B dengan insentif prasarana pertanian.
2. **Perubahan iklim memicu gagal panen**
    - Akar masalah: irigasi & drainase belum siap, kelembagaan petani lemah.
    - Solusi: penanganan DPI, rehabilitasi irigasi/embung, early warning.
3. **Serangan OPT berulang**
    - Masalah: pengendalian belum preventif; berdampak pada penurunan hasil & kerugian petani.
    - Solusi: pengendalian OPT terpadu (proteksi, sanitarian lahan, bio-pestisida).
4. **Regenerasi petani lemah**
    - Masalah: profesi tani kurang menarik, kurang inovasi.
    - Solusi: penyuluhan, penguatan kelembagaan, program *Petani Milenial*.

5. Akses petani ke teknologi terbatas
    - Solusi: pembangunan & pemanfaatan sarpras (JUT, embung, BPP, mekanisasi).
6. Kesejahteraan petani belum terukur
    - Akar masalah: indikator masih dominan output fisik.
    - Solusi: integrasi data pendapatan petani ke IKU & sistem penyuluhan.

14.6.2. Prioritas Problem–Solution

Tabel 14.5 mengurutkan 10 permasalahan strategis ke prioritas High–Medium–Low, misalnya:

- HIGH Priority:
    1. Alih fungsi lahan (LP2B tidak terlindungi),
    2. Dampak perubahan iklim (gagal panen),
    3. Serangan OPT berulang,
    4. Kesejahteraan petani belum meningkat signifikan.
- MEDIUM Priority:

    5. Hilirisasi & nilai tambah rendah,
    6. Regenerasi petani lemah,
    7. Akses teknologi & sarpras belum merata,
    8. Kelembagaan petani belum kuat.
- LOW Priority

    9. Data & sistem informasi pangan belum optimal,
    10. Kolaborasi lintas urusan masih lemah.

14.7. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Quick Wins 2025

14.7.1. RTT Berbasis Prioritas

Tabel 14.6 menyusun *Rencana Tindak Lanjut* per masalah strategis: siapa penanggung jawab, mitra, indikator outcome, dan waktu.

Contoh RTT HIGH Priority:

- LP2B
    - Intervensi: penetapan LP2B spasial + insentif prasarana.
    - Penanggung jawab: Dinas Pertanian × PUPR × ATR/BPN.
    - Outcome: % LP2B terlindungi.
- Perubahan iklim → gagal panen
    - Intervensi: Early Warning System + mitigasi DPI berbasis lokasi.

  - Penanggung jawab: Dinas Pertanian × BPBD × BMKG.
  - Outcome: % penurunan gagal panen.
- Serangan OPT berulang
  - Intervensi: proteksi terpadu OPT + bio-pestisida.
  - Outcome: % pengurangan serangan OPT.
- Kesejahteraan petani belum meningkat
  - Intervensi: integrasi indikator pendapatan petani dalam IKU OPD + survei baseline pendapatan per komoditas.
  - Outcome: % kenaikan pendapatan petani.

14.7.2. Quick Wins 2025

Bab XIV juga merumuskan **Quick Wins 2025** sebagai langkah akseleratif jangka pendek:

- **TW1 2025:** Survei baseline pendapatan & produktivitas → output: dokumen baseline KPI.
- **TW2 2025:** Pilot LP2B di 2 kecamatan prioritas → output: peta LP2B + SK awal.
- **TW3 2025:** *Integrated OPT & DPI early response system* → output: dashboard risiko pertanian.
- **TW4 2025:** Kontrak pasar untuk 2 komoditas unggulan → output: 2 MoU pemasaran.

Dengan Quick Wins ini, Dinas Pertanian bisa segera menunjukkan hasil konkret dalam 1 tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029.

14.8. Ringkasan Penilaian Efektivitas dan Kesimpulan Utama

14.8.1. Ringkasan Penilaian Efektivitas

Bab XIV menyajikan *"Ringkasan Utama"* dengan rating sebagai berikut:

- Kepatuhan hierarki terhadap RPJMD → ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
- Keterkaitan tujuan & sasaran → ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆
- Kontribusi terhadap indikator RPJMD → ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆
- Fokus pada nilai tambah ekonomi petani → ⭐ ⭐ ⭐ ☆☆
- Kesiapan mendukung program prioritas (Nawakarsa/Gresik Agropolitan) → ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆

Overall Effectiveness Rating: Efektif (B+), dengan catatan:

"Perlu penguatan outcome ekonomi & keterhubungan hulu–hilir."

14.8.2. Kesimpulan Utama

1. Secara dokumen, Renstra Dinas Pertanian sudah sangat patuh dan selaras dengan RPJMD Gresik 2025–2029 dari sisi hierarki, tujuan, sasaran, program, dan indikator ketahanan pangan, OPT, dan kelembagaan petani.
2. Kekuatan utama Renstra adalah pada aspek ketahanan pangan, pengendalian OPT, adaptasi iklim, dan penguatan SDM–kelembagaan petani, yang sudah terhubung jelas dengan indikator RPJMD.
3. Kelemahan utama justru ada pada dimensi outcome ekonomi petani (pendapatan, kemiskinan, nilai tambah) dan hilirisasi komoditas, yang masih lemah dalam indikator dan target.
4. Analisis SMART–Outcome yang direkomendasikan Bab XIV menggeser indikator dari output menjadi outcome, sehingga:
    - Pendapatan petani,
    - Produktivitas lahan,
    - Nilai tambah komoditas,
    - LP2B terlindungi,
    - Penurunan gagal panen & penyakit hewan,
    - Indeks kelembagaan petani

    menjadi indikator utama dan langsung terhubung dengan IKU RPJMD dan Nawakarsa GO Tani.
5. Matriks Problem–Solution dan RTT memberikan peta jalan yang jelas: perlindungan LP2B, mitigasi risiko iklim–OPT, peningkatan pendapatan petani (lewat hilirisasi dan akses pasar), regenerasi petani, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan. Jika dilaksanakan konsisten, hal ini akan mengangkat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan perdesaan di Gresik.

Dengan demikian, Bab XIV menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya menjaga ketahanan pangan dan produksi, tetapi menaikkan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, perlindungan lahan, adaptasi iklim yang kuat, dan penguatan kelembagaan yang terukur, agar peran sektor pertanian benar-benar menjadi pilar ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.

BAB XV

Analisis Keterkaitan RENSTRA Diskoperindag dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029

15.1. Latar Belakang dan Peran Strategis Diskoperindag

Bab XV mengulas secara khusus sejauh mana RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, sekaligus menilai efektivitas desain indikator dan programnya dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis industri, UMKM, dan perdagangan.

Secara eksplisit, RENSTRA Diskoperindag mendukung *Misi 2 RPJMD*:

"Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi keunggulan lokal."

Dalam kerangka ini, Diskoperindag memegang peran sebagai:

- *Penggerak Utama Penguatan Koperasi Dan UMKM,*
- *Motor Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Dan IKM,*
- *Pengelola Stabilitas Distribusi Dan Harga Pangan,*
- *Aktor Penting Transformasi Digital Ekonomi Lokal.*

Karena itu, kualitas keterkaitan Renstra–RPJMD dan kekuatan indikator outcome menjadi kunci untuk memastikan bahwa industri, koperasi, dan UMKM benar-benar berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan PDRB dan kesejahteraan masyarakat Gresik.

15.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator dengan RPJMD

15.2.1. Tujuan & Sasaran

Sasaran utama RENSTRA Diskoperindag adalah:

"Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju."

Ini langsung terkait dengan indikator kunci RPJMD di bidang perekonomian, antara lain:

- *Pertumbuhan Koperasi Aktif (%),*
- *Rasio Kemitraan Usaha Besar–UMKM,*
- *Pertumbuhan Sektor Manufaktur Dan Investasi,*
- *Pertumbuhan IKM Produktif,*
- *Efisiensi Dan Kualitas Distribusi Perdagangan.*

Hasil analisis menunjukkan:

- Secara hierarki Tujuan → Sasaran → Indikator, Renstra Diskoperindag selaras dengan Misi 2 RPJMD dan fokus transformasi ekonomi daerah.
- *Tujuan sektor (daya saing manufaktur & UMKM) memiliki linkage langsung dengan sasaran RPJMD tentang pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan penguatan pelaku usaha rakyat.*

15.2.2. Matriks Alignment Indikator

Matriks pada halaman 262–263 memetakan indikator RPJMD dengan indikator Renstra Diskoperindag, misalnya:

- Pertumbuhan koperasi aktif ↔ program pemberdayaan dan pengawasan koperasi → ***selaras.***
- Rasio kemitraan usaha besar–UMKM ↔ fasilitasi kemitraan dan pembinaan UMKM → ***selaras***, namun target kemitraan perlu diperjelas dan diukur kualitasnya.
- Realisasi investasi manufaktur ↔ fasilitasi perizinan industri berbasis OSS-RBA dan SIINas → ***selaras***, tetapi perlu indikator outcome industri (nilai tambah, produktivitas).
- Pertumbuhan IKM ↔ pembinaan IKM, sertifikasi usaha, dan fasilitasi pasar → konsisten.
- Efisiensi distribusi perdagangan ↔ stabilisasi harga dan distribusi pangan → ***selaras***, tetapi linkage efisiensi logistik belum eksplisit.

Kesimpulan: *Keterpaduan indikator dinilai "Baik", namun masih didominasi indikator output (kegiatan, jumlah binaan, jumlah sertifikasi), belum sepenuhnya menangkap dampak ekonomi.*

15.3. Analisis Program, Efektivitas (SMART), dan GAP Utama

15.3.1. Program–Kegiatan Utama

Program prioritas dalam Renstra yang dianalisis meliputi:

- ***Perindustrian*** *→ fasilitasi SIINas, OSS-RBA, basis data industri, penguatan IKM.*
- ***Perdagangan*** *→ stabilisasi harga, operasi pasar, pengelolaan distribusi pangan dan sarana perdagangan.*

- ***Koperasi & UMKM*** *→ pembinaan usaha, pelatihan, fasilitasi permodalan dan kemitraan, serta digitalisasi UMKM.*

Analisis menyimpulkan bahwa program-program ini saling mendukung arah kebijakan ekonomi RPJMD, khususnya transformasi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berbasis manufaktur, UMKM, dan jasa perdagangan yang modern.

15.3.2. SMART Review: Efektivitas Umum

Penilaian SMART terhadap desain indikator memberikan hasil:

- ***Specific:*** *sangat spesifik (OSS-RBA, SIINas, IKM, koperasi, UMKM digital) →* ***kuat****.*
- ***Measurable:*** *indikator tersedia, tetapi* ***banyak yang belum outcome-based*** *→ perlu perbaikan.*
- ***Achievable:*** *target realistis untuk kapasitas OPD →* ***baik****.*
- ***Relevant:*** *seluruh indikator relevan dengan Misi 2 RPJMD →* ***sangat baik****.*
- ***Time-bound:*** *memiliki target tahunan →* ***kuat****.*

Skor komposit SMART: 4/5 → efektivitas: Tinggi. Namun dicatat bahwa efektivitas tinggi ini baru pada level operasional (output), belum menjamin daya dorong langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

15.3.3. SMART + GAP per Indikator Kunci

Tabel SMART + GAP di halaman 265–266 merinci delapan indikator Renstra beserta skor dan gap-nya.

Beberapa temuan penting:

1. Jumlah koperasi aktif yang sehat meningkat – Skor SMART 23/25 (Tinggi)
    - Kuat secara desain (spesifik, terukur, relevan, berbasis pengawasan).
    - GAP: *outcome ekonomi koperasi (SHU, kontribusi ke pendapatan anggota) belum terukur.*
2. Peningkatan jumlah UMKM binaan – Skor 21/25 (Sedang–Tinggi)
    - Menggambarkan intensitas pembinaan,
    - GAP: *belum mengukur dampak terhadap omzet, nilai tambah, dan keberlanjutan usaha*.

3. Persentase IKM berizin & tersertifikasi – Skor 23/25 (Tinggi)
    - Sangat baik untuk legalitas dan kepatuhan,
    - GAP: *tidak memotret peningkatan daya saing, ekspor, atau produktivitas industri.*
4. Jumlah kemitraan UMKM–Industri – Skor 20/25 (Tinggi)
    - Penting untuk integrasi supply chain,
    - GAP: *kualitas kemitraan belum diukur (durasi MoU, nilai transaksi).*
5. Jumlah pelaku usaha onboarding digital – Skor 17/25 (Sedang)
    - Poin terlemah; indikator baru sebatas jumlah yang masuk platform digital,
    - GAP: *belum mengukur peningkatan omzet dan transaksi online*.
6. Penanganan stabilisasi harga kebutuhan pokok – Skor 22/25 (Tinggi)
    - Mendukung pengendalian inflasi dan daya beli,
    - GAP: *efisiensi rantai distribusi (biaya/logistik) belum diukur.*
7. Peningkatan nilai investasi industri – Skor 18/25 (Sedang)
    - Relevan dengan investasi dan sektor manufaktur,
    - GAP: *kontribusi PDRB sektor dan produktivitas industri belum diturunkan ke indikator.*
8. Pertumbuhan IKM produktif – Skor 21/25 (Tinggi)
    - Menunjukkan dinamika IKM,
    - GAP: *butuh pengukuran berbasis PDRB dan nilai tambah per subsektor.*

Ringkasan SMART:

- 3 indikator di kategori Tinggi (≥22),
- 4 indikator di kategori Sedang (19–21),
- 1 indikator di kategori Rendah (≤18).

Mayoritas indikator potensial dan kuat secara desain, namun belum outcome-oriented karena belum memotret nilai tambah ekonomi, kontribusi PDRB, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

15.4. Tingkat Integrasi Renstra–RPJMD dan GAP Integrasi

15.4.1. Matriks Integrasi Indikator Renstra–RPJMD

Matriks integrasi di halaman 267 menjelaskan keterhubungan langsung antara indikator Renstra dan indikator RPJMD, misalnya:

- *Indikator koperasi sehat (grade A)* ↔ indikator pengawasan dan pemeriksaan koperasi → ***selaras kuat***.
- Indikator *jumlah IKM mengajukan verifikasi melalui SIINas* ↔ outcome pengembangan industri berkelanjutan → ***relevan langsung***.
- Indikator *dokumen pemantauan kepatuhan industri ke SIINas* ↔ kepatuhan penyampaian data industri dan SPBE → ***mendukung SPBE industri***.
- Indikator *stabilisasi harga* ↔ program peningkatan sarana distribusi perdagangan → ***konsisten*** dengan pengendalian inflasi.

Ringkasan tingkat integrasi:

- Tujuan & Sasaran: 100% selaras dengan arah pembangunan ekonomi RPJMD.
- Program: 100% sesuai nomenklatur urusan (Permendagri 90/2019).
- Indikator: ± 80% selaras, namun masih dominan output.
- Kontribusi ekonomi daerah: ± 70% – outcome nilai tambah & PDRB belum terlihat jelas.

Tingkat integrasi keseluruhan: 87% (Kuat).

15.4.2. GAP Integrasi dan Priority Issues

Tabel GAP integrasi di halaman 268–269 mengidentifikasi beberapa *priority issue*:

1. Indikator masih didominasi output → kontribusi ke ekonomi daerah tidak langsung terbaca.
2. Kemitraan UMKM–Industri belum diukur kualitasnya → risiko kerja sama tidak berkelanjutan.
3. Digitalisasi UMKM tanpa indikator dampak ekonomi → banyak kegiatan, tetapi omzet tidak naik.
4. Peran Diskoperindag dalam ekonomi makro belum eksplisit → kontribusi ke PDRB sektor tidak tercermin dalam IKU.

Sebagai respon, direkomendasikan indikator baru seperti:

- *Persentase kontribusi SHU koperasi terhadap PDRB,*

- *Nilai transaksi supply chain UMKM–Industri,*
- *Industrial Productivity Index per subsektor,*
- *Efisiensi rantai pasok (selisih harga produsen–konsumen),*
- *Rasio UMKM aktif bertransaksi digital.*

15.5. Problem–Solution, Prioritas, dan Rencana Tindak Lanjut

5.1. Matriks Problem–Solution

Matriks problem–solution di halaman 271 merangkum hubungan antara permasalahan utama, akar masalah, dampak terhadap RPJMD, dan solusi dalam Renstra:

Permasalahan strategis antara lain:

- Koperasi banyak tidak aktif/sehat → akar masalah tata kelola lemah; solusi: pembinaan & pemeriksaan koperasi grade A (efektif, perlu tambah indikator SHU).
- UMKM belum berdaya saing tinggi → skala kecil, permodalan terbatas; solusi: pelatihan & fasilitasi usaha (outcome lemah bila tanpa indikator omzet).
- Hilirisasi industri rendah → IKM belum bersertifikasi & minim akses pasar; solusi: fasilitasi sertifikasi & SIINas (perlu indikator nilai tambah).
- Kemitraan UMKM–Industri lemah → supply chain belum solid; solusi: fasilitasi kemitraan (perlu ukur nilai transaksi & durasi MoU).
- Transformasi digital belum berdampak → onboarding tanpa monetisasi; solusi: digitalisasi UMKM (perlu indikator penjualan digital).
- Efisiensi perdagangan rendah → rantai distribusi panjang; solusi: operasi pasar & pengendalian harga (perlu indikator efisiensi logistik).
- Peran industri dalam PDRB belum maksimal → produktivitas rendah; solusi: dukungan perizinan & kepatuhan SIINas (perlu industrial productivity index).

Insight: Permasalahan yang dihadapi tepat disasar oleh program Renstra, tetapi belum disertai indikator yang menampilkan dampak ekonomi secara kuat.

15.5.2. Prioritas Isu dan Quick Wins 2025–2026

Visual *traffic light* dan Tabel Prioritas (hal. 270–273) memetakan tingkat prioritas tindak lanjut:

- High Priority (langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi):
  - Hilirisasi industri dan ekspor IKM – pengungkit utama kontribusi PDRB.
  - Outcome kesejahteraan UMKM – menentukan dampak terhadap kemiskinan dan kesejahteraan.

  - Kemitraan usaha besar–UMKM – kunci UMKM naik kelas.
  - Digitalisasi berbasis monetisasi (omzet) – fondasi transformasi ekonomi digital.
- Medium Priority:
  - Efisiensi logistik & stabilisasi harga – terkait inflasi dan daya beli.
  - Penguatan koperasi – penting untuk pemerataan, butuh penguatan pengukuran SHU.
- Low Priority:
  - Ekspor IKM dan data supply chain – berpotensi jangka menengah-panjang, namun saat ini belum dominan.

Quick Wins 2025–2026 yang diusulkan:

- Hilirisasi IKM: 5 komoditas unggulan tersertifikasi dan masuk pasar modern → indikator nilai tambah industri naik.
- Kemitraan UB–UMKM: minimal 10 MoU aktif ≥12 bulan dengan nilai transaksi supply chain terukur.
- Digitalisasi berbayar: 200 UMKM melakukan transaksi digital bulanan melalui kemitraan marketplace, perbankan, dan telko.

15.5.3. Rencana Tindak Lanjut (RTT)

Tabel RTT (halaman 274–275) merinci rencana tindak lanjut per permasalahan strategis beserta output/outcome, tahun mulai, dan penanggung jawab, misalnya:

- Hilirisasi industri & nilai tambah IKM rendah → penetapan indikator kontribusi nilai tambah industri per subsektor + program hilirisasi 5 komoditas unggulan (mulai 2025).
- Kemitraan UMKM–Industri belum berkelanjutan → MoU supply chain minimal 12 bulan dengan peningkatan nilai transaksi.
- Digitalisasi UMKM belum berkontribusi ke omzet → onboarding digital disertai pendampingan pemasaran dan indikator % UMKM aktif transaksi digital.
- Efisiensi distribusi belum terukur → monitoring selisih harga produsen–konsumen dan pengembangan indeks efisiensi logistik daerah.
- Peran koperasi belum maksimal → integrasi indikator SHU koperasi ke sistem pengukuran kontribusi ekonomi.

15.6. Monitoring, KPI Baru, dan Efektivitas Terhadap RPJMD

15.6.1. Monitoring & Evaluasi

Skema Monev yang diusulkan:

- Level Renja Diskoperindag → berbasis IKU/IKD (triwulanan).
- Level Bappeda → evaluasi capaian RPJMD (semesteran).
- Level publik → dashboard ekonomi daerah yang menampilkan kinerja UMKM digital dan transaksi.

15.6.2. KPI Outcome Baru

Untuk menutup GAP, Bab XV mengusulkan KPI outcome baru dengan target 2025–2029, antara lain:

- Peningkatan omzet UMKM binaan ≥ 10% per tahun.
- Kontribusi nilai tambah IKM terhadap PDRB sektor meningkat setiap tahun.
- Persentase UMKM aktif bertransaksi digital bulanan minimal 50% dari UMKM binaan.
- Nilai transaksi supply chain UMKM–Industri yang terus naik setiap tahun.

15.6.3. Efektivitas Desain Terhadap RPJMD

Penilaian kontribusi nyata terhadap outcome ekonomi:

- Hilirisasi industri & nilai tambah: kontribusi sangat tinggi, efektivitas desain tinggi, prioritas perbaikan pada pengukuran nilai tambah.
- Kemitraan UMKM–Industri: sangat strategis, perlu indikator transaksi supply chain.
- Digitalisasi UMKM: relevan, namun harus bergeser ke fokus monetisasi.
- Stabilitas harga & distribusi: efektif, perlu indikator efisiensi logistik.
- Tata kelola koperasi: sudah kuat, perlu pengukuran kontribusi SHU.

Keseluruhan kontribusi terhadap RPJMD dinilai Tinggi (B+), dan dengan penguatan indikator outcome bisa meningkat menjadi Sangat Tinggi (A). Radar chart pada halaman 277–278 menunjukkan:

- Indikator paling kuat: IKM tersertifikasi, koperasi sehat, stabilisasi harga.
- Indikator yang perlu percepatan: UMKM binaan (outcome omzet), kemitraan UMKM–Industri (nilai transaksi), dan khususnya UMKM digital (indikator terlemah, baru sebatas onboarding).

15.7. Kesimpulan Utama Executive Summary

1. RENSTRA Diskoperindag sangat selaras dengan RPJMD Gresik 2025–2029, khususnya dalam mendukung Misi 2 tentang percepatan pembangunan perekonomian berbasis potensi keunggulan lokal dan penguatan industri–UMKM–perdagangan.
2. Tujuan, sasaran, program, dan indikator Renstra telah mengakomodasi agenda penguatan koperasi sehat, UMKM produktif, IKM tersertifikasi, stabilisasi harga, dan modernisasi distribusi perdagangan. Dari sisi *compliance*, integrasi dinilai kuat (±87%).
3. Analisis SMART menunjukkan efektivitas indikator cukup tinggi (rata-rata 21/25), terutama pada aspek kepatuhan industri, pengawasan koperasi, dan stabilisasi harga. Namun demikian, mayoritas indikator masih output-based, belum secara penuh memotret outcome nilai tambah ekonomi, peningkatan omzet, kontribusi PDRB, dan kesejahteraan pelaku usaha.
4. GAP utama yang teridentifikasi berkaitan dengan:
    - Ketiadaan indikator nilai tambah industri/IKM dan kontribusi koperasi–UMKM terhadap PDRB,
    - Ketidakjelasan kualitas dan keberlanjutan kemitraan UMKM–industri,
    - Transformasi digital UMKM yang belum terhubung dengan indikator peningkatan omzet,
    - Minimnya indikator efisiensi logistik dan selisih harga produsen–konsumen,
    - Peran Diskoperindag dalam ekonomi makro yang belum tercermin eksplisit dalam IKU.
5. Problem–solution matrix dan RTT memberikan arah perbaikan yang jelas:
    - Fokus pada hilirisasi industri,
    - Kemitraan UMKM–industri berbasis transaksi supply chain,
    - Digitalisasi UMKM yang menghasilkan omzet,
    - Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan, serta
    - Penguatan sistem data & monitoring ekonomi sektor Diskoperindag.
6. Dengan menerapkan indikator outcome baru (omzet UMKM, nilai tambah industri, kontribusi SHU koperasi, transaksi supply chain, efisiensi harga, UMKM aktif digital) serta Quick Wins 2025–2026, RENSTRA Diskoperindag berpotensi naik dari “cukup efektif (B+)” menjadi “sangat efektif (A)” dalam mendukung sasaran RPJMD, khususnya

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis potensi industri serta UMKM lokal.

Dengan kata lain, Bab XV menegaskan bahwa tantangan Diskoperindag bukan lagi apa yang dikerjakan, tetapi bagaimana membuktikan dampak ekonominya secara terukur, sehingga kontribusinya terhadap transformasi ekonomi Gresik dapat dipantau, dipertanggungjawabkan, dan dioptimalkan sepanjang periode RPJMD 2025–2029.

BAB XVI
Analisis Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029

16.1. Latar Belakang dan Peran Strategis BPPKAD

Bab XVI mengkaji secara khusus sejauh mana Renstra BPPKAD 2025–2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, serta seberapa efektif desain indikator dan program BPPKAD dalam mendukung:

- *Kemandirian Fiskal Daerah,*
- *Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel,*
- *Optimalisasi Aset Daerah Sebagai Mesin Penerimaan, Dan*
- *Kualitas Belanja Publik (Quality Spending).*

Dalam arsitektur RPJMD, BPPKAD diposisikan sebagai "***enabler fiskal***" yang:

1. Menjamin pendapatan daerah cukup dan sehat untuk membiayai prioritas pembangunan,
2. Menjaga belanja publik efisien dan tepat sasaran,
3. Mengelola aset daerah sebagai sumber PAD yang produktif,
4. Menopang citra good governance melalui opini WTP BPK dan sistem keuangan digital.

Dengan demikian, kualitas keterkaitan Renstra BPPKAD terhadap RPJMD bukan sekadar soal kesesuaian program, tetapi juga soal kontribusi nyata terhadap transformasi ekonomi dan kemandirian fiskal Gresik.

16.2. Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan Visi–Misi RPJMD

16.2.1. Visi dan Misi RPJMD

Visi RPJMD Gresik 2025–2029 dirumuskan sebagai:

"Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat."

Visi ini dijabarkan dalam 5 Misi:

1. SDM Unggul
2. Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
3. Infrastruktur Berkelanjutan & Terintegrasi
4. Tata Kelola Pemerintahan Transparan & Akuntabel
5. Masyarakat Sejahtera Berbasis Lapangan Kerja

Tabel 16.1 menunjukkan bahwa elemen-elemen umum Renstra OPD (termasuk BPPKAD) telah dinyatakan selaras dengan visi dan misi tersebut:

- Tujuan pembangunan sektor → menunjang pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (linier dengan visi dan Misi 2 & 5).
- Program perangkat daerah → mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.
- Sasaran kinerja OPD → meningkatkan outcome ekonomi dan kualitas pelayanan publik, terkait kuat dengan Misi 4.
- Intervensi berbasis potensi lokal → memperkuat daya saing lokal, berkontribusi pada Misi 2.

Kesimpulannya: Renstra OPD, termasuk BPPKAD, secara eksplisit mendukung arah Visi–Misi daerah.

16. 2.2. Derajat Kontribusi terhadap Misi RPJMD

Tabel 16.2 mengukur derajat kontribusi Renstra terhadap masing-masing misi:

- Misi 1 (SDM Unggul): kontribusi sedang melalui pelatihan SDM sektor ekonomi.
- Misi 2 (Transformasi Ekonomi): kontribusi sangat kuat, karena kinerja fiskal (PAD, belanja, aset) merupakan fondasi percepatan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Misi 3 (Infrastruktur): kontribusi kuat lewat pengelolaan belanja dan alokasi infrastruktur.
- Misi 4 (Tata Kelola Pemerintahan): kontribusi sangat kuat, karena BPPKAD adalah aktor kunci sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Misi 5 (Kesejahteraan): kontribusi sedang–kuat melalui pembiayaan program-program kesejahteraan via APBD.

Inti temuan:

Misi 2 (Transformasi Ekonomi) dan Misi 4 (Tata Kelola) adalah domain utama kontribusi Renstra BPPKAD.

16. 2.3. Evaluasi Efektivitas Keterkaitan (Tingkat Makro)

Tabel 16.3 merangkum evaluasi efektivitas keterkaitan sebagai berikut:

- Keselarasan Tujuan: 95% → Sangat Kuat
- Rujukan Visi–Misi dalam Renstra: Ada dan eksplisit → Patuh regulasi

- Keterukuran Outcome terhadap Misi Ekonomi: Cukup, perlu peningkatan indikator berbasis dampak ekonomi
- Sinergi lintas program RPJMD: Cukup, masih cenderung sektoral

Catatan penguatan:

- Perluasan indikator berbasis dampak ekonomi & kualitas layanan,
- Penurunan capaian transformasi ekonomi dari Misi 2 ke indikator fiskal yang lebih kuat,
- Penegasan inovasi tata kelola sebagai kontribusi Misi 4,
- Pengukuran pemerataan manfaat fiskal sebagai kontribusi Misi 5.

Kesimpulan umum: Renstra BPPKAD sangat terkait dan sejalan dengan Visi–Misi RPJMD, tetapi indikator outcome ekonomi masih dapat diperkuat.

16.3. Integrasi Renstra BPPKAD dengan RPJMD di Urusan Keuangan

16.3.1. Arah RPJMD yang Relevan untuk BPPKAD

RPJMD menempatkan kemandirian fiskal, tata kelola keuangan bersih, dan optimalisasi aset daerah sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan. Fokusnya: peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, akuntabilitas, dan penguatan aset.

16.3.2. Arah Renstra BPPKAD

Renstra BPPKAD merespons dengan memuat:

- *Tujuan & sasaran kinerja keuangan,*
- *Program pendapatan & manajemen kas,*
- *Program optimalisasi aset & PAD dari aset,*
- *Program transparansi pelaporan & akuntabilitas APBD.*

Tabel 16.4 menunjukkan integrasi langsung RPJMD–Renstra:

- Kemandirian fiskal (Rasio PAD meningkat) ↔ strategi intensifikasi–ekstensifikasi pajak daerah → Selaras.
- Tata kelola keuangan (Opini WTP) ↔ akuntabilitas belanja, SP2D non-tunai → Sangat kuat.
- Optimalisasi aset daerah (nilai pemanfaatan aset meningkat) ↔ penataan dan pemanfaatan aset idle → Kuat.
- Digitalisasi keuangan (sistem keuangan terintegrasi) ↔ penguatan SIPD keuangan → Cukup kuat, perlu KPI khusus.

- Efisiensi pengelolaan APBD (belanja berkualitas meningkat) ↔ quality spending & monitoring realisasi → perlu indikator outcome.

Interpretasi:

Secara struktur program dan sasaran, Renstra BPPKAD telah meng-cover seluruh outcome RPJMD di urusan keuangan, namun indikator efisiensi & outcome fiskal masih perlu dipertajam.

16.4. Analisis Efektivitas (SMART) dan GAP Utama

16.4.1. Skor SMART Renstra BPPKAD

Tabel 16.5 menyajikan hasil SMART Review:

- Specific: indikator spesifik untuk pendapatan, belanja, aset → 5/5
- Measurable: memiliki target numerik → 4/5 (belum semua outcome ekonomi)
- Achievable: diturunkan dari kapasitas fiskal daerah → 4/5, butuh sinergi lintas OPD
- Relevant: sangat mendukung prioritas RPJMD → 5/5
- Time-bound: tahapan tahunan jelas → 5/5

Total SMART Score = 23/25 → "Sangat Efektif".

Diagram radar SMART Indicator BPPKAD di halaman 299 memperlihatkan bentuk hampir pentagon sempurna: Specific, Relevant, dan Time-Bound berada di titik maksimum, sementara Measurable dan Achievable sedikit di bawahnya, menandakan ruang perbaikan pada pengukuran outcome fiskal dan realisme capaian lintas OPD.

16.4.2. GAP Analisis – Area yang Masih Lemah

Tabel 16.6 dan Tabel 16.10, 16.17–16.19 memunculkan beberapa GAP kunci:

1. Kemandirian fiskal & pertumbuhan PAD
    - Target PAD di RPJMD menghendaki pertumbuhan agresif,
    - Renstra fokus pada intensifikasi, tetapi belum memasukkan indikator Tax Ratio / Fiscal Capacity Ratio,
    - Risiko: shortfall fiskal dan ketergantungan transfer tetap tinggi.
2. Outcome fiskal terhadap ekonomi (kontribusi ke PDRB)
    - Indikator pendapatan masih fokus pada efektivitas pemungutan (output),
    - Belum ada indikator yang mengukur perbandingan PAD terhadap PDRB (Tax Ratio),

- Risiko: kontribusi fiskal terhadap ekonomi tidak terbaca.

3. Produktivitas aset daerah (RoA)
    - Program penatausahaan dan sertifikasi aset sudah ada,
    - Namun indikator belum mengukur pendapatan per aset (yield),
    - Risiko: aset idle terus membebani APBD, tidak menjadi mesin PAD.
4. Digitalisasi pendapatan & PAD cashless
    - SIPD keuangan sudah diterapkan, tapi sistem belum sepenuhnya terintegrasi,
    - Belum ada indeks maturitas digital atau Cashless Revenue Index,
    - Risiko: potensi kebocoran dan data PAD tidak real-time.
5. Quality Spending & belanja berbasis manfaat
    - Belanja wajib dan infrastruktur diukur, tapi belum ada Quality Spending Index,
    - Risiko: belanja publik tidak sepenuhnya efektif untuk kesejahteraan.
6. SLA perencanaan–penganggaran & governance fiskal lintas OPD
    - Ketepatan waktu dokumen sudah diukur, tetapi belum menggunakan SLA (hari keterlambatan),
    - Koordinasi fiskal lintas OPD masih lemah, belum ada Fiscal Governance Committee.

Peta prioritas GAP (Tabel 16.18):

- Level Tinggi: PAD, outcome fiskal, produktivitas aset,
- Sedang: digitalisasi PAD, belanja berkualitas,
- Rendah: SLA perencanaan & koordinasi fiskal.

16.5. Integrasi Indikator Renstra–RPJMD dan Kualitas Desain IKU/IKK

16.5.1. Tingkat Keterpaduan Indikator

Tabel 16.8–16.9 menunjukkan:

- Total indikator RPJMD bidang keuangan: 12,
- 9 indikator (75%) sudah selaras dengan Renstra,
- 3 indikator (25%) perlu harmonisasi baseline/target,
- GAP terbesar: indikator PAD (pertumbuhan & rasio terhadap pendapatan daerah).

Contoh:

- Persentase BMD tercatat di sistem informasi aset → selaras penuh, tanpa GAP, outcome sudah maksimal (100%/tahun).
- Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal & Infrastruktur → selaras, namun baseline Renstra ≠ RPJMD, perlu harmonisasi data 2024.
- Efektivitas pengelolaan pendapatan daerah → selaras, tetapi baseline berbeda (95% vs 90%), menuntut rekonsiliasi angka.
- Pertumbuhan PAD & Persentase PAD terhadap pendapatan daerah → belum sepenuhnya terpetakan dalam Renstra; ini GAP data & desain terbesar.

16.5.2. Ringkasan Integrasi

Tabel 16.12 merangkum:

- Outcome RPJMD → IKU Renstra: 100% terhubung,
- Program RPJMD → Program Renstra: 100% konsisten (kodefikasi sama),
- IKU → IKK (operasionalisasi): 85% (masih ada indikator non-outcome),
- Indikator berbasis manfaat ekonomi: 70% (butuh perluasan untuk PAD & fiskal sehat).

Kesimpulan: dari sisi arsitektur perencanaan, integrasi sudah sangat baik; ruang perbaikan terutama pada pengukuran manfaat ekonomi/fiskal.

16.6. Problem–Solution Policy, Prioritas, dan RTT

16.6.1. Matriks Problem–Solution Policy

Tabel 16.14 memetakan 7 permasalahan fiskal utama beserta akar masalah, risiko, solusi eksisting, dan kebutuhan kebijakan baru:

Contoh problem–solution utama:

1. Pertumbuhan PAD tidak sejalan target RPJMD (HIGH priority)
    - Akar masalah: basis pajak stagnan, ekstensifikasi terbatas.
    - Risiko: shortfall pendapatan → belanja prioritas terancam.
    - Solusi eksisting: intensifikasi pajak & retribusi.
    - Kebijakan baru: penetapan Rasio Kemandirian Fiskal + pajak berbasis digital.
2. Outcome efektivitas pendapatan belum terukur ke manfaat ekonomi
    - Akar masalah: indikator output lebih dominan.

- Solusi baru: tambahkan Tax Ratio & kontribusi PAD terhadap PDRB.

3. Pemanfaatan aset daerah belum produktif
    - Akar masalah: aset idle, belum dikomersialisasi.
    - Solusi: penatausahaan & sertifikasi aset.
    - Kebijakan baru: KPI Return on Asset (RoA) + skema KSP/KD.
4. Belanja belum sepenuhnya berbasis kinerja
    - Kebijakan baru: Quality Spending Index per urusan/OPD.
5. Digitalisasi keuangan belum menyeluruh
    - Kebijakan baru: Cashless Revenue System dan dashboard PAD real-time.
6. Belum ada SLA pengelolaan anggaran
    - Kebijakan baru: Service Level Agreement untuk perencanaan & penatausahaan.
7. Pengawasan fiskal lintas OPD lemah
    - Kebijakan baru: pembentukan Fiscal Governance Committee lintas OPD.

16.6.2. Rekomendasi KPI Baru dan Quick Wins

Tabel 16.15 & 16.19 mengusulkan KPI strategis baru:

- Rasio Kemandirian Fiskal = PAD / Total Pendapatan
- Tax Ratio Daerah = PAD / PDRB
- Return on Asset (RoA) = Pendapatan Aset / Nilai Aset
- Quality Spending Index = Realisasi Manfaat / Belanja Publik
- Cashless Revenue Index = % Transaksi PAD non tunai

Quick Wins 2025–2026 (Tabel 16.16 & 16.20):

- 2025:
    - Audit potensi PAD & pajak digital → output: peta potensi pendapatan; outcome: kenaikan PAD signifikan di sektor prioritas.
    - Pemetaan aset idle → portofolio pemanfaatan aset; outcome: pendapatan aset meningkat.
- 2026:
    - Implementasi dashboard PAD real-time & Cashless Revenue System → outcome: transparansi tinggi, kebocoran PAD menurun.

- Implementasi Quality Spending Index → outcome: belanja produktif dan dampak pembangunan meningkat.

16.6.3. Prioritas Penutupan GAP dan RTT

Tabel 16.21–16.22 menetapkan prioritas penutupan GAP:

- HIGH Priority:
  1. Pertumbuhan PAD belum agresif & belum searah target RPJMD,
  2. Outcome fiskal (Tax Ratio, kontribusi PAD ke PDRB) belum terukur,
  3. Aset daerah kurang produktif (idle & non-revenue).
- MEDIUM Priority:
  4. Digitalisasi pendapatan belum real-time & cashless,
  5. Belanja belum terukur manfaatnya.
- LOW Priority:
  6. SLA perencanaan–penganggaran belum jadi indikator utama,
  7. Koordinasi fiskal lintas OPD.

RTT menyusun langkah konkret: penyusunan kurva target PAD tahunan, penetapan IKU baru (Tax Ratio, kontribusi PAD–PDRB), program komersialisasi aset, integrasi SIPD–Pendapatan, penerapan Quality Spending Index, SLA keuangan, dan pembentukan Fiscal Governance Committee.

16.7. Kontribusi terhadap Misi RPJMD dan Kesimpulan Utama

16.7.1. Kontribusi terhadap Misi 2, 4, dan 5

Tabel 16.26 menunjukkan:

- Misi 2 (Transformasi Ekonomi):
  - Kontribusi melalui pertumbuhan pendapatan & aset daerah → efektivitas empat bintang (★★★★).
- Misi 4 (Tata Kelola Pemerintahan):
  - Fokus akuntabilitas fiskal & WTP → kontribusi lima bintang (★★★★★) (kontribusi terbesar).
- Misi 5 (Kesejahteraan Masyarakat):
  - Dampak melalui belanja pelayanan publik → tiga bintang (★★★), masih dapat ditingkatkan dengan Quality Spending Index.

16.7.2. Kesimpulan Evaluatif

1. Desain Renstra BPPKAD sudah sangat efektif dan sepenuhnya terintegrasi dengan RPJMD untuk urusan keuangan, pendapatan, dan aset.
    - SMART Score 23/25,
    - Outcome RPJMD → IKU Renstra: 100% terlacak,
    - Program RPJMD → Program Renstra: 100% konsisten.
2. Kontribusi terbesar Renstra BPPKAD adalah pada Misi 4 (Tata Kelola Pemerintahan), namun sekaligus memegang peran strategis dalam Misi 2 (Transformasi Ekonomi) dan Misi 5 (Kesejahteraan) melalui pembiayaan layanan publik dan peningkatan daya fiskal.
3. GAP utama bersifat outcome-based, bukan administratif, yaitu:
    - Pertumbuhan PAD yang belum agresif dan belum mengikuti kurva transformasi ekonomi,
    - Outcome fiskal (Tax Ratio, kemandirian fiskal, kontribusi PAD–PDRB) yang belum diukur,
    - Produktivitas aset (RoA) yang belum menjadi indikator kunci,
    - Belanja berkualitas dan digitalisasi PAD yang belum sepenuhnya diukur dari sisi manfaat & transparansi.
4. Jika GAP fiskal ini tidak ditutup, risiko yang muncul adalah:
    - Kemandirian fiskal stagnan, ketergantungan transfer pusat tetap tinggi,
    - Kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terbaca,
    - Aset tetap menjadi beban, bukan mesin PAD,
    - Belanja publik berisiko kurang efektif dalam mendorong kesejahteraan.
5. Dengan penambahan indikator strategis (Tax Ratio, Rasio Kemandirian Fiskal, RoA Daerah, Quality Spending Index, Cashless Revenue Index) serta pelaksanaan Quick Wins dan RTT 2025–2026, efektivitas desain Renstra BPPKAD diproyeksikan naik ke kategori “A – Sangat Tinggi” dan peran BPPKAD sebagai enabler utama transformasi ekonomi Gresik akan semakin jelas dan terukur.

Secara keseluruhan, Bab XVI menegaskan bahwa BPPKAD sudah sangat kuat pada aspek tata kelola fiskal, dan dengan penguatan indikator outcome fiskal, OPD ini akan menjadi pengungkit kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang krusial bagi keberhasilan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.

BAB XVII
Analisis Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas PMD (DPMD) dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029

17.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DPMD dalam RPJMD

Bab XVII mengulas bagaimana Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD):

1. *Selaras dengan Visi–Misi RPJMD Gresik 2025–2029,*
2. *Terintegrasi dengan isu strategis pembangunan desa,*
3. *Efektif (berdasarkan SMART Analysis) sebagai dokumen perencanaan, dan*
4. *Memiliki GAP (kesenjangan) terutama pada pengukuran outcome ekonomi & sosial desa yang berdampak ke capaian RPJMD.*

Dalam kerangka RPJMD, DPMD diposisikan sebagai motor pembangunan wilayah berbasis desa yang menopang:

- *Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah (Ekonomi Desa, Bumdes, Pades),*
- *Pemerataan Pembangunan Antarwilayah (Status Desa, Infrastruktur Desa),*
- *Penguatan Tata Kelola & Reformasi Birokrasi Desa,*
- *Pencapaian Target Sosial (Kemiskinan, Stunting, Sanitasi) Melalui Sdgs Desa.*

Dengan kata lain, kualitas Renstra DPMD sangat menentukan apakah desa benar-benar menjadi penggerak transformasi ekonomi dan sosial dalam RPJMD 2025–2029.

17.2. Keterkaitan Renstra DPMD dengan Visi–Misi dan Isu Strategis RPJMD

17.2.1. Keselarasan dengan Visi RPJMD

Renstra DPMD secara eksplisit menyebut bahwa ia menjabarkan Visi RPJMD:

"*Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat*."

Makna keterkaitan yang dirumuskan:

- Pemberdayaan Ekonomi Desa → Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Penguatan Basis Ekonomi Kerakyatan,
- Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Digital → Mendukung Tata Kelola Modern, Transparan, Dan Berkelanjutan,
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa → Berkontribusi Langsung Pada Tujuan Kesejahteraan RPJMD.

Kesimpulan: *Renstra DPMD layak disebut sebagai pengungkit utama visi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa*.

17.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Renstra DPMD merumuskan tujuan strategis:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di tingkat desa melalui transformasi digital guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat desa…"

Keterkaitan dengan Misi RPJMD (diinterpretasi dalam tabel di halaman awal bab):

- Misi Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat
  → Melalui BUMDes maju, PADes meningkat, desa mandiri → kontribusi pada ekonomi kerakyatan & kesejahteraan.
- Misi Reformasi Birokrasi & Digitalisasi Pemerintahan
  → Melalui transformasi digital desa, OpenSID, tata kelola digital → mendukung pemerintahan modern.
- Misi Pemerataan Pembangunan Antarwilayah → Melalui peningkatan kemandirian desa & infrastruktur publik desa → mengurangi kesenjangan antardesa.
- Misi Peningkatan Kualitas SDM
  → Melalui penguatan kapasitas aparatur desa & kelembagaan masyarakat.

Penilaian: Keterkaitan Renstra–Misi RPJMD dinilai kuat, karena seluruh sasaran Renstra beririsan langsung dengan target RPJMD.

17.2.3. Integrasi terhadap Isu Strategis Daerah

Renstra DPMD mengidentifikasi beberapa isu strategis yang sangat aligned dengan tantangan daerah:

- *Optimalisasi Aset Dan Usaha Desa (Bumdes),*
- *Kualitas SDM Aparatur & Data Desa,*
- *Digitalisasi Dan Tata Kelola Desa,*
- *Pengentasan Kemiskinan & Stunting Di Desa,*
- *Kemandirian Fiskal Desa (Pades Dan Usaha Desa).*

Isu-isu tersebut adalah persis simpul kebijakan RPJMD (ekonomi wilayah, kemiskinan, ketimpangan, SDGs, tata kelola), sehingga Renstra dinilai responsif terhadap masalah pembangunan wilayah.

17.2.4. Kontribusi terhadap Tujuan Makro RPJMD

Renstra DPMD menegaskan outcome tingkat wilayah:

"Meningkatkan return on aset usaha desa dan meningkatnya pendapatan asli desa serta jumlah desa mandiri yang semakin banyak."

Kontribusi strategisnya:

- BUMDes → basis ekonomi kerakyatan & sumber pertumbuhan wilayah,
- Digital governance desa → efisiensi & transparansi fiskal desa,
- Kelembagaan desa kuat → partisipasi sosial dan kapasitas lokal meningkat,
- SDM desa unggul → kesiapan kerja lokal & daya saing berkelanjutan.

Ini sejalan dengan indikator RPJMD: penurunan ketimpangan wilayah, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan tata kelola.

17.2.5. Ringkasan Konsistensi

Rekap kesimpulan (tabel "Kesimpulan Utama – Dimensi Konsistensi"):

- Visi–Misi: ✓✓✓ → Sangat Kuat,
- Isu Strategis: ✓✓ → Kuat (perlu penajaman inklusi sosial & ketangguhan desa),
- Outcome RPJMD: ✓✓✓ → Sangat Kuat,

Overall: Renstra DPMD memiliki konsistensi tinggi terhadap RPJMD Kabupaten Gresik.

17.3. Hasil SMART Analysis dan Efektivitas Desain Indikator

17.3.1. Landasan Indikator Renstra DPMD

Lima kelompok indikator utama diidentifikasi sebagai "landasan Renstra":

1. *Peningkatan Jumlah Desa Mandiri,*
2. *Pendapatan Asli Desa (Pades),*
3. *Peningkatan Return On Asset (Roa) Desa,*
4. *Transformasi Digital Desa,*
5. *Penguatan Tata Kelola & SDM Desa.*

17.3.2. Skor SMART

Tabel 17.1 – SMART Analysis memberikan hasil:

- Specific (S): ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
    - Indikator jelas menggambarkan urusan DPMD (desa mandiri, BUMDes, PADes, tata kelola, SDM desa).
    - Sudah mengarah ke modernisasi desa & ekonomi lokal.
- Measurable (M): ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆
    - Target kuantitatif tersedia (desa mandiri, usaha desa, PADes).
    - Namun masih dominan output, belum sepenuhnya mengukur nilai ekonomi wilayah.
- Achievable (A): ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆
    - Target realistis, berbasis baseline desa.
    - Perlu dukungan lintas OPD (kecamatan, ekonomi, sosial).
- Relevant (R): ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
    - Sangat selaras dengan visi pemberdayaan ekonomi & tata kelola desa.
    - Kontribusi langsung pada penciptaan pusat pertumbuhan wilayah baru.
- Time-Bound (T): ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
    - Target tahunan 2025–2029 lengkap, memenuhi kaidah Permendagri 86/2017.

SMART Score total = 23/25 → “Sangat Efektif” sebagai dokumen perencanaan.

17.4. GAP Analysis: Keterbatasan terhadap Kebutuhan Outcome RPJMD

17.4.1. GAP terhadap Sasaran Makro RPJMD

Tabel 17.2 – GAP Analysis membandingkan indikator Renstra dengan kebutuhan outcome RPJMD. Ringkasannya:

1. Sasaran: Pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah
    - Indikator DPMD: PADes meningkat, BUMDes berkembang.
    - GAP: belum menghitung kontribusi terhadap PDRB wilayah → dampak ekonomi tidak terbaca.
    - Rekomendasi: tambah indikator kontribusi usaha desa ke PDRB.
2. Sasaran: Pengurangan ketimpangan pembangunan
    - Indikator: desa mandiri meningkat.

- GAP: tidak mengukur pemerataan antar kecamatan/desa.
- Rekomendasi: tambah Indeks Disparitas Desa.

3. Sasaran: Tata kelola desa transparan & responsif
    - Indikator: digitalisasi & SDM desa.
    - GAP: belum mengukur kepatuhan layanan & SLA desa.
    - Rekomendasi: indikator Service Level Desa (kecepatan layanan).
4. Sasaran: Kesejahteraan sosial desa (kemiskinan, stunting)
    - Isu disebut, namun indikator spesifik belum melekat pada kinerja desa.
    - Rekomendasi: integrasi SDGs Desa (kemiskinan, stunting, sanitasi) dalam IKU/IKK.
5. Sasaran: Optimalisasi aset desa
    - RoA desa disebut, tetapi belum menjadi KPI utama.
    - Rekomendasi: jadikan RoA Desa sebagai indikator kinerja inti.

Diagnosa di halaman 304 menegaskan:

"Tata kelola desa kuat, namun dampak ekonomi & manfaat sosial belum terukur terstruktur. Dua GAP paling kritis: outcome ekonomi wilayah (PDRB & pemerataan) dan outcome sosial desa (kemiskinan, stunting, layanan)."

17.4.2. Rekomendasi KPI Baru (Penutup GAP)

Tiga KPI tambahan utama yang diusulkan:

1. Kontribusi BUMDes terhadap PDRB kecamatan
    - Mengukur outcome ekonomi desa.
    - Formula cepat: Pendapatan BUMDes / PDRB wilayah.
2. Indeks Disparitas Desa
    - Mengukur keadilan pembangunan:
    - (Skor Desa Maju – Desa Tertinggal) / Total Desa.
3. SDGs Desa Priority Index
    - Mengukur outcome sosial: % capaian pilar sosial per desa (kemiskinan, stunting, sanitasi).

17.5. Integrasi Renstra DPMD – RPJMD dan Temuan Strategis

17.5.1. Matriks Integrasi Indikator

Tabel 17.3 – Matriks Integrasi Indikator Renstra DPMD ↔ RPJMD menunjukkan:

- Transformasi ekonomi wilayah
  - Indikator RPJMD: pertumbuhan ekonomi.
  - IKU DPMD: Return on Aset Usaha Desa → integrasi ✓✓ (kuat) namun belum mengukur kontribusi PDRB; perlu pembobotan per kecamatan.
- Penurunan kemiskinan
  - Indikator RPJMD: tingkat kemiskinan.
  - IKU DPMD: realisasi program pengentasan kemiskinan desa → ✓✓✓ (sangat relevan) tetapi outcome belum otomatis melukiskan penurunan kemiskinan.
- Perlindungan sosial
  - Indikator RPJMD: rasio jaminan sosial tenaga kerja.
  - IKU DPMD: Rasio Jaminan Sosial Ekosistem Desa → ✓✓✓ (sangat relevan).
- Reformasi birokrasi desa
  - Indikator RPJMD: indeks reformasi birokrasi.
  - IKU DPMD: Indeks profesionalitas aparatur desa → ✓✓✓, DPMD berpotensi menjadi leading sector IRB Desa.
- Ketimpangan antarwilayah
  - Indikator RPJMD: pemerataan pembangunan.
  - IKU DPMD: persentase desa mandiri → ✓✓, tapi belum mengukur disparitas.
- Infrastruktur publik desa
  - IKU/IKK: persentase infrastruktur publik desa kondisi baik → ✓✓✓, outcome langsung ke layanan publik.
- Ekonomi kerakyatan & konektivitas antar desa
  - IKK: persentase BUMDes maju dan kerja sama antar desa → ✓✓, namun masih perlu indikator omzet/PADes dan basis supply chain.

Hasil utama integrasi (tabel 17.4–17.6):

- *Keterkaitan IKU ↔ sasaran RPJMD: Sangat Kuat,*
- *Keterkaitan IKK ↔ prioritas pembangunan desa: Kuat,*
- *Orientasi outcome ekonomi & sosial: Belum optimal,*
- *Kesenjangan indikator PDRB & disparitas: Masih ada (perlu diperkuat).*

17.5.2. Temuan Strategis

Empat poin strategis yang harus muncul dalam evaluasi RPJMD:

1. IKU DPMD berkontribusi langsung pada kemiskinan, reformasi birokrasi, dan ekonomi desa.
2. Outcome makro belum dihitung → perlu ukur kontribusi BUMDes terhadap PDRB wilayah.
3. Belum ada indikator ketimpangan antardesa → risiko kesenjangan tetap tinggi.
4. Penguatan SDGs Desa (stunting, sanitasi, kemiskinan ekstrem) belum tercermin eksplisit.

17.6. Problem–Solution Policy, Prioritas Intervensi, dan RTT

17.6.1. Matriks Problem–Solution Policy (Tabel 17.5)

Terdapat 7 permasalahan strategis dengan akar masalah, risiko, solusi eksisting, dan kebutuhan intervensi baru:

1. Dampak ekonomi desa tidak terukur ke PDRB
    - Akar: indikator PADes/BUMDes masih output.
    - Solusi baru: tambahkan indikator kontribusi ekonomi desa ke PDRB – prioritas ⭐⭐⭐⭐⭐.
2. Ketimpangan antar desa berpotensi tinggi
    - Akar: hanya ukur jumlah desa mandiri.
    - Solusi: tambah Indeks Disparitas Desa – prioritas ⭐⭐⭐⭐⭐.
3. Outcome sosial desa (kemiskinan, stunting) belum indikator utama
    - Akar: indikator fokus kelembagaan.
    - Solusi: integrasi KPI SDGs Desa Prioritas – prioritas ⭐⭐⭐⭐.
4. Produktivitas BUMDes belum menjamin manfaat publik
    - Akar: belum ukur omzet & tenaga kerja desa.
    - Solusi: tambah indikator omzet dan serapan tenaga kerja desa – prioritas ⭐⭐⭐⭐.
5. Tata kelola digital desa belum mengukur mutu pelayanan
    - Akar: belum ada SLA (Service Level Agreement).
    - Solusi: indikator Service Level Desa – prioritas ⭐⭐⭐⭐.

6. Nilai aset desa belum menjadi output utama kinerja
    - Akar: aset idle tidak dimonetisasi.
    - Solusi: jadikan RoA Desa sebagai IKU prioritas & buat portofolio aset – prioritas ⭐ ⭐ ⭐.
7. Kerja sama antar desa belum berdampak ekonomi
    - Akar: kerja sama masih administratif, bukan rantai pasok.
    - Solusi: kerjasama berbasis supply chain usaha desa – prioritas ⭐ ⭐ ⭐.

Inti kesimpulan problem–solution:

IKU DPMD sudah kuat, tetapi belum "*Sangat Kuat Keterkaitannya*" dengan outcome ekonomi & sosial wilayah. *Tiga GAP paling kritis: Outcome ekonomi desa (PDRB+PADes), pemerataan (disparitas), dan outcome sosial (SDGs Desa).*

17.6.2. Quick Wins 2025–2026 dan Prioritas Intervensi

Quick Wins 2025–2026 (tabel 17.6 & 17.8):

- 2025
    1. *Integrasi pemetaan ekonomi desa ke PDRB → menghasilkan peta kontribusi ekonomi desa per kecamatan.*
    2. *Penetapan Indeks Disparitas Desa → baseline disparitas desa sebagai dasar intervensi.*
- 2026
    3. *Pengembangan Dashboard SDGs Desa + SLA layanan → monitoring real-time stunting, kemiskinan, sanitasi dan kinerja layanan desa.*

Tiga fokus intervensi tertinggi yang *wajib* jadi prioritas 2025–2026:

1. *Peningkatan kontribusi ekonomi desa terhadap PDRB wilayah,*
2. *Pengurangan ketimpangan antar desa (Indeks Disparitas Desa),*
3. *Peningkatan outcome sosial desa (kemiskinan, stunting) melalui SDGs Desa.*

17.6.3. Rencana Tindak Lanjut (RTT) Renstra DPMD 2025–2029

Tabel 17.7 memuat RTT yang menghubungkan prioritas masalah dengan aksi, output, outcome RPJMD, tahun mulai, dan penanggung jawab:

Contoh RTT:

- *HIGH – Dampak ekonomi desa belum terukur ke PDRB*

  - *Aksi: menambah indikator kontribusi ekonomi desa ke PDRB + pemetaan potensi per wilayah.*
  - *Output: peta potensi ekonomi desa/kecamatan.*
  - *Outcome: transformasi ekonomi wilayah (Misi 2).*
- *HIGH – Pemerataan pembangunan antar desa belum terukur*
  - *Aksi: menetapkan Indeks Disparitas Desa.*
  - *Output: baseline & peta disparitas desa.*
  - *Outcome: pemerataan pembangunan (Misi 3 & 5).*
- *HIGH – Indikator sosial desa belum jadi KPI Renstra*
  - *Aksi: integrasi SDGs Desa prioritas (kemiskinan, stunting, sanitasi) dalam IKU/IKK.*
  - *Output: dashboard SDGs Desa.*
  - *Outcome: penurunan kemiskinan & stunting (Misi 1 & 5).*
- *MEDIUM – Produktivitas usaha desa belum mencerminkan nilai ekonomi*
  - *Aksi: indikator omzet BUMDes & tenaga kerja desa.*
- *MEDIUM – Tata kelola digital desa belum mengukur kecepatan layanan*
  - *Aksi: penerapan SLA pelayanan desa.*
- *MEDIUM – Aset desa belum optimal*
  - *Aksi: portofolio pemanfaatan aset (KSP/KD) → PADes meningkat.*
- *LOW – Kerja sama antar desa belum berbasis supply chain*
  - *Aksi: mendorong kemitraan usaha antar desa untuk memperluas pasar.*

17.7. Efektivitas Per-Kelompok Indikator dan Dampak ke RPJMD

17.7.1. Efektivitas per Kelompok Indikator (Tabel 17.10)

Penilaian ringkas:

- Tata kelola & SDM desa
  - Indikator: indeks profesionalitas aparatur desa, digitalisasi, tata kelola.
  - Efektivitas: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ – sangat kuat, linkage jelas ke reformasi birokrasi & layanan publik.
- Ekonomi desa & BUMDes
  - Indikator: RoA usaha desa, BUMDes maju, PADes.

- Efektivitas: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ – arah sudah benar, tetapi perlu indikator kontribusi PDRB & tenaga kerja.

- Kemandirian & status desa
  - Indikator: persentase desa mandiri/berkembang.
  - Efektivitas: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ – kuat, namun belum mengukur disparitas antar desa.
- Perlindungan sosial & ekosistem desa
  - Indikator: rasio jaminan sosial ekosistem desa, program pengentasan kemiskinan desa.
  - Efektivitas: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ – relevan, tetapi penurunan kemiskinan/stunting belum eksplisit.
- Infrastruktur & pelayanan publik desa
  - Indikator: infrastruktur publik desa dalam kondisi baik, kerjasama antar desa.
  - Efektivitas: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ☆ – mendukung pemerataan layanan, namun SLA layanan belum menjadi indikator utama.

17.7.2. Skoring SMART per Indikator (Tabel 17.11)

Semua 8 indikator kunci memiliki skor **≥22/25** (kategori efektif–sangat efektif), tidak ada yang lemah:

- Indeks profesionalitas aparatur desa: 24 (sangat efektif – cerminkan reformasi birokrasi desa).
- RoA usaha desa: 23 (efektif – perlu ukur kontribusi PDRB).
- Persentase desa mandiri: 23 (efektif – perlu indikator disparitas).
- Realisasi program pengentasan kemiskinan desa: 22 (cukup efektif – belum mengukur outcome kemiskinan/stunting).
- Rasio jaminan sosial ekosistem desa: 23 (efektif – sejalan perlindungan sosial).
- Infrastruktur publik desa kondisi baik: 22 (efektif – perlu SLA).
- Persentase BUMDes maju: 22 (efektif – perlu omzet & serapan tenaga kerja).
- Kerja sama antar desa: 22 (efektif – perlu berbasis rantai pasok ekonomi).

Rata-rata: 23/25 → Tidak ada indikator yang lemah; gap terbesar ada pada pengukuran outcome ekonomi & sosial wilayah.

17.8. Mekanisme Monev dan Target Breakthrough 2025–2026

17.8.1. Skema Monitoring & Evaluasi

Tabel 17.8 menggambarkan 3 level Monev:

- Level OPD: Evaluasi Renja DPMD (triwulan) → memantau perubahan skor KPI prioritas.
- Level Daerah: Evaluasi RPJMD (semester) → memantau kontribusi ekonomi & sosial desa.
- Level publik: Dashboard Desa (real-time) → memastikan layanan desa responsif & inklusif.

17.8.2. Target Breakthrough 2025–2026

Empat *breakthrough targets* kunci:

1. *Kontribusi ekonomi desa mulai dihitung dalam PDRB wilayah.*
2. *Indeks Disparitas Desa dilembagakan sebagai indikator resmi pemerataan.*
3. *Dashboard SDGs Desa aktif hingga level RT untuk stunting & kemiskinan.*
4. *Minimal 50 BUMDes naik kelas, dengan peningkatan omzet & serapan kerja lokal.*

Hasil akhir yang dituju:

"Desa menjadi motor utama transformasi ekonomi dan sosial di Kabupaten Gresik."

17.9. Kesimpulan Utama Executive Summary

1. Renstra DPMD memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi terhadap RPJMD 2025–2029.

   Visi, misi, tujuan, sasaran, dan isu strategis yang diusung Renstra seluruhnya sejalan dengan arah RPJMD, terutama pada transformasi ekonomi wilayah berbasis desa, pemerataan pembangunan, reformasi tata kelola desa, dan pencapaian target sosial.
2. Desain indikator Renstra DPMD dinilai "Sangat Efektif" (SMART Score 23/25) – Specific, Relevant, dan Time-Bound sudah maksimal; Measurable dan Achievable juga tinggi, meskipun masih bisa ditingkatkan melalui penguatan outcome ekonomi dan sosial.
3. Kekuatan utama Renstra DPMD adalah pada:
   - Penguatan tata kelola & SDM desa (reformasi birokrasi & digitalisasi),
   - Pemberdayaan ekonomi desa & BUMDes,
   - Peningkatan status desa mandiri,
   - Penguatan ekosistem perlindungan sosial desa.

4. GAP utama yang masih tersisa berkaitan dengan:
    - Belum terukurnya kontribusi ekonomi desa terhadap PDRB dan PAD daerah,
    - Belum adanya Indeks Disparitas Desa sehingga pemerataan pembangunan antarwilayah belum terbukti secara kuat,
    - Outcome sosial (kemiskinan, stunting, sanitasi) yang belum menjadi indikator "bintang utama" dalam Renstra,
    - Belum diukurnya omzet & serapan tenaga kerja desa dari BUMDes, serta SLA pelayanan desa.
5. Problem–Solution Policy dan RTT menyajikan agenda penguatan yang jelas:
    - Menetapkan indikator kontribusi ekonomi desa ke PDRB,
    - Membangun Indeks Disparitas Desa dan menjadikannya indikator pemerataan,
    - Mengintegrasikan SDGs Desa Prioritas (kemiskinan, stunting, sanitasi) ke IKU/IKK,
    - Mengukur omzet & tenaga kerja BUMDes, menerapkan SLA layanan desa, dan memonetisasi aset desa.
6. Jika seluruh rekomendasi KPI baru, Quick Wins 2025–2026, dan RTT dijalankan secara konsisten, Renstra DPMD berpotensi naik dari "Sangat Efektif di level desain" menjadi "Sangat Mengungkit di level outcome" – yaitu:
    - Desa menjadi kontributor terukur terhadap PDRB dan penurunan kemiskinan,
    - Ketimpangan antardesa menurun nyata,
    - Target sosial RPJMD (kemiskinan, stunting, sanitasi, layanan dasar) lebih cepat tercapai,
    - Desa benar-benar menjadi motor transformasi ekonomi dan sosial Kabupaten Gresik sepanjang periode RPJMD 2025–2029.

BAB XVIII
Analisis Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029

18.1. Latar Belakang dan Peran Strategis Disnaker

Bab XVIII menjelaskan secara sistematis seberapa kuat Renstra Dinas Tenaga Kerja 2025–2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029 serta seberapa efektif desain indikator dan program Disnaker dalam mendukung:

- *Penurunan Pengangguran (TPT),*
- *Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),*
- *Penguatan Produktivitas Dan Kompetensi Tenaga Kerja,*
- *Perlindungan Pekerja Dan Pekerja Migran Indonesia (PMI),*
- *Harmonisasi Hu*bungan industrial dan transformasi ekonomi berbasis tenaga kerja.

Visi RPJMD "***Gresik Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berkeadilan***" diterjemahkan Disnaker terutama pada empat aspek:

- *Berdaya saing → peningkatan produktivitas & kompetensi,*
- *Sejahtera → penyerapan kerja, peningkatan pendapatan, perlindungan pekerja dan PMI,*
- *Berkelanjutan → SDM unggul untuk pertumbuhan jangka panjang,*
- *Berkeadilan → akses kerja inklusif bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan.*

Dengan demikian, Disnaker diposisikan sebagai aktor kunci transformasi ekonomi dan kesejahteraan melalui kebijakan ketenagakerjaan.

18.2. Keterkaitan Renstra Disnaker dengan Visi–Misi RPJMD

18.2.1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Tabel 18.1 menunjukkan hubungan langsung antara misi RPJMD dan dukungan Renstra Disnaker:

- Misi 1 – Meningkatkan kesejahteraan & kualitas SDM → Didukung melalui pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) modern, peningkatan daya saing lulusan.→ Integrasi dinilai **sangat kuat (★★★★★)** karena langsung menyasar peningkatan kapasitas SDM.

- Misi 2 – Transformasi ekonomi berbasis industri & peluang usaha → Didukung program penempatan tenaga kerja di sektor industri, penguatan produktivitas sektor prioritas.

  → Integrasi kuat (★★★★☆), namun masih membutuhkan indikator kontribusi ekonomi tenaga kerja terhadap PDRB sektoral.
- Misi 3 – Mengurangi kesenjangan wilayah & kelompok Masyarakat → Didukung oleh kebijakan inklusi ketenagakerjaan: pelatihan dan penempatan bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan.

  → Integrasi kuat (★★★★☆), tetapi pemerataan antarwilayah/sektor belum diukur secara eksplisit.
- Misi 4 – Tata kelola pemerintahan yang professional → Didukung penyelesaian hubungan industrial (HI), pengembangan sistem data pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan.

  → Integrasi sangat kuat (★★★★★).
- Misi 5 – Pembangunan sosial & perlindungan Masyarakat → Didukung perlindungan tenaga kerja & PMI, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.

  → Integrasi sangat kuat (★★★★★).

Kesimpulan awal:

Renstra Disnaker selaras kuat dengan seluruh misi RPJMD, dengan dampak terbesar pada kesejahteraan & kualitas SDM (Misi 1), transformasi ekonomi tenaga kerja (Misi 2) serta perlindungan sosial (Misi 5).

18.3. Pemetaan Tujuan–Sasaran–Indikator dan GAP Keterkaitan

18.3.1. Pemetaan Tujuan–Sasaran–Outcome

Tabel 18.2 memetakan Tujuan–Sasaran RPJMD dengan kontribusi Renstra Disnaker dan outcome yang diharapkan:

1. Tujuan: Peningkatan kesejahteraan masyarakat
   - Sasaran RPJMD: penurunan TPT & kemiskinan.
   - Kontribusi Disnaker: penempatan tenaga kerja, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
   - Outcome: pengangguran menurun, pendapatan rumah tangga meningkat.

2. Tujuan: Peningkatan daya saing SDM
    - Sasaran: SDM unggul & kompetitif.
    - Kontribusi: upskilling & reskilling tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi.
    - Outcome: tenaga kerja kompetitif di pasar industri lokal, nasional, dan global.
3. Tujuan: Pemerataan kesempatan kerja
    - Sasaran: akses kerja bagi kelompok rentan.
    - Kontribusi: kuota inklusi pelatihan & penempatan bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan.
    - Outcome: pemerataan kesempatan kerja antar-gender dan kelompok sosial.
4. Tujuan: Stabilitas sosial–ekonomi
    - Sasaran: hubungan industrial harmonis.
    - Kontribusi: penyelesaian perselisihan HI, perluasan jaminan sosial pekerja.
    - Outcome: konflik industrial menurun, risiko PHK massal berkurang.

Secara garis besar, semua tujuan dan sasaran utama RPJMD di bidang ketenagakerjaan mendapatkan dukungan indikator dan program dalam Renstra Disnaker.

18.3.2. GAP Alignment Utama

Tabel 18.3 (GAP Alignment) menyoroti tiga area yang perlu diperkuat agar keterkaitan Renstra–RPJMD lebih terukur:

1. Outcome ekonomi tenaga kerja belum terukur ke PDRB
    - Kontribusi sektor tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi daerah belum terbaca.
    - Rekomendasi: menambah indikator kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB sektoral (misalnya kontribusi pekerja terserap ke pertumbuhan sektor industri).
2. Pemerataan tenaga kerja antarwilayah/sektor belum diukur
    - Risiko TPT terkonsentrasi di wilayah tertentu atau di sektor yang tidak berkembang.
    - Rekomendasi: mengembangkan Indeks Disparitas Ketenagakerjaan per wilayah dan sektor.

3. Dampak perlindungan PMI terhadap kesejahteraan keluarga belum terukur
    - Selama ini indikator PMI lebih bersifat administratif (jumlah difasilitasi/perizinan).
    - Rekomendasi: menambah indikator remitansi dan dampak sosial-ekonomi keluarga PMI.

Dengan penutupan GAP tersebut, kontribusi Disnaker terhadap Misi 2 (Transformasi Ekonomi) dan Misi 3 (Pemerataan) akan menjadi lebih kuat dan akuntabel.

18.4. Efektivitas Desain Renstra dengan Metode SMART

18.4.1. Penilaian SMART secara Umum

Tabel 18.4 menampilkan penilaian SMART terhadap keseluruhan indikator Renstra Disnaker:

- *Specific (5/5)*
  Indikator jelas mengarah pada outcome ketenagakerjaan: TPT, TPAK, penempatan kerja, produktivitas, perlindungan PMI, penyelesaian HI.
- *Measurable (4/5)*
  Seluruh indikator memiliki target kuantitatif tahunan, namun sebagian masih menghitung output (jumlah peserta pelatihan, jumlah penempatan), belum sepenuhnya outcome ekonomi.
- *Achievable (4/5)*
  Target disusun berdasarkan capaian 2024 (TPT, TPAK, penempatan kerja) dan realistis, tetapi memerlukan dukungan sektor industri agar penyerapan kerja berjalan.
- *Relevant (5/5)*
  Sangat selaras dengan Misi Ekonomi & Kesejahteraan RPJMD (penurunan pengangguran, pelindungan pekerja, transformasi industri).
- *Time-bound (5/5)*
  Target tahunan 2025–2029 disusun lengkap dan memenuhi ketentuan Permendagri 86/2017.

Total skor SMART: 23/25 → “Sangat Efektif”.

Artinya, secara desain Renstra Disnaker sudah sangat kuat, dengan ruang perbaikan utama pada aspek Measurable (outcome ekonomi) dan Achievable (sinergi dengan industri).

18.4.2. SMART Scoring per Indikator

Tabel 18.7 merinci skor SMART untuk 8 indikator kinerja Renstra:

- *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) → 24/25 (Sangat Efektif)*
- *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) → 23/25 (Efektif)*
- *Penempatan Tenaga Kerja (lokal + AKAD) → 23/25 (Efektif)*
- *Produktivitas / Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja → 23/25 (Efektif)*
- *Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan → 24/25 (Sangat Efektif)*
- *Tenaga Kerja Terlindungi Jaminan Sosial → 23/25 (Efektif)*
- *Penempatan dan Perlindungan PMI → 22/25 (Cukup Efektif)*
- *Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan → 21/25 (Efektif, perlu penguatan sistem data)*

Interpretasinya:

- *Tidak ada indikator yang lemah (skor < 18),*
- *Mayoritas indikator sudah Efektif–Sangat Efektif,*
- *Kelemahan relatif ada pada PMI dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan karena belum menunjukkan outcome ekonomi & sosial secara penuh.*

Diagram radar di halaman 324–325 (Diagram 18.1 dan 18.2) memperlihatkan pola hampir lingkaran penuh, menandakan desain indikator sudah komprehensif, dengan titik sedikit lebih rendah pada Measurable & Achievable serta Outcome Ekonomi & Pemerataan.

18.5. Integrasi Indikator Renstra Disnaker ↔ RPJMD

18.5.1. Matriks Integrasi dan Skor

Tabel 18.8 memetakan indikator RPJMD dengan IKU/IKK Disnaker:

- Sasaran menurunkan TPT ↔ TPT & rasio penyerapan tenaga kerja lokal → integrasi sangat kuat (✓✓✓).
- Meningkatkan akses terhadap lapangan kerja ↔ TPAK dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan (AKAD & AKL) → sangat kuat (✓✓✓).
- Pembangunan inklusif ↔ rasio penempatan perempuan & disabilitas → kuat (✓✓).
- Peningkatan kesejahteraan pekerja ↔ rasio pekerja penerima jaminan sosial → sangat kuat (✓✓✓).

- Tata kelola & daya saing tenaga kerja industri ↔ indikator produktivitas melalui pelatihan → sangat kuat (✓✓✓).
- Perlindungan PMI ↔ jumlah CPMI/PMI dilindungi → sangat kuat (✓✓✓).
- Digitalisasi pasar kerja ↔ jumlah pencari & pemberi kerja terdaftar online → kuat (✓✓).

Tabel 18.14 dan 18.15 kemudian menegaskan:

- Dukungan terhadap penurunan TPT dan peningkatan TPAK dinilai sangat kuat,
- Dukungan terhadap transformasi ekonomi & pemerataan akses kerja dinilai kuat, namun perlu indikator kontribusi PDRB dan disparitas ketenagakerjaan.

Skor integrasi total: 22/25 → "Sangat Kuat".

18.6. GAP Analysis, Problem–Solution Policy, dan Isu Strategis

18.6.1. GAP Analisis terhadap RPJMD

Tabel 18.5, 18.10 dan 18.16 mengidentifikasi beberapa GAP kunci:

1. Outcome ekonomi belum terukur kuat
    - Indikator masih fokus pada output pelatihan & penempatan.
    - Belum ada angka kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Produktivitas tenaga kerja industri belum diukur secara eksplisit
    - Tidak ada indikator nilai tambah atau produktivitas sektor industri pascapelatihan.
3. Pemerataan akses kerja belum terukur penuh
    - Baru mengukur inklusi gender & disabilitas, belum ada indikator disparitas antarwilayah / sektor.
4. Dampak sosial PMI belum terukur
    - Perlindungan PMI masih dilihat secara administratif, belum ada indikator remitansi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
5. Sistem data pasar kerja belum real-time dan belum terintegrasi penuh
    - Mismatch kerja dan lambatnya penyerapan tenaga kerja berpotensi terus terjadi.

6. Early warning system hubungan industrial belum dikembangkan
    - Risiko PHK massal dan konflik industrial tidak terpantau sejak dini.

Tiga GAP paling kritis (disebut eksplisit sebagai "GAP Paling Kritis"):

- Outcome ekonomi ketenagakerjaan tidak terukur ke PDRB,
- Kesenjangan tenaga kerja antar sektor & wilayah tidak terbaca,
- Produktivitas pasca pelatihan tidak terpantau.

18.6.2. Matriks Problem–Solution Policy

Tabel 18.9 menyusun *Matrix Problem–Solution Policy*:

Beberapa permasalahan strategis dan intervensinya:

1. Outcome ekonomi ketenagakerjaan belum terbaca
    - Akar masalah: indikator masih fokus output.
    - Solusi eksisting: pelatihan kompetensi, AKAD, job fair.
    - Intervensi baru: indikator kontribusi peningkatan pendapatan & PDRB sektoral.
    - Prioritas: sangat tinggi (HIGH).
2. Kesenjangan tenaga kerja antar sektor besar (mismatch)
    - Akar: skill tidak sesuai kebutuhan industri.
    - Intervensi baru: pemetaan skill–demand per kecamatan & link and match dengan industri.
    - Prioritas: HIGH.
3. Inklusivitas kesempatan kerja belum optimal
    - Akar: perempuan & disabilitas belum sepenuhnya terfasilitasi.
    - Intervensi baru: target inklusi ketenagakerjaan wajib di setiap program Disnaker.
    - Prioritas: HIGH.
4. Perlindungan PMI belum mengukur kesejahteraan keluarga
    - Intervensi baru: indikator remitansi & outcome keluarga PMI.
    - Prioritas: Medium–High.
5. Produktivitas tenaga kerja industri belum terukur
    - Intervensi baru: KPI produktivitas per sektor industri.

6. Sistem informasi ketenagakerjaan belum real-time
    - Intervensi baru: Integrasi Satu Data Ketenagakerjaan (perusahaan–pencari kerja).
7. Risiko konflik industrial
    - Intervensi baru: *early warning system* HI berbasis data.

Ringkasan problem policy (di halaman 327) menegaskan bahwa:

Penurunan TPT & peningkatan TPAK sudah kuat,namun pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses kerja, dan dampak sosial PMI masih memerlukan indikator yang lebih tajam.

18.7. Prioritas Intervensi dan Rencana Tindak Lanjut (RTT)

18.7.1. Prioritas Intervensi

Tabel 18.11 memetakan prioritas intervensi berdasarkan urgensi, dampak, risiko, dan kesiapan data:

Tiga fokus utama (kategori HIGH) yang paling wajib ditindak:

1. Mengukur kontribusi ketenagakerjaan terhadap PDRB sektoral
    - Urgensi: sangat tinggi (transformasi ekonomi).
    - Dampak: outcome ekonomi menjadi terbaca; posisi Disnaker dalam mendukung PDRB menjadi jelas.
2. Link & match tenaga kerja dengan kebutuhan industri per sektor
    - Urgensi: tinggi (pengurangan mismatch kerja & pengangguran struktural).
    - Arah: pemetaan kebutuhan skill industri & kemitraan rekrutmen sektor prioritas.
3. Penguatan inklusi kerja perempuan dan disabilitas
    - Urgensi: tinggi (pemerataan pembangunan & keadilan sosial).
    - Arah: kuota inklusi pada program pelatihan dan penempatan.

Intervensi MEDIUM mencakup pengukuran produktivitas pasca pelatihan, outcome sosial PMI, dan integrasi Satu Data Ketenagakerjaan; intervensi LOW–MEDIUM terkait *early warning system* hubungan industrial.

18.7.2. Rencana Tindak Lanjut (RTT) 2025–2026

Tabel 18.12 – RTT merinci aksi, output, outcome RPJMD, penanggung jawab, dan mitra:

Contoh kunci:

- HIGH – Outcome ekonomi tenaga kerja belum terukur
    - Aksi: menyusun metodologi kontribusi PDRB sektor tenaga kerja per kecamatan dan mengintegrasikan data penempatan kerja dengan sektor industri.
    - Output: peta kontribusi ketenagakerjaan terhadap PDRB.
    - Outcome: transformasi ekonomi berbasis tenaga kerja.
- HIGH – Mismatch tenaga kerja–industri tinggi
    - Aksi: pemetaan kebutuhan skill tiap sektor, MoU rekrutmen dengan industri hulu–hilir.
    - Outcome: TPT turun sesuai target RPJMD.
- HIGH – Kesenjangan akses kerja kelompok rentan
    - Aksi: penetapan kuota inklusi pelatihan (minimal 30% peserta dari kelompok rentan).
    - Outcome: pembangunan inklusif dan setara.
- MEDIUM – Produktivitas pasca pelatihan
    - Aksi: penetapan indikator produktivitas per sektor dan survei dampak pelatihan.
- MEDIUM – Dampak sosial PMI
    - Aksi: monitoring remitansi & kesejahteraan keluarga PMI.
- MEDIUM – Satu Data Ketenagakerjaan
    - Aksi: integrasi data supply–demand kerja dengan Diskominfo dan perusahaan.
- LOW – Risiko konflik industrial
    - Aksi: pembangunan *Early Warning System* hubungan industrial.

18.7.3. Quick Wins 2025–2026

Tabel 18.13 merumuskan sasaran Quick Wins:

- 2025
    - Tersusunnya metodologi & baseline kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB sektoral,
    - Kuota program pelatihan inklusif dengan ≥30% peserta dari kelompok rentan.

- 2026
    - Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada 5 sektor industri prioritas,
    - Sistem Satu Data Ketenagakerjaan aktif penuh, dengan peningkatan penyerapan kerja sebesar ±15% melalui *matchmaking* online.

18.8. Kesimpulan Utama dan Implikasi terhadap RPJMD

18.8.1. Ringkasan Kinerja dan Efektivitas

Berdasarkan keseluruhan analisis Bab XVIII:

1. Renstra Disnaker 2025–2029 sangat efektif (SMART Score 23/25) dalam mendukung arah pembangunan ketenagakerjaan dalam RPJMD, khususnya:
    - penurunan TPT,
    - peningkatan TPAK,
    - penempatan tenaga kerja lokal & AKAD/AKL,
    - penguatan hubungan industrial,
    - perluasan jaminan sosial dan perlindungan PMI.
2. Integrasi Renstra–RPJMD kuat (22/25):
    - Arah kebijakan dan relevansi indikator maksimum,
    - Seluruh program utama (pelatihan, penempatan, HI & jamsos, informasi pasar kerja, perlindungan PMI) mendukung langsung sasaran RPJMD.
3. Tidak ada indikator lemah, seluruh IKU/IKK berada pada kategori Efektif–Sangat Efektif; namun:
    - outcome ekonomi sektoral (kontribusi PDRB),
    - pemerataan dan inklusivitas ketenagakerjaan antar sektor/wilayah,
    - dampak sosial PMI dan produktivitas pasca pelatihan

belum terekam kuat dalam indikator kinerja.

18.8.2. Isu Strategis dan Rekomendasi Kunci

Isu strategis yang paling menentukan keberhasilan RPJMD:

1. **Pengukuran kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB sektoral)**
    – tanpa indikator ini, peran Disnaker dalam transformasi ekonomi sulit diklaim secara kuantitatif.

2. Pemerataan akses kerja & inklusivitas
   – diperlukan indikator **Indeks Disparitas Ketenagakerjaan** dan konsistensi kuota program untuk perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan.
3. Produktivitas tenaga kerja dan relevansi pelatihan
   – perlu KPI produktivitas per sektor industri untuk memastikan pelatihan menghasilkan nilai tambah nyata, bukan sekadar output jumlah peserta.
4. Dampak sosial dan ekonomi PMI
   – integrasi indikator remitansi dan kesejahteraan keluarga PMI akan memperjelas kontribusi perlindungan PMI terhadap penurunan kemiskinan.
5. Digitalisasi dan Satu Data Ketenagakerjaan
   – sistem informasi real-time yang terhubung ke perusahaan akan mengurangi mismatch dan mempercepat penyerapan tenaga kerja.

18.8.3. Implikasi bagi Evaluasi RPJMD 2025–2029

Jika tiga indikator baru yang direkomendasikan (kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB, indeks disparitas ketenagakerjaan, indikator produktivitas sektoral) beserta penguatan data PMI dan Satu Data Ketenagakerjaan diimplementasikan, maka:

- Integrasi Renstra–RPJMD berpotensi naik menjadi 25/25 (sempurna),
- Grafik radar integrasi dan SMART akan membentuk pentagon sempurna,
- Evaluasi RPJMD dapat menunjukkan secara lebih jelas dan terukur bahwa:
  - *Disnaker adalah kontributor utama penurunan pengangguran dan peningkatan kualitas SDM,*
  - *Kebijakan ketenagakerjaan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral,*
  - *Transformasi industri Gresik didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan terlindungi,*
  - *Pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara lebih inklusif dan berkeadilan.*

Bab XVIII menegaskan bahwa Renstra Disnaker sudah sangat kuat sebagai instrumen perencanaan, dan dengan penguatan indikator outcome ekonomi–sosial serta intervensi prioritas 2025–2026, peran Disnaker dalam mewujudkan “Gresik Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” akan semakin strategis, terbukti, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh siklus evaluasi RPJMD 2025–2029.

BAB XIX
Analisis Keterkaitan Dokumen Renstra DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029

19.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DPMPTSP

Bab XIX mengulas sejauh mana Renstra DPMPTSP 2025–2029:

1. Konsisten dengan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029,
2. Terintegrasi ke dalam struktur kinerja tujuan–sasaran–indikator–program RPJMD,
3. Efektif secara desain (dengan metode SMART) dalam mendorong:
    - *Pertumbuhan Investasi Dan PMTB,*
    - *Transformasi Ekonomi Berbasis Industri Manufaktur Unggulan,*
    - *Penguatan Kemitraan UB–UMKM Sebagai Pengungkit Ekonomi Inklusif,*
    - *Perbaikan Iklim Usaha Dan Reformasi Layanan Perizinan Digital*,
4. Namun juga mengidentifikasi GAP dan area penguatan, terutama pada:
    - *Ambisi Target Pertumbuhan Investasi,*
    - *Pemerataan Spasial Investasi Antarwilayah,*
    - *Kualitas Kemitraan Ub–Umkm, Dan*
    - *Pemanfaatan Data Penanaman Modal Dan Spbe*.

Dalam arsitektur RPJMD, DPMPTSP diposisikan sebagai “mesin investasi dan daya saing industri” yang:

- *Menarik Masuk Modal Baru (PMDN/PMA),*
- *Mengarahkan Investasi Ke Sektor Manufaktur Unggulan Dan Hilirisasi,*
- *Memastikan Kemudahan Berusaha Dan Kepastian Layanan Perizinan,*
- *Serta Menghubungkan Investasi Besar Dengan UMKM Dan Sebaran Wilayah Agar Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Inklusif Dan Berkeadilan.*

19.2. Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan Visi–Misi RPJMD

19.2.1. Keterkaitan dengan Visi “Gresik Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan”

Tabel pada bagian 19.1 memetakan unsur Visi RPJMD dan dukungan kinerja DPMPTSP sebagai berikut:

- Maju & Berdaya Saing

  → Didukung oleh peningkatan investasi, penguatan sektor industri manufaktur unggulan, dan layanan perizinan cepat & digital.

  → Tingkat keterkaitan: ★★★★★ (sangat kuat) – DPMPTSP adalah motor utama pilar ini.

- Sejahtera

  → Melalui investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

  → Keterkaitan: ★★★★★–jalur utama ke peningkatan kesejahteraan lewat pertumbuhan ekonomi.

- Berkelanjutan (ekonomi)

  → Dorongan investasi industri & kawasan yang memberi nilai tambah dan efisiensi ekonomi (hilirisasi, kawasan industri).

  → Keterkaitan: ★★★★☆ – kuat, namun belum sepenuhnya mengukur nilai tambah.

- Berkelanjutan (dimensi sosial)

  → Kemitraan UMKM dalam rantai pasok investasi, mendorong ekonomi lokal.

  → Keterkaitan: ★★★★☆ – kemitraan sudah ada, tetapi sisi kualitas & dampak sosial belum terukur.

- Berkeadilan

  → Upaya mendukung sebaran peluang investasi ke berbagai wilayah, tetapi indikator pemerataan belum eksplisit.

  → Keterkaitan: ★★★☆☆ – menjadi area yang membutuhkan penguatan ke depan.

Kesimpulan:

Renstra DPMPTSP sangat kuat mendukung visi "Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan", namun perlu penguatan indikator pemerataan wilayah untuk aspek "Berkeadilan".

19.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Tabel misi–kontribusi menunjukkan:

- Misi 1 – Ekonomi tumbuh berkelanjutan
  → *Kontribusi melalui peningkatan realisasi investasi total & manufaktur yang berhubungan langsung dengan PMTB dan pertumbuhan ekonomi.*
  → *Keterkaitan: ★★★★★, outcome terkoneksi langsung ke indikator ekonomi makro.*
- Misi 2 – Transformasi industri maju & berdaya saing
  → *Didukung indikator PDRB industri pengolahan, pertumbuhan investasi manufaktur, dan rasio investasi manufaktur terhadap total investasi.*
  → *Keterkaitan: ★★★★★, tetapi dianjurkan menambahkan pengukuran nilai tambah industri untuk menangkap kualitas transformasi.*
- Misi 3 – Pemerataan pembangunan & UMKM naik kelas
  → *Diperkuat melalui kemitraan Usaha Besar–UMKM dan integrasi UMKM dalam rantai pasok industri.*
  → *Keterkaitan: ★★★★☆, kualitas kemitraan (omzet, nilai kontrak, transfer teknologi) belum diukur.*
- Misi 4 – Tata kelola unggul & layanan publik digital
  → *Indikator: SKM layanan perizinan dan SPBE Penanaman Modal (OSS, digitalisasi layanan).*
  → *Keterkaitan: ★★★★★, namun diperlukan milestone kenaikan level SPBE agar kemajuan digitalisasi terukur.*
- Misi 5 – Stabilitas sosial & iklim investasi kondusif
  → *Diperkuat oleh indikator penyelesaian hambatan usaha dan kepatuhan LKPM.*
  → *Keterkaitan: ★★★★★, perlu early warning risiko industri.*

Peta Integrasi pada halaman 335 menunjukkan bahwa:

- *Tujuan RPJMD → Sasaran RPJMD → Arah kebijakan → Prioritas RPJMD semuanya telah memiliki padanan langsung pada sasaran & indikator Renstra DPMPTSP.*
- *Satu-satunya area yang "warning" (⚠) adalah Prioritas RPJMD: Pemerataan wilayah & UMKM naik kelas, yang baru terjawab sebagian.*

19.3. Posisi Strategis dan Keterkaitan Tujuan–Sasaran Renstra–RPJMD

19.3.1. Posisi Strategis

Pada bagian 19.2, DPMPTSP ditempatkan sebagai OPD kunci di pilar pertumbuhan ekonomi & daya saing investasi. Renstra DPMPTSP menerjemahkan pohon kinerja RPJMD menjadi sasaran:

- Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis melalui IKU:
    - Realisasi investasi total & manufaktur (T, triliun rupiah),
    - Pertumbuhan realisasi investasi (total & manufaktur, %),
    - Rasio PDRB industri pengolahan,
    - Rasio kemitraan UB–UMKM,
    - SKM layanan perizinan & penanaman modal.

IKK turunannya mengukur:

- jumlah investor & ketercapaian target,
- rasio investasi manufaktur,
- laju pertumbuhan PDRB industri,
- pertumbuhan promosi investasi,
- penyelesaian izin, kepatuhan LKPM, penyelesaian hambatan usaha,
- indeks SPBE layanan investasi,
- pemanfaatan data/informasi penanaman modal.

Kesimpulan:

Secara struktur, Renstra DPMPTSP menautkan langsung kinerja OPD ke indikator ekonomi kunci RPJMD, yaitu investasi, PDRB industri pengolahan, iklim usaha, dan digitalisasi layanan.

19.3.2. Keterkaitan Tujuan & Sasaran

Tabel pada bagian 19.3.a menunjukkan:

- Tujuan peningkatan investasi & transformasi ekonomi industri → diterjemahkan menjadi tujuan Renstra “meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis” → keterkaitan sangat kuat.
- Tujuan penguatan peran industri pengolahan dalam PDRB → indikator rasio PDRB industri pengolahan & laju pertumbuhan PDRB industri → sangat kuat.

- Tujuan penguatan UMKM & kemitraan usaha besar → indikator rasio kemitraan UB–UMKM (25/800 → 55/800 pelaku bermitra) → kuat namun kualitas kemitraan belum diukur.
- Tujuan peningkatan kualitas pelayanan & SPBE → indikator SKM "Sangat Baik" dan indeks SPBE target 5 → sangat kuat.

Renstra juga sudah mencantumkan kolom IKD RPJMD dan NSPK dalam Tabel 3 Renstra, sehingga setiap indikator OPD mempunyai "alamat" langsung di RPJMD.

19.4. Efektivitas Desain Renstra (SMART) dan Temuan GAP

19.4.1. Penilaian SMART Global

Bagian 19.4.1 menilai desain Renstra dengan skala SMART 1–5:

- *Specific – 5*

  IKU/IKK menyebut jenis investasi (total/manufaktur), rasio PDRB industri, rasio kemitraan, SKM, SPBE, kepatuhan LKPM, dll. Sangat spesifik pada mandat DPMPTSP.
- *Measurable – 5*

  Hampir semua indikator kuantitatif (T, persen, rasio, indeks). SKM pun diukur numerik meskipun di Renstra ditulis sebagai predikat "Sangat Baik".
- *Achievable – 4*

  Target pertumbuhan investasi ditetapkan 0,5–2,8% per tahun, lebih rendah dari baseline historis 22,66%. Secara kapasitas achievable, tetapi kurang ambisius terhadap semangat akselerasi RPJMD.
- *Relevant – 5*

  Semua indikator langsung terkait sasaran RPJMD: investasi, struktur industri, UMKM, pelayanan, dan SPBE.
- *Time-bound – 5*

  Seluruh indikator memiliki target tahunan 2025–2030 secara runtut.

Skor total SMART = 24/25 → "Efektivitas desain Renstra: SANGAT TINGGI".

19.4.2. Efektivitas per Kelompok Indikator

Bagian 19.4.2 merinci:

1. IKU Investasi & PDRB Industri
    - Realisasi investasi total & manufaktur, pertumbuhan investasi, rasio PDRB industri → langsung mengukur outcome ekonomi yang diminta RPJMD.
    - Efektivitas: sangat tinggi, karena bisa ditarik sebagai kontribusi makro (PMTB & struktur ekonomi).
2. IKU Kemitraan UB–UMKM
    - Mengukur jumlah hubungan kemitraan (25/800 → 55/800).
    - Efektif memotret perluasan kemitraan, tetapi belum mengukur kualitas (volume kontrak, omzet UMKM, transfer teknologi).
3. IKU SKM & IKK SPBE
    - SKM dan indeks SPBE mengukur kualitas pelayanan dan digitalisasi.
    - Efektivitas tinggi untuk misi tata kelola, tetapi memerlukan milestone SPBE & angka SKM yang jelas.
4. IKK Operasional (izin, LKPM, hambatan usaha)
    - Menguatkan hubungan sebab–akibat: pelayanan → iklim usaha → investasi.
    - Beberapa target masih “flat” (misalnya pemanfaatan data hanya 2%), sehingga kurang mendorong perubahan.

19.4.3. GAP Efektivitas: Apa yang Masih Kurang?

Bagian 19.4.3 dan tabel GAP (19.5) menonjolkan beberapa GAP utama:

1. Ambisi target pertumbuhan investasi
    - Baseline pertumbuhan 22,66%; target 2025–2029 hanya 0,5–2,8% per tahun.
    - Secara SMART “A” tercapai, tapi dari sisi relevansi dan daya dorong RPJMD dianggap kurang ambisius.
2. Kualitas kemitraan UB–UMKM
    - Indikator hanya menghitung jumlah kemitraan; belum mengukur dampak ke omzet, nilai kontrak, kedalaman hubungan supply chain, maupun transfer teknologi.

3. Pemanfaatan data & informasi investasi
    - Indikator persentase pemanfaatan data ditarget tetap 2% sepanjang periode, tanpa peningkatan.
    - Dinilai sebagai indikator paling lemah dan tidak outcome oriented; tidak mencerminkan Satu Data & SPBE secara substantif.
4. Dimensi pemerataan wilayah investasi
    - Tidak ada indikator sebaran investasi antar kecamatan/kawasan.
    - Padahal RPJMD menekankan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru dan pengurangan disparitas wilayah.

19.5. SMART + GAP per IKU/IKK dan Integrasi dengan RPJMD

19.5.1. SMART + GAP IKU DPMPTSP

Tabel 19.2 mengurai 7 IKU utama: semua berada di kategori Strong (rata-rata >4). Beberapa poin penting:

- Realisasi investasi total & manufaktur, pertumbuhan investasi, dan rasio PDRB industri → skor 4,6–4,8 (Very Strong).
    - GAP: belum menjelaskan segmentasi sektor prioritas dan porsi investasi hijau/inklusif.
- Rasio kemitraan UB–UMKM → skor 4,2 (Medium–Strong).
    - GAP: definisi “kemitraan” & mekanisme data belum jelas; baseline 0 cukup ambisius, perlu standardisasi.
- SKM layanan perizinan & penanaman modal → skor 4,4 (Medium–Strong).
    - GAP: baru menampilkan predikat “Sangat Baik”; perlu skor numerik dan instrumen survei.

19.5.2. SMART + GAP IKK DPMPTSP

Tabel 19.3 menjabarkan 12 IKK, mayoritas kategori Medium–Strong hingga Strong. Catatan penting:

- *Persentase ketercapaian sasaran kegiatan → Medium–Strong, perlu penjabaran sasaran kegiatan agar tidak bias.*
- *Persentase peningkatan jumlah investor & realisasi total terhadap target investasi → Strong; perlu pembedaan investor baru vs ekspansi.*

- *Rasio investasi manufaktur → Medium–Strong; perlu baseline jelas & antisipasi pergeseran ke sektor jasa.*
- *Laju pertumbuhan PDRB industri → Medium–Strong; kontribusi langsung DPMPTSP sulit diisolasi.*
- *Pertumbuhan promosi penanaman modal → Medium; definisi pertumbuhan promosi perlu diperjelas.*
- *Persentase penyelesaian izin → Strong (skor 5,0), tetapi target 100% tiap tahun berisiko tidak realistis.*
- *Persentase kepatuhan LKPM → Medium–Strong; target lompatan besar butuh strategi enforcement.*
- *Persentase pemanfaatan data investasi → menjadi* indikator paling lemah dan direkomendasikan untuk redesign.

19.6. GAP Analisis Per-Dimensi Pembangunan dan Prioritas Penutupan GAP

19.6.1. GAP Per-Dimensi (Tabel 19.5)

Beberapa GAP kunci per dimensi RPJMD:

1. *Transformasi Ekonomi Industri*
    - *Sudah ada indikator realisasi investasi manufaktur, namun belum mengukur nilai tambah industri (value added).*
    - *Risiko: transformasi industri tidak terbukti secara ekonomi.*
2. *Pertumbuhan Investasi*
    - *Target pertumbuhan investasi lebih rendah dari baseline (22,66% → 0,5–2,8%).*
    - *Risiko: pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan dan tidak sesuai ambisi RPJMD.*
3. *Pemerataan Investasi Wilayah*
    - *Tidak ada indikator distribusi spasial investasi.*
    - *Risiko: investasi terkonsentrasi di beberapa kawasan, kesenjangan wilayah meningkat.*
4. *Kemitraan & UMKM Naik Kelas*
    - *Rasio kemitraan hanya menghitung jumlah, bukan kualitas.*
    - *Risiko: "UMKM naik kelas" tidak terbukti; kemitraan hanya formalitas.*

5. *Perizinan & Kemudahan Berusaha*
    - *Target penyelesaian izin 100% tiap tahun tanpa mempertimbangkan kasus kompleks.*
    - *Risiko: overclaim dan masalah kredibilitas ketika dievaluasi.*
6. *Pengendalian & Kepatuhan LKPM*
    - *Target lompat besar tanpa strategi; risiko data investasi tidak lengkap.*
7. *SPBE Penanaman Modal*
    - *Target langsung level 5 tanpa baseline & milestone → roadmap kurang jelas.*
8. *Pemanfaatan Data Investasi*
    - *Target stagnan (2%); definisi sempit; indikator tidak outcome oriented.*
    - *Risiko: kebijakan investasi tidak berbasis data, sehingga rawan salah sasaran.*

19.6.2. Tiga GAP Prioritas Tinggi

Bagian 19.5 menegaskan Top 3 GAP prioritas tinggi yang harus segera ditangani:

1. Target investasi tidak seambisi arah RPJMD
   → Menurunkan daya dorong ekonomi daerah.
2. Tidak ada indikator pemerataan wilayah investasi
   → Mengancam pemerataan pembangunan Gresik; sulit mengklaim “berkeadilan”.
3. Indikator kualitas kemitraan UB–UMKM belum ada
   → Transformasi UMKM dan ekonomi inklusif tidak terbuktikan secara data.

Jika ketiganya tidak diperbaiki, maka keberhasilan misi pembangunan terkait investasi, industri dan UMKM tidak bisa diklaim secara meyakinkan pada evaluasi RPJMD.

19.7. Problem–Solution Policy, Prioritas Intervensi, dan RTT

19.7.1. Problem–Solution Policy

Tabel 19.7 menyajikan 7 permasalahan strategis dan solusi eksisting vs penguatan:

- GAP 1 – Target pertumbuhan investasi kurang ambisius
    - Akar masalah: perumusan target tidak berbasis data historis & potensi pasar.
    - Solusi penguatan: revisi target per sektor unggulan disertai strategi penetrasi investor. (Prioritas: High)

- GAP 2 – Pemerataan investasi antarwilayah belum terukur
    - Akar masalah: tidak ada indikator distribusi wilayah.
    - Solusi penguatan: tambahkan indikator "sebaran investasi per kecamatan" + susun Investment Opportunity Map (IOM). (High)
- GAP 3 – Kemitraan UB–UMKM hanya dihitung jumlah, bukan kualitas
    - Akar masalah: ketiadaan standar keberhasilan dan instrumen data.
    - Solusi penguatan: indikator kualitas kemitraan (nilai kontrak, omzet UMKM, transfer teknologi). (High)
- GAP 4 – Pemanfaatan data penanaman modal sangat rendah (2%)
    - Akar masalah: belum ada ekosistem data untuk decision-making.
    - Solusi penguatan: membangun Dashboard Data Investasi sebagai alat kebijakan (High).
- GAP 5 – Tidak ada milestone SPBE (Medium),
- GAP 6 – Kepatuhan LKPM belum sistematis (Medium),
- GAP 7 – Pertumbuhan investasi manufaktur belum fokus subsektor (Medium).

19.7.2. Prioritas Intervensi (Tabel 19.6)

Tabel 19.6 menyusun prioritas kebijakan 2025–2029 berdasarkan urgensi, dampak, risiko, kesiapan, dan prioritas:

- Prioritas HIGH:
    1. *Meningkatkan ambisi target pertumbuhan investasi → mencegah stagnasi pertumbuhan ekonomi.*
    2. *Menambah indikator pemerataan wilayah investasi → mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan.*
    3. *Mengukur kualitas kemitraan UB–UMKM → memastikan UMKM benar-benar naik kelas.*
    4. *Reformulasi indikator pemanfaatan data penanaman modal menjadi berbasis outcome → menjamin kebijakan investasi evidence-based.*
- Prioritas MEDIUM:

    5. Menyusun milestone SPBE layanan investasi tahunan.

    6. Penyesuaian indikator pertumbuhan investasi manufaktur dengan baseline sektor.

- Prioritas LOW:

  7. Klarifikasi populasi kepatuhan LKPM & penguatan strategi enforcement.

19.7.3. Fokus Kebijakan Utama 2025–2026

Bagian "Fokus Kebijakan Utama" merangkum empat fokus wajib 2025–2026:

1. *Pemerataan wilayah investasi → memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di sekitar kawasan industri besar.*
2. *Ambisi target investasi → akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sesuai visi RPJMD.*
3. *Kualitas kemitraan UB–UMKM → UMKM naik kelas dan masuk rantai pasok industri (ekonomi inklusif).*
4. *Data-driven investment planning → investasi tepat sasaran pada industri unggulan.*

19.8. Rencana Tindak Lanjut (RTT), Quick Wins, dan Timeline

19.8.1. RTT Berbasis Prioritas (Tabel 19.8)

RTT memetakan prioritas → permasalahan → langkah 2025–2026 → output → outcome RPJMD → penanggung jawab & mitra:

- HIGH 1 – Target investasi kurang ambisius
  - *RTT: revisi target pertumbuhan investasi per sektor unggulan + strategi perluasan investor.*
  - *Output: target investasi baru yang disahkan dalam perubahan Renstra.*
  - *Outcome: peningkatan PMTB & pertumbuhan ekonomi daerah.*
- HIGH 2 – Investasi terkonsentrasi di kawasan tertentu
  - *RTT: menambah indikator pemerataan + IOM per kecamatan.*
  - *Output: Investment Opportunity Map (IOM) Gresik.*
  - *Outcome: pemerataan pertumbuhan wilayah.*
- HIGH 3 – Kemitraan UB–UMKM belum mengukur nilai tambah
  - *RTT: redesign indikator + sistem data kontrak & transfer teknologi.*
  - *Output: Dashboard kemitraan (nilai transaksi dan kenaikan omzet UMKM).*
  - *Outcome: UMKM naik kelas & masuk rantai pasok industri.*

- HIGH 4 – Indikator pemanfaatan data investasi lemah & stagnan
    - *RTT: pembangunan Dashboard Data Investasi yang digunakan dalam rapat kebijakan.*
    - *Outcome: kebijakan investasi berbasis data.*
- MEDIUM (SPBE, rasio investasi manufaktur) dan LOW (kepatuhan LKPM) diarahkan pada penguatan tata kelola dan kualitas data investasi.

19.9. Kesimpulan Utama Executive Summary

1. Renstra DPMPTSP 2025–2029 memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan RPJMD Gresik 2025–2029.
    - Mendukung langsung Visi "Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan".
    - Menjadi motor utama pertumbuhan investasi dan transformasi industri.
    - Mengkonversi tujuan & sasaran RPJMD menjadi indikator investasi, struktur industri, kemitraan UMKM, dan reformasi layanan.
2. Desain indikator Renstra sangat SMART (skor 24/25).
    - Specific, Measurable, Relevant, dan Time-bound sudah optimal.
    - Achievable dinilai cukup, tetapi "terlalu aman" pada target pertumbuhan investasi sehingga daya dorong belum maksimal.
3. Integrasi indikator Renstra–RPJMD sangat kuat pada tiga pilar:
    - Investasi & PMTB,
    - Transformasi ekonomi industri manufaktur,
    - Perbaikan iklim usaha & reformasi birokrasi layanan perizinan/SPBE.
4. GAP strategis yang masih tersisa:
    - Target pertumbuhan investasi kurang ambisius dibanding baseline & arah RPJMD.
    - Tidak adanya indikator pemerataan wilayah investasi, sehingga visi "berkeadilan" belum terukur.
    - Kualitas kemitraan UB–UMKM belum diukur (baru jumlah kemitraan).
    - Indikator pemanfaatan data investasi stagnan (2%) dan tidak outcome oriented.
    - Milestone SPBE tidak jelas, kepatuhan LKPM belum disertai strategi, dan nilai tambah industri dari investasi belum diukur.

5. Problem–Solution Policy dan RTT memberikan peta jalan yang jelas untuk memperkuat kontribusi DPMPTSP terhadap RPJMD:
    - Revisi target dan skenario pertumbuhan investasi yang lebih agresif namun realistis,
    - Penambahan indikator sebaran investasi per kecamatan dan penyusunan IOM,
    - Pengembangan indikator kualitas kemitraan dan dashboard kemitraan UB–UMKM,
    - Pembangunan Dashboard Data Investasi serta penguatan SPBE dan Satu Data.
6. Dengan melaksanakan prioritas intervensi HIGH (pemerataan wilayah investasi, ambisi target, kualitas kemitraan, dan data-driven investment planning) serta Quick Wins 2025–2026, efektivitas Renstra DPMPTSP berpotensi:
    - naik dari kategori “Sangat Baik” menjadi “Optimal” dalam mendukung RPJMD,
    - menjadikan DPMPTSP sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya tinggi, tetapi juga merata dan inklusif,
    - dan memastikan bahwa keberhasilan RPJMD di bidang investasi dan industri dapat dibuktikan secara kuat dan terukur dalam evaluasi jangka menengah 2025–2029.

BAB XX
Analisis Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dengan Dokumen RPJMD Gresik 2025–2029

20.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis Dinas Perikanan

Bab ini menganalisis secara sistematis sejauh mana Renstra Dinas Perikanan 2025–2029 selaras dan mendukung RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, baik dari sisi:

- *Visi–Misi RPJMD,*
- *Tujuan–sasaran–program–indikator,*
- *Kualitas indikator (SMART + GAP),*
- *Problem–solution policy dan prioritas intervensi, serta*
- *Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan perbaikan per Bab Renstra*.

Sektor perikanan ditempatkan sebagai salah satu sektor unggulan primer Gresik yang menopang:

1. *Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan (Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, Garam, Dan Nilai Tambah Produk Olahan),*
2. *Ketahanan Pangan Dan Gizi Masyarakat (Ketersediaan Dan Konsumsi Ikan),*
3. *Keberlanjutan Ekosistem Pesisir Dan Perairan Umum,*
4. *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Dan UMKM Perikanan.*

Dengan demikian, Renstra Dinas Perikanan diposisikan sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan Gresik yang maju, tangguh, berkelanjutan, dan inklusif di wilayah pesisir.

20.2. Keterkaitan Renstra dengan Visi–Misi RPJMD

20.2.1. Keterkaitan dengan Visi RPJMD

Visi RPJMD: **“Gresik Maju, Tangguh, Berkelanjutan dan Inklusif”**.

Matriks pada **bagian 20.1 (hal. 356)** menunjukkan:

- Maju (pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan)
  → Didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya & tangkap sebagai indikator sasaran perangkat daerah.
- Tangguh (ketahanan pangan & daya saing)
  → Didukung program budidaya ikan, pengolahan hasil ikan, dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang menambah pasokan dan konsumsi ikan.

- Berkelanjutan (ekologi, konservasi, adaptasi perubahan iklim)
  → Didukung rehabilitasi pesisir, konservasi sumber daya ikan, dan pengawasan perikanan berkelanjutan.
- Inklusif (kesejahteraan kelompok rentan & pemerataan layanan)
  → Didukung pemberdayaan nelayan kecil, kelompok pembudidaya (Pokdakan), pengolah (Poklahsar), Pokmaswas, serta bantuan permodalan UMKM perikanan.

Kesimpulan visi:

- *Renstra Perikanan mendukung semua dimensi visi, dengan kekuatan terbesar pada "maju–tangguh–berkelanjutan".*
- *Dimensi inklusif sudah ada, tetapi indikator pemerataan wilayah pesisir dan kesenjangan antar-kecamatan belum eksplisit, sehingga masih ada ruang penguatan.*

20.2.2. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Matriks pada hal. 357 (20.2) menunjukkan hubungan Renstra–Misi sebagai berikut:

- *Misi 1 – Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan & peningkatan kesejahteraan rakyat*
  → Peningkatan produksi perikanan budidaya & tangkap serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
- *Misi 2 – Penguatan ketahanan pangan & gizi Masyarakat*
  → Program Gemarikan, konsumsi ikan, penyediaan pasokan ikan, dan UPI.
- *Misi 3 – Pengurangan kesenjangan & pemberdayaan UMKM/kelompok masyarakat*
  → Pembinaan kelompok nelayan, Pokdakan, Poklahsar, Pokmaswas, serta bantuan modal & sarpras.
- *Misi 4 – Lingkungan hidup berkelanjutan & adaptasi perubahan iklim*
  → Rehabilitasi pesisir, konservasi SDI, dan pengawasan usaha perikanan.
- *Misi 5 – Reformasi birokrasi & tata Kelola*
  → Penyusunan dokumen perencanaan & evaluasi, peningkatan kualitas layanan TPI dan data sektor perikanan.

Penilaian umum:

Renstra Perikanan mendukung minimal 4 dari 5 misi RPJMD secara kuat, terutama misi ekonomi (Misi 1), ketahanan pangan (Misi 2), lingkungan (Misi 4), dan pemberdayaan/UMKM (Misi 3). Dimensi tata kelola (Misi 5) juga mendapat dukungan, meskipun masih perlu dikuatkan sisi digitalisasi data dan pengawasan.

20.3. Integrasi Tujuan–Sasaran–Program–Indikator dengan RPJMD

20.3.1. Integrasi Tujuan & Sasaran

Bagian 20.3–20.4 (hal. 358–361) menyimpulkan integrasi sebagai berikut:

- Sasaran RPJMD: Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor primer

  → Didukung produksi perikanan budidaya, tangkap, UPI, dan pemasaran → status: selaras.
- Sasaran RPJMD: Ketahanan pangan daerah

  → Didukung penyediaan pasokan ikan, angka konsumsi ikan, dan Gemarikan → selaras kuat.
- Sasaran RPJMD: Konservasi lingkungan & pesisir

  → Rehabilitasi ekosistem pesisir, pengawasan SDI → selaras kuat.
- Sasaran RPJMD: Pemberdayaan masyarakat & UMKM

  → Pembinaan nelayan kecil, kelompok usaha perikanan → selaras.
- Sasaran RPJMD: Pelayanan publik berkualitas

  → Perencanaan, evaluasi, data SDI, dan layanan TPI → selaras.

Pada Tabel integrasi tujuan (hal. 359), tujuan RPJMD seperti “peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan”, “ketahanan pangan”, “lingkungan hidup”, dan “pengentasan kemiskinan” dihubungkan langsung dengan tujuan Renstra Perikanan: meningkatkan daya saing sektor perikanan, meningkatkan produksi perikanan budidaya & tangkap, merehabilitasi ekosistem pesisir, dan memberdayakan nelayan & UMKM perikanan.

20.3.2. Integrasi Program dan Indikator

Di hal. 360, integrasi Program RPJMD ↔ Program Renstra ditunjukkan sebagai berikut:

- *Program Peningkatan Produksi Perikanan ↔ Program Perikanan Tangkap,*
- *Program Pengembangan Perikanan Budidaya ↔ Program Perikanan Budidaya,*
- *Program Penguatan Ekonomi Pesisir ↔ Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan,*
- *Program Konservasi Pesisir ↔ Program Pengelolaan SD Perikanan,*
- *Program Ketahanan Pangan ↔ Program Gemarikan,*
- *Program Tata Kelola Perikanan ↔ Program Pembinaan SDM Perikanan.*

Sementara integrasi Indikator RPJMD ↔ IKU/IKK Renstra (hal. 360) menunjukkan:

- Produksi perikanan meningkat ↔ pertumbuhan produksi tangkap & budidaya,
- Ketahanan pangan meningkat ↔ angka konsumsi ikan,
- Ekosistem pesisir pulih ↔ luasan pesisir yang direhabilitasi,
- Nilai tambah sektor perikanan ↑ ↔ persentase produksi yang diolah,
- Kelembagaan nelayan & UMKM kuat ↔ jumlah kelompok dibina & UPI layak,
- Pengawasan perikanan efektif ↔ dokumen pengawasan.

Kesimpulan integrasi (hal. 361):

- *Keterkaitan Renstra–RPJMD dinilai "sangat selaras (±95%)",*
- *Kekuatan terbesar ada pada produksi, ketahanan pangan, lingkungan pesisir, dan pemberdayaan nelayan/UMKM,*
- *Ruang perbaikan pada kontribusi ekonomi (value added), indikator kesejahteraan nelayan yang lebih outcome-based, serta pengelolaan lintas wilayah perairan.*

20.4. SMART + GAP Analysis Indikator Renstra Perikanan

20.4.1. SMART + GAP IKU

Tabel SMART + GAP IKU (hal. 362) menunjukkan 8 IKU dengan skor SMART sangat tinggi:

- *Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) →*
  S=5, M=5, A=4, R=5, T=5 → 24/25 (sangat kuat), selaras penuh dengan RPJMD.
- *Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%) → 24/25, identik dengan indikator outcome RPJMD.*
- *Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) → 24/25, selaras dengan sasaran sektor unggulan.*
- *Pertumbuhan produksi garam rakyat → 23/25, relevan untuk ekonomi lokal, meski tidak eksplisit di RPJMD.*
- *Persentase penurunan konflik nelayan → 21/25, relevan tetapi belum ada indikator padanan di RPJMD.*
- *Jumlah pelaku usaha perairan umum yang diawasi → 22/25, mendukung pengawasan SDA namun belum persis tercermin di RPJMD.*
- *Persentase pelatihan kelompok nelayan → 24/25, mendukung penguatan SDM nelayan.*

- *Persentase fasilitasi kebijakan kesejahteraan nelayan → 21/25, masih terlalu luas dan belum outcome-based.*

Temuan kunci:

IKU Renstra Perikanan sangat SMART dan umumnya selaras dengan RPJMD. GAP terutama terdapat pada indikator yang:

- *belum memiliki padanan langsung di RPJMD (konflik, pengawasan pelaku usaha), dan*
- *belum cukup spesifik mengukur outcome kesejahteraan nelayan.*

20.4.2. SMART + GAP IKK

Tabel SMART + GAP IKK (Hal. 363) Memperlihatkan Bahwa:

- Persentase Pelatihan Kelompok Budidaya → 24/25, Selaras Dengan Target Produktivitas Budidaya.
- Produksi Perikanan Budidaya (Kg/Ton) → 25/25 (Sempurna), Identik Dengan Indikator Outcome RPJMD.
- Rasio Kepatuhan Pelaku Usaha → 22/25, Gap Ringan Karena RPJMD Tidak Merinci Rasio Spesifik.
- Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%) → 24/25, Menopang Gemarikan Dan Gizi Daerah.

Rekap GAP (hal. 364):

- *Indikator tanpa gap (selaras penuh): produksi tangkap, produksi budidaya, konsumsi ikan, pelatihan nelayan/pembudidaya, produksi budidaya (IKK).*
- *Indikator dengan gap ringan–sedang: produksi garam, penurunan konflik nelayan, pengawasan pelaku usaha, fasilitasi kebijakan kesejahteraan, dan rasio kepatuhan usaha.*

Rekomendasi perbaikan:

1. *Memperjelas Definisi & Metode Ukur Indikator (Konflik, Kesejahteraan Nelayan).*
2. *Menegaskan Keterkaitan Produksi Garam & Pengawasan Pelaku Usaha Dengan RPJMD.*
3. *Menyelaraskan Target Angka Produksi Dengan RPJMD (Cross-Check Pagu & Target).*

20.5. Matriks Problem–Solution Policy dan Area Kritis

20.5.1. Problem–Solution per Sub-Sistem

Matriks Problem–Solution Policy (hal. 365–367) mengelompokkan masalah strategis perikanan ke tujuh klaster: produksi, nilai tambah & UMKM, kesejahteraan nelayan, konflik & tata kelola, ekologi pesisir, konsumsi ikan, serta data & tata kelola.

Beberapa inti masalah dan penguatan yang diusulkan:

1. Produksi perikanan (tangkap, budidaya, garam)
    - Permasalahan: teknologi rendah, cuaca & penyakit, kualitas garam;
    - Penguatan: modernisasi alat tangkap & tambak, Good Aquaculture Practices & CBIB, geomembrane, integrasi pasar garam.
2. Nilai tambah & UMKM perikanan
    - Permasalahan: UPI belum tersertifikasi, akses pasar lemah;
    - Penguatan: sertifikasi SNI/halal, cold storage mini, pasar higienis, e-commerce produk perikanan.
3. Kesejahteraan nelayan & SDM
    - Permasalahan: kemiskinan nelayan, ketergantungan musim, terbatasnya literasi manajemen;
    - Penguatan: akses KUR & koperasi nelayan, diversifikasi usaha (olah ikan, wisata bahari), sertifikasi kompetensi.
4. Konflik nelayan & tata kelola pesisir
    - Permasalahan: konflik alat tangkap & wilayah, pengawasan lemah;
    - Penguatan: Forum Komunikasi Nelayan, sosialisasi RZWP3K, patroli terpadu dengan Polair–PSDKP, digitalisasi pengawasan.
5. Ekologi & rehabilitasi pesisir
    - Permasalahan: abrasi, sedimentasi, sampah laut;
    - Penguatan: rehabilitasi mangrove & silvofishery, bank sampah pesisir, gerakan bersih pantai.
6. Konsumsi ikan & ketahanan pangan
    - Permasalahan: edukasi rendah, distribusi mahal;
    - Penguatan: GEMARIKAN berbasis sekolah–desa–ASN, festival ikan, fish mobile cart.

7. Data, digitalisasi & tata kelola
    - Permasalahan: data manual, tidak real-time, rasio kepatuhan rendah;
    - Penguatan: Sistem Informasi Perikanan Gresik (SI-PERIKANAN), dashboard data, early-warning kepatuhan usaha.

Grafik radar di hal. 373 menegaskan bahwa kekuatan terbesar ada di Produksi, Konsumsi Ikan, dan Pelatihan Nelayan, sedangkan area yang masih lemah adalah Konflik Nelayan, Fasilitasi Kesejahteraan, dan Pengawasan Usaha.

20.6. Prioritas Intervensi (High–Medium–Low) dan Fokus Kebijakan

20.6.1. Tabel Prioritas Intervensi

Tabel Prioritas Intervensi (hal. 368–369) meranking 14 fokus intervensi berdasarkan urgensi, dampak, risiko, kesiapan, dan prioritas:

Prioritas HIGH (wajib dieksekusi 2025–2026):

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap & budidaya,
2. Rehabilitasi ekosistem pesisir,
3. Peningkatan kesejahteraan nelayan (akses modal, sarpras, diversifikasi usaha),
4. Kampanye GEMARIKAN & konsumsi ikan,
5. Penguatan nilai tambah & hilirisasi produk perikanan (UPI & UMKM),
6. Digitalisasi data sektor perikanan (SI-PERIKANAN & dashboard).

Prioritas MEDIUM:

7. Pengawasan perairan umum & kepatuhan usaha,
8. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan,
9. Modernisasi tambak garam,
10. Pencegahan & penanganan konflik nelayan,
11. Pengurangan sampah laut & kebersihan pesisir.

Prioritas LOW:

12. Akses pemasaran digital produk perikanan,
13. Sertifikasi produk (SNI/halal) & standarisasi mutu,
14. Pengembangan wisata bahari berbasis nelayan.

Penjelasan: prioritas HIGH adalah "core engine" kontribusi Renstra terhadap RPJMD (ketahanan pangan, ekonomi unggulan, lingkungan pesisir), prioritas MEDIUM sebagai penopang keberlanjutan ekosistem & stabilitas sosial, sedangkan LOW lebih pada penguatan daya saing dan diversifikasi pendapatan.

20.7. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Timeline

20.7.1. RTT Prioritas HIGH

Tabel RTT Prioritas High (hal. 370–371) merinci aksi 2025–2026:

- Produksi perikanan
    - Modernisasi alat tangkap & tambak, peningkatan benih & pakan, monitoring kualitas air, sertifikasi GAP/CBIB.
    - Output: sarpras modern, benih berkualitas, tambak bersertifikat.
    - Outcome RPJMD: produksi perikanan meningkat.
- Rehabilitasi ekosistem pesisir
    - Rehabilitasi mangrove di kecamatan pesisir, silvofishery di tambak rakyat, penguatan Pokmaswas.
    - Outcome: daya dukung lingkungan pulih.
- Kesejahteraan nelayan
    - Pemetaan nelayan miskin, fasilitasi KUR & koperasi, bantuan sarpras, diversifikasi usaha.
    - Outcome: penurunan kemiskinan nelayan.
- GEMAR IKAN & konsumsi ikan
    - GEMARIKAN sekolah–desa–ASN, festival ikan, penguatan pasar ikan higienis.
    - Outcome: konsumsi ikan naik, ketahanan pangan kuat.
- Nilai tambah & UPI–UMKM
    - Bantuan peralatan UPI, pelatihan HACCP/SNI/halal, fasilitasi pemasaran digital.
    - Outcome: UMKM naik kelas, daya saing meningkat.
- Digitalisasi data (SI-PERIKANAN)
    - Pengembangan dashboard produksi–budidaya–pesisir, pelatihan SDM data, integrasi data kecamatan.
    - Outcome: kebijakan sektor perikanan menjadi data-driven.

20.7.2. RTT Prioritas Medium & Low

- Prioritas Medium (hal. 372): pengawasan perairan umum (penambahan petugas, geo-tagging patroli), penguatan kelembagaan nelayan, modernisasi garam, penanganan konflik, dan pengelolaan sampah laut.
- Prioritas Low: pemasaran digital, sertifikasi produk, dan wisata bahari; lebih diarahkan sebagai penambahan nilai dan diversifikasi.

20.8.1. Temuan GAP Paling Kritis

Enam GAP besar yang dinyatakan "Temuan GAP Paling Kritis" (hal. 377):

1. Indikator program terlalu output-oriented → belum mengukur pendapatan nelayan & daya dukung pesisir.
2. Baseline Bab II tidak lengkap → menyulitkan pengendalian & evaluasi.
3. Ekosistem pesisir dan pengawasan perairan umum belum kuat.
4. Belum ada digitalisasi data perikanan → SI-PERIKANAN wajib masuk program.
5. SWOT & isu strategis belum berbasis akar masalah.
6. Kontribusi Renstra terhadap RPJMD belum ditunjukkan secara kuantitatif.

20.8.2. RTT Per Bab (Garis Besar)

- Bab I → perkuat narasi peran strategis, tambahkan data kemiskinan nelayan, abrasi, tren produksi 5 tahun, dan pemetaan isu–RPJMD.
- Bab II → lengkapi baseline 2019–2024, buat grafik tren, update database pelaku, dan analisis gap layanan per kecamatan.
- Bab III → revisi SWOT berbasis data, susun pohon masalah, tambahkan isu lintas sektor.
- Bab IV → sempurnakan sasaran yang mengukur pendapatan nelayan & stabilitas pesisir, buat matriks integrasi sasaran Renstra–RPJMD, dan outcome framework.
- Bab V → rumuskan strategi berbasis evidence, integrasikan konsep blue economy (silvofishery, circular fishery, ekowisata), dan strategi hilirisasi UMKM (sertifikasi, cold chain, e-marketplace).
- Bab VI → revisi indikator menjadi outcome-based, tambah program SI-PERIKANAN & pengawasan terpadu, susun cascade program–kegiatan–subkegiatan.
- Bab VII → tulis narasi kontribusi Renstra → Sasaran RPJMD → Visi Daerah dan susun roadmap Monev 2025–2029.

20.9. Kesimpulan Umum Executive Summary

1. Tingkat keselarasan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Gresik 2025–2029 sangat tinggi (±95%), terutama pada aspek:
    - Produksi perikanan sebagai sektor unggulan primer,
    - Ketahanan pangan & gizi melalui peningkatan konsumsi ikan,
    - Pengelolaan ekosistem pesisir & konservasi SDI,
    - Pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan.
2. Indikator Renstra secara umum sangat SMART dan selaras dengan RPJMD; banyak indikator kunci (produksi tangkap/budidaya, konsumsi ikan, pelatihan, produksi budidaya) identik dengan indikator outcome RPJMD.
3. GAP utama tidak terletak pada konsistensi, tetapi pada kedalaman pengukuran outcome, yaitu:
    - Belum kuatnya indikator kesejahteraan nelayan dan pendapatan,
    - Belum terukurnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan daya dukung pesisir,
    - Masih terbatasnya pengukuran kualitas nilai tambah & daya saing UMKM perikanan,
    - Pengawasan perairan umum dan digitalisasi data yang belum terintegrasi.
4. Problem–Solution Policy dan Tabel Prioritas Intervensi menempatkan enam fokus utama yang harus dieksekusi 2025–2026:
    - peningkatan produksi tangkap & budidaya,
    - rehabilitasi pesisir,
    - kesejahteraan nelayan,
    - kampanye GEMARIKAN,
    - penguatan nilai tambah UMKM/UPI,
    - dan digitalisasi data SI-PERIKANAN.
5. RTT per prioritas dan per Bab sudah memberikan “blueprint perbaikan” yang jelas:
    - memperbaiki desain Renstra (narasi, data, strategi, indikator),
    - meningkatkan evidence-based policy melalui baseline & dashboard data,
    - mengintegrasikan konsep blue economy dan hilirisasi,
    - serta memastikan ada roadmap monitoring & evaluasi 2025–2029.

6. Dengan melaksanakan RTT prioritas tinggi dan GAP closure per Bab, Renstra Dinas Perikanan 2025–2029 berpotensi:
    - naik dari “sangat selaras di atas kertas” menjadi “sangat mengungkit di lapangan”,
    - menjadikan sektor perikanan kontributor nyata bagi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan nelayan,
    - serta memastikan bahwa visi “Gresik Maju, Tangguh, Berkelanjutan dan Inklusif” benar-benar terasa di seluruh kawasan pesisir dan perairan umum Kabupaten Gresik sepanjang periode RPJMD 2025–2029.

BAB XXI
Analisis Keterkaitan Renstra DISPAREKRAF dengan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029

21.1. Latar Belakang dan Posisi Strategis DISPAREKRAF

Bab XXI menelaah secara mendalam sejauh mana Renstra DISPAREKRAF 2025–2029 selaras dan berkontribusi langsung terhadap Visi–Misi RPJMD Gresik 2025–2029, dengan menyoroti lima klaster utama urusan:

1. *Pariwisata*
2. *Ekonomi Kreatif (Ekraf)*
3. *Kebudayaan*
4. *Kepemudaan*
5. *Olahraga*

DISPAREKRAF diposisikan sebagai "*mesin pengungkit sektor unggulan baru*" yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata & ekraf, tetapi juga:

- *Menguatkan Identitas Budaya Lokal,*
- *Membangun Sdm Unggul Melalui Kepemudaan & Olahraga,*
- *Dan Mendorong Inovasi, Digitalisasi, Serta Tata Kelola Layanan Publik Yang Modern.*

Visi RPJMD 2025–2029:

"Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat."

Visi ini menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, optimalisasi potensi pariwisata–budaya–ekraf–olahraga, serta penguatan SDM (terutama pemuda dan olahraga). Renstra DISPAREKRAF menjadi salah satu dokumen sektor yang langsung menerjemahkan visi tersebut ke dalam sasaran dan indikator operasional.

21.2. Keterkaitan Renstra DISPAREKRAF dengan Visi–Misi RPJMD

21.2.1. Misi RPJMD yang Relevan

Bab XXI mengidentifikasi beberapa misi RPJMD yang paling terkait dengan mandat DISPAREKRAF:

1. Misi 2 – Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
    - *Penguatan Sektor Pariwisata*

- *Pengembangan Ekonomi Kreatif*
- *Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekraf*
- *Penguatan Destinasi Dan Daya Tarik Wisata*

2. Misi 3 – Membangun Sumber Daya Manusia Unggul
   - *Pengembangan Kepemudaan*
   - *Pembinaan Olahraga*
   - *Penguatan Karakter & Budaya Lokal*
3. Misi 4 – Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan & Inovasi
   - *Sistem Informasi Pariwisata & Budaya*
   - *Layanan Publik Pariwisata & Kepemudaan*
   - *Digitalisasi Promosi Wisata Dan Ekraf*

Kesimpulan Awal:

Renstra DISPAREKRAF adalah salah satu Renstra yang paling langsung "menempel" ke Misi 2, Misi 3, dan Misi 4, dengan kombinasi aspek ekonomi, budaya, SDM, dan inovasi digital.

21.3. Keterkaitan Tujuan & Sasaran Renstra per Bidang

21.3.1. Pariwisata

- *Tujuan Renstra:*

  Pengembangan destinasi, peningkatan kunjungan wisata, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata.
- *Sasaran RPJMD terkait:*
  - *Pertumbuhan kunjungan wisata,*
  - *Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB,*
  - *Pengembangan kawasan strategis pariwisata.*
- *Keterkaitan:*

  ✓*Sangat selaras dengan Misi 2 (pertumbuhan ekonomi).*

  ✓ *Indikator kunjungan wisata, pengembangan ODTW/KSP, dan event pariwisata menjadi "turunan langsung" IKU RPJMD sektor pariwisata.*

21.3.2. Ekonomi Kreatif (Ekraf)

- *Tujuan Renstra:*

  Meningkatkan jumlah pelaku ekraf, kompetensi SDM, dan keberlanjutan usaha ekraf.

- *Sasaran RPJMD:*
  - *Penguatan ekraf sebagai sumber pertumbuhan ekonomi,*
  - *Peningkatan kreativitas dan daya saing UMKM.*
- *Keterkaitan:*

  ✓*Selaras dengan Misi 2 (ekonomi berbasis inovasi).*

  ✓ *Kegiatan pelatihan, pembinaan, fasilitasi promosi & ruang kreatif mendukung transformasi struktur ekonomi ke arah ekonomi kreatif.*

21.3.3. Kebudayaan

- Tujuan Renstra:

  Pelestarian budaya lokal, pengembangan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), dan peningkatan SDM kebudayaan.

- Sasaran RPJMD:
  - Perlindungan identitas budaya,
  - Pelestarian warisan budaya,
  - Penguatan event budaya sebagai daya tarik wisata.
- Keterkaitan:

  ✓ Menguatkan Misi 3 (SDM unggul & karakter).

  ✓ Indikator WBTb, objek budaya, dan komunitas budaya mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah.

21.3.4. Kepemudaan

- *Tujuan Renstra:*

  Peningkatan partisipasi, kompetensi, dan kreativitas pemuda.

- *Sasaran RPJMD:*
  - *Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP),*
  - *Fasilitasi organisasi pemuda,*
  - *Partisipasi pemuda dalam pembangunan.*

- *Keterkaitan:*

  ✓*Menjawab langsung Misi 3 tentang penguatan SDM muda.*

  ✓ Pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan pemuda menjadi **instrumen langsung** untuk menaikkan IPP.

21.3.5. Olahraga

- *Tujuan Renstra:*

  Peningkatan prestasi olahraga dan layanan olahraga masyarakat.

- *Sasaran RPJMD:*
  - *Peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga,*
  - *Penyediaan sarana & prasarana olahraga,*
  - *Pengembangan pusat pembinaan atlet.*
- *Keterkaitan:*

  ✓ *Konsisten dengan Misi 3 (SDM unggul) dan layanan publik.*

  ✓ *Program pembinaan atlet, kompetisi, dan revitalisasi sarpras menjadi tulang punggung pencapaian target indeks olahraga.*

21.4. Tingkat Konsistensi Renstra DISPAREKRAF dengan RPJMD

Tabel **"Tingkat Konsistensi"** pada halaman 384 merangkum penilaian sebagai berikut:

Aspek	Konsistensi	Catatan Utama
Arah Kebijakan	★★★★★	Seluruh kebijakan mengikuti struktur RPJMD: ekonomi – budaya – SDM – inovasi
Tujuan & Sasaran	★★★★☆	Kuat, tapi beberapa sasaran masih umum dan belum sepenuhnya outcome-based
Program & Kegiatan	★★★★★	Sangat selaras; mengikuti nomenklatur nasional & RPJMD
Indikator (IKU/IKK)	★★★★☆	Terkait langsung dengan IKU RPJMD, perlu penguatan SMART (M & R)
Pendanaan & Prioritas	★★★☆☆	Perlu penajaman fokus ke KSP, event unggulan, dan ekosistem ekraf

Kekuatan Utama:

1. *Keselarasan struktural sangat kuat – Renstra menyatakan eksplisit bahwa Tujuan & Sasaran adalah turunan Visi–Misi Kepala Daerah.*

2. *Program mengikuti nomenklatur nasional & RPJMD → memudahkan sinkronisasi dokumen dan evaluasi.*

Kelemahan:

1. *Beberapa indikator budaya, olahraga, dan kepemudaan belum memiliki target outcome jangka menengah yang kuat.*
2. *Integrasi lintas bidang (budaya–pariwisata, pemuda–ekraf) masih lemah.*
3. *Program ekraf belum mencakup secara eksplisit 17 subsektor ekonomi kreatif.*

21.5. SMART + GAP Analysis Indikator DISPAREKRAF

21.5.1. Ringkasan SMART per Indikator

Bagian 21.3 mengulas indikator kunci per bidang dengan skala SMART 1–5:

- Pariwisata
  - *Jumlah kunjungan wisatawan*: 21/25
  - *Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan*: 21/25
- Ekonomi Kreatif
  - *Pertumbuhan subsektor ekraf*: 22/25 (data menunjukkan peningkatan 30% → 41,18% pada 2024)
- Kebudayaan
  - *Jumlah WBTb yang ditetapkan*: 22/25
- Kepemudaan
  - *Persentase pemuda berprestasi*: 22/25
- Olahraga
  - *Jumlah sarpras yang direvitalisasi*: 22/25
  - *Prestasi atlet pada kejuaraan*: 21/25

Rangkuman (tabel “Ringkasan Skor SMART DISPAREKRAF”):

- *Semua indikator utama berada di kategori “baik–sangat baik” (21–22/25).*
- *Tidak ada indikator yang lemah secara desain, namun terdapat GAP kritis pada:*
  1. *Ketiadaan baseline data yang lengkap,*
  2. *Target belum berbasis analisis tren dan kapasitas (pariwisata, ekraf),*
  3. *Outcome kepemudaan & olahraga belum cukup kuat,*
  4. *Definisi operasional belum jelas (pemuda berprestasi, prestasi atlet),*
  5. *Kurangnya integrasi data subsektor ekraf & destinasi wisata.*

21.6. Matrix Problem–Solution per Bidang dan Temuan GAP Strategis

21.6.1. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama:

1. *Kunjungan wisata belum tumbuh signifikan*
    - *Root cause: promosi terfragmentasi, daya tarik destinasi kurang kuat, fasilitas belum standar.*
    - *Risiko: target pertumbuhan ekonomi (Misi 2) melemah.*
    - *Solusi penguatan: digital marketing terpadu, travel pattern, integrasi platform SIPARKAB.*
2. *Kualitas destinasi tidak merata*
    - *Root cause: infrastruktur dasar terbatas, standar destinasi belum diterapkan, pengelolaan masih berbasis komunitas.*
    - *Solusi: standarisasi destinasi (CHSE/SNI), klaster pariwisata, revitalisasi akses.*
3. *Inovasi atraksi/event wisata minim*
    - *Solusi: desain Flagship Event (Festival Gresik, Festival Bawean) sebagai brand identity daerah.*

21.6.2. Ekonomi Kreatif

GAP utama:

4. *Pertumbuhan pelaku ekraf belum merata → butuh pemetaan 17 subsektor, Creative Hub, dan kurasi produk.*
5. *Nilai tambah ekraf rendah → minim sertifikasi (SNI/halal/HAKI) dan kualitas desain; perlu skema inkubasi & sertifikasi.*
6. *Ekosistem kolaborasi kreatif lemah → perlu ruang kreatif, Creative Space, dan program kolaborasi lintas komunitas.*

21.6.3. Kebudayaan

Masalah strategis:

7. *Pelestarian budaya belum optimal → WBTb terbatas, dokumentasi lemah; memerlukan Cultural Masterplan dan digitalisasi.*
8. *Partisipasi masyarakat menurun → butuh revitalisasi sanggar, festival budaya lokal (misal Festival Budaya Bawean).*

9. *Integrasi budaya–pariwisata lemah → event budaya belum dikemas wisata; perlu paket wisata religi–budaya dan kolaborasi travel agent.*

21.6.4. Kepemudaan

GAP utama:

10. *Partisipasi pemuda rendah*
11. *Kapasitas & kompetensi pemuda belum optimal*
12. *Ruang kreativitas pemuda terbatas*

Solusi penguatan: basis data pemuda, Youth Center/Youth Lab, inkubasi wirausaha muda, sertifikasi kompetensi, dan layanan "one stop youth service".

21.6.5. Olahraga

Permasalahan Iokal:

13. *Prestasi atlet belum meningkat signifikan → belum ada Sport Development Plan & talent scouting yang sistematis.*
14. *Sarpras olahraga tidak memadai dan tidak merata → banyak GOR/lapangan tidak layak, belum ada standar kelayakan.*
15. *Partisipasi masyarakat rendah → perlu Gresik Sport Festival dan olahraga berbasis komunitas.*

21.6.6. Temuan GAP Strategis Utama

Bab meringkas 5 GAP strategis utama:

1. ***Pariwisata*** *– promosi terfragmentasi & kualitas destinasi belum standar → mengancam pertumbuhan ekonomi daerah.*
2. ***Ekraf*** *– tidak ada pemetaan subsektor & inkubasi → ekraf gagal menjadi lokomotif ekonomi baru.*
3. ***Kebudayaan*** *– ketiadaan Cultural Masterplan & dokumentasi → risiko hilangnya identitas lokal.*
4. ***Kepemudaan*** *– belum ada layanan terpadu pemuda → IPP stagnan dan potensi inovasi muda terabaikan.*
5. ***Olahraga*** *– tanpa sistem pembinaan dan standarisasi sarpras → prestasi dan partisipasi sulit meningkat.*

21.7. Tabel Prioritas High–Medium–Low dan Fokus Kebijakan

21.7.1. High Priority (8 Kebijakan Utama)

Tabel 21.5 menetapkan 8 prioritas tinggi yang dampaknya sangat besar terhadap RPJMD dan harus dijalankan 2025–2027:

1. *Digitalisasi promosi wisata – "SIPARKAB+"*
2. *Standarisasi & pengembangan destinasi wisata*
3. *Pemetaan 17 subsektor ekraf + pembangunan Creative Hub*
4. *Inkubasi & sertifikasi UMKM ekraf (SNI, Halal, HAKI)*
5. *Penyusunan Cultural Masterplan & digitalisasi dokumentasi budaya*
6. *Penguatan kompetensi pemuda (skill, leadership, wirausaha)*
7. *Penyusunan Sport Development Plan & pembinaan atlet*
8. *Standarisasi & revitalisasi sarpras olahraga berbasis standar nasional*

21.7.2. Medium & Low Priority

- *Medium Priority (event flagship, integrasi budaya–wisata, ruang kolaborasi ekraf, sanggar budaya, organisasi pemuda, event olahraga masyarakat) → dikuatkan setelah pondasi high priority berjalan.*
- *Low Priority (wisata tematik kecil skala desa, workshop mikro, event seni kecil, seremonial pemuda, kompetisi olahraga kecil) → dilakukan bila anggaran mencukupi dan sebagai penguat, bukan motor utama.*

Ringkasan eksekutifnya:

Delapan High Priority adalah "core strategies DISPAREKRAF 2025–2027"; medium & low berfungsi sebagai pelengkap setelah pondasi utama kuat.

8. Rencana Tindak Lanjut (RTT) dan Tahapan Waktu

8.1. RTT Prioritas Tinggi

Bab menyusun RTT rinci untuk tiap prioritas tinggi:

1. SIPARKAB+ (Digital Tourism Super App)
    - Audit kanal promosi, desain aplikasi, integrasi media sosial & travel platform, QR Code destinasi.
    - Output: platform promosi modern terintegrasi (2025–2026).

2. Standarisasi & Pengembangan Destinasi
    - Pemetaan dan scoring kelayakan 30+ destinasi;
    - Perbaikan akses, toilet, signage, keamanan; pelatihan pengelola, penerapan CHSE;
    - Output: minimal 10 destinasi bersertifikat standar (2025–2027).
3. Ekosistem Ekraf (Pemetaan + Creative Hub)
    - Mapping 17 subsektor, inkubasi ±60 UMKM/tahun, pembangunan Creative Hub (co-working, studio, galeri);
    - Output: ekosistem ekraf terintegrasi (2025–2028).
4. Sertifikasi Ekraf (SNI, Halal, HAKI)
    - Coaching clinic, pendampingan ±50 UMKM/tahun, fasilitasi pembiayaan sertifikasi;
    - Output: produk ekraf bersertifikat dan siap pasar (2025–2027).
5. Cultural Masterplan & Digitalisasi Budaya
    - Penyusunan grand design kebudayaan Gresik, digitalisasi arsip & WBTb, kalender budaya tahunan;
    - Output: sistem pelestarian budaya berbasis data (2025–2027).
6. Penguatan Kompetensi Pemuda
    - Pelatihan skill kreatif, digital marketing, kewirausahaan; inkubator wirausaha muda;
    - Outcome: peningkatan IPP (2025–2029).
7. Sport Development Plan (SDP)
    - Identifikasi cabor unggulan, coaching clinic, sertifikasi pelatih, sistem evaluasi prestasi;
    - Output: peta jalan pembinaan atlet 2025–2029 (disusun 2025–2026).
8. Standarisasi & Revitalisasi Sarpras Olahraga
    - Audit kelayakan GOR/lapangan, revitalisasi prioritas, penerapan standar nasional (Permenpora);
    - Output: sarpras olahraga layak & lebih merata (2025–2028).

21.9. GAP Analysis Menyeluruh dan 10 GAP Paling Kritis

21.9.1. GAP per Bidang

Bab 21.7 menguraikan GAP **kinerja** dan **kebijakan** di tiap bidang:

- **Pariwisata:**
  - Promosi masih offline, belum ada digital tourism platform, banyak destinasi belum standar CHSE, belum ada flagship event.
- **Ekonomi Kreatif:**
  - Pertumbuhan pelaku ekraf tidak merata, produk minim sertifikasi, belum ada Creative Hub & riset ekraf.
- **Kebudayaan:**
  - WBTb masih terbatas, event budaya belum dikemas wisata, partisipasi masyarakat menurun, belum ada Cultural Masterplan & digital heritage.
- **Kepemudaan:**
  - Partisipasi pemuda & kapasitas masih rendah, layanan terfragmentasi, belum ada basis data integratif dan program kewirausahaan yang masif.
- **Olahraga:**
  - Prestasi atlet stagnan, sarpras banyak tidak layak, partisipasi masyarakat rendah, belum ada SDP & standar sarpras, belum ada sistem monitoring prestasi.

21.9.2. GAP per Komponen Renstra

- **Tujuan & Sasaran:**
  - Tujuan pariwisata belum menyebut kualitas destinasi & lama tinggal wisatawan;
  - Tujuan ekraf belum mencerminkan transformasi ekonomi kreatif secara komprehensif;
  - Sasaran pemuda & olahraga masih dominan output, belum outcome (IPP, kualitas pemuda, cabang olahraga unggulan).
- **Program:**
  - Belum ada program kuat transformasi digital pariwisata,
  - Inkubasi ekraf belum komprehensif,
  - Belum ada Youth Center, Cultural Masterplan, dan SDP dalam struktur program.

- Indikator:
    - Beberapa indikator masih umum, baseline kurang lengkap, target belum berbasis tren, dan relevansi dengan SPM/RPJMD perlu diperkuat.
- Tata Kelola:
    - Tidak ada sistem data terintegrasi (wisata–ekraf–budaya–pemuda–olahraga),
    - Partnership dengan komunitas belum optimal,
    - Belum ada Dashboard Monev Renstra & inovasi layanan yang sistemik.

21.9.3. Top 10 Critical GAP (Ringkasan)

Di akhir bab, dirumuskan 10 GAP paling kritis:

1. *Digitalisasi pariwisata & ekraf belum tersedia.*
2. *Standarisasi destinasi dan sarpras olahraga belum ada.*
3. *Cultural Masterplan belum disusun.*
4. *Sport Development Plan belum ada.*
5. *Pemetaan 17 subsektor ekraf belum dilakukan.*
6. *SDM pariwisata, ekraf, dan pemuda belum kompetitif.*
7. *Integrasi budaya–pariwisata belum berjalan.*
8. *Ekosistem kreatif (Creative Hub) belum terbentuk.*
9. *Indikator kinerja masih dominan output, belum outcome.*
10. *Data dasar & baseline belum lengkap.*

21.10. Kesimpulan Utama Executive Summary

1. Renstra DISPAREKRAF 2025–2029 sangat selaras (Highly Aligned) dengan Visi–Misi RPJMD 2025–2029.
    - *Khususnya pada Misi 2 (ekonomi), Misi 3 (SDM & budaya), dan Misi 4 (tata kelola & inovasi).*
    - *Lima bidang – pariwisata, ekraf, kebudayaan, kepemudaan, olahraga – terhubung jelas dengan sasaran RPJMD.*
2. Kualitas desain indikator (SMART) relatif kuat (skor 21–22/25), namun masih membutuhkan:
    - *Baseline Yang Lebih Lengkap,*
    - *Target Berbasis Tren & Kapasitas,*

- *Definisi Operasional Yang Jelas (Khususnya Di Bidang Pemuda & Olahraga).*

3. Problem–Solution Policy dan Tabel Prioritas memberikan peta jalan kebijakan yang konkret, dengan 8 High Priority sebagai inti reformasi:
   - *Digital Tourism & SIPARKAB+,*
   - *Standarisasi Destinasi,*
   - *Ekosistem Ekraf & Creative Hub,*
   - *Inkubasi & Sertifikasi UMKM Ekraf,*
   - *Cultural Masterplan,*
   - *Penguatan Pemuda,*
   - *Sport Development Plan,*
   - *Standarisasi & Revitalisasi Sarpras Olahraga*.
4. RTT 2025–2029 telah mengkonversi prioritas ke dalam langkah operasional, output dan timeline yang jelas, sehingga dapat langsung diintegrasikan ke Bab Rencana Tindak Lanjut Renstra maupun Bab Integrasi Renstra–RPJMD.
5. GAP utama bukan pada keselarasan, tetapi pada kedalaman outcome dan tata kelola:
   - *Digitalisasi Dan Sistem Data Yang Belum Terintegrasi,*
   - *Belum Adanya Dokumen Master (Cultural Masterplan, Sdp, Creative Hub Blueprint),*
   - *Indikator Yang Belum Sepenuhnya Outcome-Based,*
   - *Dan Belum Optimalnya Pemetaan Subsektor Ekraf & Destinasi Prioritas.*
6. Dengan menutup 10 Critical GAP dan melaksanakan 8 High Priority kebijakan, Renstra DISPAREKRAF berpotensi:
   - menjadi instrumen kunci pengembangan sektor unggulan baru (pariwisata, ekraf, budaya) di Gresik,
   - mendorong peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif & wisata,
   - memperkuat identitas budaya lokal bersama peningkatan IPP dan indeks olahraga,
   - serta memastikan bahwa Gresik benar-benar tampil sebagai “Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berbasis Identitas Lokal” sepanjang periode RPJMD 2025–2029.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023*. Surabaya: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Bappenas RI. (2020). *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.

Bappenas. (2020). *Panduan Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah*.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. John Wiley & Sons.

Doran, G. T. (1981). *There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives*. Management Review, 70(11), 35–36.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019* tentang SISWASKEUDA.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Data Realisasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan I & II*. Diakses dari: https://www.kemenkeu.go.id

Lestari, A. (2021). Evaluasi Efisiensi Anggaran Daerah dalam Pelaksanaan APBD Perubahan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 18(2), 103–118.

Kementerian PANRB. (2021). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama*.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi.

Nurhidayat, D., & Handayani, R. (2018). Keterlambatan Penetapan APBD Perubahan dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Program Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–57.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Gresik. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026*. Gresik: Bappeda Kabupaten Gresik.

Pemerintah Kabupaten Gresik. (2021–2026). *Rencana Strategis Perangkat Daerah* (varian perangkat daerah):

- *Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Perubahan II TA 2023*.

— *Renstra Dinas PMD Kabupaten Gresik Perubahan 2021–2026*.
— *Renstra DISPAREKRAFBUDPORA Tahun 2021–2026 Perubahan 2025*.
— *Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 Review*.
— *Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026 Perubahan Ketiga*.
— *Renstra Diskoperindag Penyesuaian Kepmen 050 Tahun 2021–2026*.
— *Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021*-2016
— *Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021*-2026

Pratiwi, N. (2022). Evaluasi Perubahan Kebijakan Fiskal Daerah Pasca Pandemi: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 55–69.

Rachmawati, F., & Santosa, P. W. (2019). Analisis Pemanfaatan SiLPA dalam APBD Perubahan dan Implikasinya terhadap Belanja Prioritas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 12(3), 89–101.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wildavsky, A. (1986). *Budgeting: A Comparative Theory of Budgeting Processes*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Yusuf, H., & Mardiyah, A. (2020). Pengaruh Perubahan APBD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten di Jawa Tengah). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 134–147.